

KUNJUNGAN DELEGASI: FORUM PARLEMEN MUSLIMIN SE-DUNIA

MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI KONSTITUSI



MAJELIS

MPR RUMAH KEBANGSAAN



EDISI NO.03/TH.XIV/MARET 2020



POKOK-POKOK

HALUAN NEGARA

MASIH TERUS DIKAJI

ISSN 0854-6371



9 770854 637158

06 Perspektif
Arti Penting
Haluan Negara

20 Nasional
Semua Sepakat Perlunya
Pokok-Pokok Haluan Negara

39 Selingan
Ambon Kota Musik
Dunia

50 Sosialisasi
MPR Serap Aspirasi Masyarakat
di Kalimantan Tengah

MPR
RUMAH KEBANGSAAN
PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA
DAN KEDAULATAN RAKYAT



4 PILAR
MPR RI

PANCASILA, UUD NRI TAHUN 1945, NKRI, BHINNEKA TUNGGAL IKA





**MPR
RUMAH KEBANGSAAN
PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA
DAN KEDAULATAN RAKYAT**

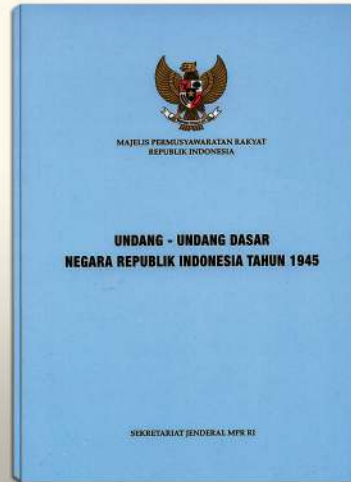


EMPAT PILAR MPR
PANCASILA, UUD NRI TAHUN 1945, NKRI, BHINNEKA TUNGGAL IKA



INDONESIA
MPR RUMAH KEBANGSAAN PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA DAN KEDAULATAN RAKYAT

MPR
RUMAH KEBANGSAAN
PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA
DAN KEDAULATAN RAKYAT



EMPAT PILAR MPR
PANCASILA, UUD NRI TAHUN 1945, NKRI, BHINNEKA TUNGGAL IKA



INDONESIA
MPR RUMAH KEBANGSAAN PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA DAN KEDAULATAN RAKYAT

Daftar Isi

EDISI NO.03/TH.XIV/MARET 2020



08 BERITA UTAMA

Pokok-Pokok Haluan Negara Masih Terus Dikaji

Amendemen terbatas UUD NRI Tahun 1945 terkait Pokok-Pokok Haluan Negara sedang dalam kajian mendalam di MPR. Dalam proses pendalaman kajian ini, Pimpinan MPR melibatkan masyarakat Indonesia sebagai implementasi dari musyawarah untuk mencapai mufakat.



16 Nasional

Bambang Soesatyo: MPR Memiliki Kewenangan Mulia



50 Sosialisasi

MPR Serap Aspirasi Masyarakat di Kalimantan Tengah



39 SELINGAN

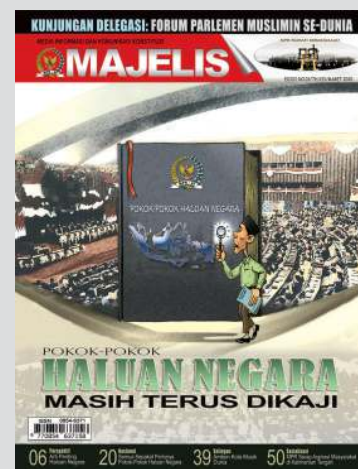
Ambon Sebagai Kota Musik



76 Profil

Syariefuddin Hasan

Pengantar Redaksi	04
Perspektif	06
Gema Pancasila	36
Aspirasi Masyarakat	47
Diskusi Majelis	48
Varia MPR	65
Wawancara	68
Figur	72
Ragam	74
Dari Rumah Kebangsaan	80
Rehal	82



COVER

Edisi No.03/TH.XIV/Maret 2020

Kreatif: Jonni Yasrul - Foto: Istimewa



Budi Muliawan
Redaktur Pelaksana

Pengantar Redaksi

Pokok-Pokok Haluan Negara dan Penataan Kewenangan MPR

MAJELIS Permusyawaratan Rakyat (MPR) Periode 2019 – 2024 mendapat amanah dari MPR periode sebelumnya (MPR Periode 2014 – 2019) untuk melanjutkan kajian yang mendalam terhadap aspirasi masyarakat, di antaranya tentang Pokok-Pokok Haluan Negara (dulu disebut dengan Garis-Garis Besar Haluan Negara/GBHN). Pokok-Pokok Haluan Negara ini merupakan bentuk aspirasi rakyat yang kemudian ditangkap MPR Periode 2014 – 2019 untuk selanjutnya mengkaji aspirasi tersebut, dan akhirnya menjadi bahan rekomendasi yang diserahkan kepada MPR periode sekarang.

Amanah kajian mendalam itu terkait dengan wacana memasukkan Pokok-Pokok Haluan Negara dalam konstitusi UUD NRI Tahun 1945. Artinya, UUD NRI Tahun 1945 perlu diamandemen. Untuk melakukan kajian apalagi memutuskan hasil akhirnya apakah perlu amandemen atau tidak, tentu membutuhkan waktu dan pembahasan yang sangat serius dan detil. MPR tidak ingin melakukan sendiri. Karena itu, MPR membutuhkan masukan dari berbagai elemen masyarakat agar keputusan (apakah perlu amandemen atau tidak) berdampak baik buat seluruh rakyat Indonesia.

Itulah salah satu agenda penting dan menjadi fokus MPR Periode 2019 – 2024 ini, yakni soal amandemen terbatas UUD terkait Pokok-Pokok Haluan Negara. Hal ini pula yang menjadi dasar bagi Pimpinan MPR Periode 2019 – 2024 melakukan serap aspirasi ke berbagai elemen masyarakat, seperti tokoh bangsa, pimpinan partai politik, pimpinan Ormas dan Ormas keagamaan, pimpinan media massa nasional, kalangan perguruan tinggi (akademisi), mahasiswa, pemerintah daerah, dan lainnya. Tujuannya, untuk bersilaturahmi sekaligus bermusyawarah, berdiskusi, dan meminta

masuk soal amandemen terbatas UUD terkait Pokok-Pokok Haluan Negara.

Dalam waktu-waktu mendatang Pimpinan MPR masih melakukan serap aspirasi agar hasilnya menjadi bahan kajian yang lengkap, sehingga keputusan yang akan diambil nanti sudah sesuai dan tepat. Melihat dari antusiasme kalangan yang dikunjungi Pimpinan MPR, agaknya Pokok-Pokok Haluan Negara memang diperlukan agar pembangunan nasional mempunyai arah yang jelas. Pokok-Pokok Haluan Negara membuat pembangunan nasional bisa berjalan terpadu, berkesinambungan, dan berkelanjutan.

Namun, tentu ada implikasi dengan memasukkan Pokok-Pokok Haluan Negara dalam konstitusi (UUD NRI Tahun 1945) melalui amandemen terbatas. Implikasi itu, misalnya, bagaimana dengan kedudukan dan wewenang MPR? Sebab, MPR yang akan mengeluarkan Ketetapan tentang Pokok-Pokok Haluan Negara. Lalu muncul sejumlah pertanyaan, apakah MPR bisa mengeluarkan Ketetapan (TAP) yang sifatnya mengatur? Apakah dengan kewenangan itu MPR kembali menjadi lembaga tertinggi? Bagaimana dengan Presiden sebagai pelaksana Pokok-Pokok Haluan Negara? Dan, pertanyaan lainnya seputar penataan kewenangan MPR.

MPR memang memiliki kewenangan untuk mengubah dan menetapkan UUD. Perubahan UUD tentu akan berimplikasi yang sangat luas. Karena itu, MPR harus menjaga sistem ketatanegaraan kita tetap baik. Apapun keputusan yang akan diambil, apakah akan dilakukan amandemen UUD atau tidak, kita berharap keputusan itu demi kebaikan dan kepentingan bangsa, negara, dan seluruh rakyat Indonesia. □



PENASEHAT

Pimpinan MPR-RI

PENANGGUNG JAWAB

Ma'ruf Cahyono

PEMIMPIN REDAKSI

Siti Fauziah

DEWAN REDAKSI

Yana Indrawan, Dyastasita,
Heri Herawan, Maifrizal

REDAKTUR PELAKSANA

Budi Muliawan

KOORDINATOR REPORTASE

Budi Muliawan

REDAKTUR FOTO

Oni Arief Benyamin,
Sucipto, Slamet Eko Suprayitno

REPORTER

Ana Suzana, Bayu Nugroho,
Tengku Novan Muda Mulya,
Yenita Revi, Ikhwani Bimo F,
Amelia Rubinta

FOTOGRAFER

Ahmad Suryana, Frinda,
Restu, Suprianto, Sugeng, Wira,
A. Ariyana, Agus Darto

PENANGGUNG JAWAB

DISTRIBUSI

Elen Magdalena

KOORDINATOR DISTRIBUSI

Cucu Riwayat

STAF DISTRIBUSI

Ati Oktafia, Amiruddin,
Anggun Permana, Armansyah,
Dhita Fitasari Junaid

SEKRETARIS REDAKSI

Djarot Widiarto

TIM AHLI

Syahril Chili, Jonni Yasrul,
Ardi Winangun, Budi Sucahyo,
Derry Irawan, M. Budiono

ALAMAT REDAKSI

Bagian Pemberitaan dan Layanan Informasi, Biro Humas, Sekretariat Jenderal MPR-RI Gedung Nusantara III, Lt. 5 Jl. Jend. Gatot Subroto No. 6, Senayan, Jakarta 10270. Telp. (021) 57895237, 57895238 Fax.: (021) 57895237 Email: pemberitaan@setjen.mpr.go.id



Implementasi Sila-sila Pancasila



- Berhenti saling menyakiti, mulailah saling menghargai
- Berhenti saling merendahkan, mulailah menghormati perbedaan
- Berhenti takabur, mulailah bersyukur



- Stop marah-marah, mulailah bersikap ramah
- Berhenti memaki, mulailah memakai hati
- Berhenti curiga, mulailah menyapa.



- Berhenti berseteru, mulailah bersatu
- Berhenti memaksakan, mulailah berkorban
- Berhenti mencari perbedaan, mulailah bergandeng tangan



- Berhenti silang pendapat, mulailah mencari mufakat
- Berhenti besar kepala, mulailah bertampang dada
- Berhentilah bersilat lidah, mulailah bermusyawarah



- Berhenti malas, mulailah bekerja keras
- Stop diskriminasi, mulailah toleransi
- Berhenti menang sendiri, mulailah berbagi

EMPAT PILAR MPR RI

Pancasila Sebagai Dasar dan Ideologi Negara
 UUD NRI Tahun 1945 Sebagai Konstitusi Negara
 NKRI Sebagai Bentuk Negara
 Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Semboyan Negara

MANIFESTO

Masih Indonesiakah kita setelah sekian banyak jatuh bangun setelah sekian banyak tertimpa dan tertimpa setelah sekian banyak terbentur dan terbentur

Masihkah kita meletakkan harapan di atas kekecewaan persatuan di atas perselisihan musyawarah di atas amarah kejujuran di atas kepentingan

Ataukah ke-Indonesia-an kita telah pudar dan hanya tinggal slogan dan gambar?

Tidak!

Karena mulai kini nilai-nilai itu kita lahirkan kembali Kita bunyikan dan kita bumikan menjadi jiwa dan raga setiap manusia Indonesia

Dari Sabang sampai Merauke kita akan melihat lebih banyak lagi syukur rumah dan tegur sapa gotong royong dan tolong menolong kesantunan bukan anjuran tapi kebiasaan kepedulian menjadi dorongan

Dari terbit hingga terbenamnya matahari kita melihat orang-orang berpeluh tanpa mengeluh berkeringat karena semangat kerja keras menjadi ibadah ketepatan menjadi kesadaran kejujuran menjadi bagian harga diri dan kehormatan

Wajah mereka adalah wajah Indonesia yang sebenarnya tangan mereka adalah tangan Indonesia yang sejati keluhuran budi mereka adalah keluhuran Indonesia yang sesungguhnya

Hari ini kita gemakan, Ini Baru Indonesia!

INDONESIA
DAJANG MURNI, CARI EDISI



ILUSTRASI: SUSTHANTO

Arti Penting Haluan Negara di Negara Demokrasi Konstitusional

PERUBAHAN UUD 1945 melahirkan reformasi di bidang ketatanegaraan. Salah satu akibat dari perubahan tersebut adalah hilangnya kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam menetapkan haluan negara atau yang dalam berbagai terminologi asing disebut *directive principles of state policy* dan *fundamental principles and state policy*, yang di Indonesia lebih dikenal dengan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Perubahan yang menghapus kewenangan MPR untuk menetapkan GBHN membawa konsekuensi adanya ketidakjelasan arah pembangunan dan pola kelembagaan negara idealnya diatur dalam sebuah haluan negara yang pembentukannya menjadi kewenangan lembaga perwakilan rakyat (kedaulatan rakyat). Dengan dihapusnya GBHN dalam penyelenggaraan bernegara, bangsa Indonesia seakan kehilangan salah satu visi yang sangat penting, yakni keberadaan Visi Haluan Negara.

Ketiadaan haluan negara ini mengakibatkan arah penyelenggaraan negara menjadi parsial, tidak holistik, dan tidak berkelanjutan karena masing-masing periode pemerintahan membawa visinya masing-masing. Negara ini tidak memiliki suatu haluan penyelenggaraan yang bersifat menyeluruh dan berorientasi ke depan, yang menjadi bintang pemandu (*Leitstar*) bagi bangsa ini. Bahkan arah penyelenggaraan negara terfragmentasi dalam setiap lembaga negara. Singkatnya, hilangnya GBHN telah mengakibatkan hilangnya haluan negara yang bersifat menyeluruh, terarah, terpadu, dan berkesinambungan.

Selain itu, hilangnya GBHN berdampak pada hilangnya pernyataan kehendak rakyat yang berisikan haluan negara sebagai pedoman dalam memberikan arah bagi bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaannya. Setelah tanpa GBHN, kesinambungan arah tujuan pembangunan nasional menjadi hilang dan seperti tak terarah. Seharusnya, pembangunan Indonesia untuk jangka panjang perlu ditetapkan dan ditegaskan agar menjadi acuan bagi presiden khususnya sebagai pemegang kekuasaan eksekutif. Dengan demikian, siapapun presiden yang kelak terpilih tetap memiliki acuan untuk menindaklanjuti program pembangunan yang sudah dijalankan pemerintah sebelumnya.

Pasca hilangnya GBHN setelah perubahan UUD 1945, terdapat perubahan mendasar terkait dengan sistem dan proses perencanaan pembangunan di Indonesia. Perubahan ini terutama

ditandai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

Namun demikian, konsistensi dan kesinambungan konsep GBHN dinilai lebih mumpuni ketimbang SPPN itu sendiri. Dalam GBHN orientasi yang dibuat adalah untuk jangka panjang dengan perencanaan yang matang selama 25 tahun dan dilakukan secara bertahap selama 5 tahun sekali melalui Repelita. Selain itu, GBHN juga tidak mudah diubah-ubah karena dibuat dan disusun oleh MPR yang secara logika pasti akan lebih stabil dan sulit diubah karena terdiri dari berbagai macam elemen masyarakat yang terasosiasikan melalui anggota DPR dan anggota DPD. Ini berbeda dengan SPPN yang hanya dibuat oleh Presiden seorang yang nantinya akan membuat SPPN itu mudah diubah-ubah sesuai dengan kehendak Presidennya. Hal ini membuktikan bahwa SPPN dalam implementasinya sangatlah tidak konsisten.

Permasalahan lain yang kerap terjadi pada SPPN dan tidak terjadi pada GBHN adalah tidak adanya jaminan bahwa SPPN maupun RPJPN ini dilaksanakan secara konsisten oleh pemangku kepentingan. Hal ini disebabkan tidak adanya mekanisme yang jelas untuk menilai apakah dokumen-dokumen perencanaan yang telah dibuat seperti RPJMN, Renstra-KL, RKP, RKK di level nasional dan RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD di level daerah memang sudah merujuk pada RPJP ataukah tidak. Apalagi jika ditambahkan dengan keharusan untuk mengintegrasikan penjabaran visi dan misi Presiden/Kepala Daerah terpilih maka potensi ketidaksinambungan dengan RPJP ternyata menjadi lebih besar lagi.

Arti Penting GBHN

Pada dasarnya GBHN bukan semata-mata berfungsi sebagai arah pembangunan nasional saja, akan tetapi di dalamnya terkandung juga mekanisme kontrol kepada Presiden agar membangun sesuai dengan apa yang telah disepakati. Adanya mekanisme ini tentunya akan menstimulasi Presiden agar tidak melakukan program pembangunan yang asal-asalan dan sewenang-wenang yang melenceng dari arah yang telah disusun MPR sebagai representasi kehendak rakyat.

Lebih lanjut, dengan situasi Presiden yang terus merasa diawasi untuk mengikuti arah pembangunan sesuai dengan GBHN, hal ini akan memotivasi Presiden untuk melakukan pembangunan yang berorientasi

Dr. H. Ma'ruf Cahyono, SH., MH.
Sekretaris Jenderal MPR RI



kepada kesejahteraan rakyat. Sebab, apabila terbukti menyimpang dari GBHN terdapat sanksi yang tegas kepada Presiden dengan dalih telah melakukan tindakan yang melanggar haluan negara. Sejalan dengan hal tersebut, GBHN yang semula hanya berisi tentang dasar pembangunan nasional, agenda jangka panjang, dan pembangunan lima tahun, ditambahkan dengan adanya ketentuan sanksi. Apabila Presiden terbukti secara sengaja melanggar GBHN sebagai arah pembangunan yang telah disusun oleh MPR, Presiden dianggap telah melakukan tindakan yang melanggar haluan negara.

Artinya, GBHN sebagai pernyataan kehendak rakyat dapat pula dijadikan sebagai suatu sarana kontrol masyarakat dalam meminta pertanggungjawaban Presiden. Ia merupakan pola pembangunan nasional yang mengejawantahkan tujuan nasional serta berupaya mewujudkan cita-cita Negara Indonesia merdeka. Dengan adanya GBHN, rakyat sebagai pemegang kedaulatan melalui MPR dapat mengontrol dan mengimbangi cabang kekuasaan negara lainnya (dalam hal ini eksekutif), serta meminta pertanggungjawabannya. Namun, tentu dengan tidak mengabaikan prosedur konstitusional yang telah ditetapkan.

Jika dianalisa, terdapat 4 (empat) arti penting GBHN dalam penyelenggaraan negara, yakni: *Pertama*, GBHN merupakan suatu haluan negara yang merupakan wujud pernyataan kehendak rakyat yang pada hakikatnya merupakan suatu pola umum pembangunan nasional yang ditetapkan oleh MPR. *Kedua*, GBHN merupakan pernyataan kehendak rakyat untuk mewujudkan suatu tujuan negara serta berupaya untuk memberikan arah bagi perjuangan dari rakyat Indonesia dalam mewujudkan tujuannya.

Ketiga, untuk memberikan kejelasan arah bagi perjuangan dan pembangunan bangsa dan negara agar dapat menciptakan keadaan yang diinginkan dalam jangka waktu tertentu untuk mewujudkan cita-

cita bangsa Indonesia. *Keempat*, GBHN bukan semata-mata berfungsi sebagai arah pembangunan nasional saja, akan tetapi di dalamnya terkandung juga mekanisme kontrol kepada Presiden agar membangun sesuai dengan apa yang telah disepakati rakyat.

Dihapusnya GBHN dalam penyelenggaraan negara pada saat ini tentu membawa konsekuensi. *Pertama*, arah penyelenggaraan negara menjadi parsial tidak holistik (menyeluruh), tidak berkelanjutan dan tidak berorientasi ke depan, karena masing-masing periode pemerintahan membawa visinya masing-masing. *Kedua*, hilangnya pernyataan kehendak rakyat yang berisikan haluan negara sebagai pedoman dalam memberikan arah bagi bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaannya. Oleh karenanya, MPR sebagai lembaga negara yang merepresentasikan kehendak seluruh rakyat dan sebagai perwujudan dari pelaksanaan sila ke-empat Pancasila yang mengedepankan prinsip demokrasi perwakilan, merupakan lembaga yang tepat diberikan kewenangan untuk membentuk GBHN. Meski kedaulatan tidak lagi dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR, bukan berarti MPR setelah perubahan UUD 1945 kehilangan semua kewenangan. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan melalui perubahan UUD 1945 masih merumuskan bahwa MPR sebagai perwujudan kedaulatan rakyat.

Pada akhirnya, secara ideal perlu dilakukan perubahan kembali terhadap UUD NRI Tahun 1945, sudah seharusnya bahwa reformulasi GBHN masuk ke dalam materi perubahan tersebut. Sebagai konsekuensi dari dianutnya prinsip demokrasi kerakyatan yang tertuang dalam Sila Keempat Pancasila maka sudah seharusnya kewenangan tersebut melekat pada MPR sebagai representasi rakyat Indonesia. Meskipun Presiden dipilih langsung oleh rakyat, penyusunan haluan negara (model GBHN) harus dilaksanakan oleh rakyat. □

Pokok-Pokok Haluan Negara Masih Terus Dikaji



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Amendemen terbatas UUD NRI Tahun 1945 terkait Pokok-Pokok Haluan Negara sedang dalam kajian mendalam di MPR. Dalam proses pendalaman kajian ini, Pimpinan MPR melibatkan masyarakat Indonesia sebagai implementasi dari musyawarah untuk mencapai mufakat.

WAKIL Ketua MPR Syarifuddin Hasan tidak kenal lelah mengunjungi kalangan perguruan tinggi di berbagai daerah. Pada awal Februari 2020 misalnya, Wakil Ketua MPR yang mengetuai bidang Badan Pengkajian ini langsung berbicara di depan sivitas akademika Universitas Mulawarman di Samarinda, Kalimantan Timur. Beberapa waktu sebelumnya, Syarif Hasan begitu dia biasa disapa, juga bertatap muka dengan kalangan perguruan tinggi di Kalimantan Tengah. Sedikitnya lebih dari enam perguruan tinggi telah disambangi politisi Partai Demokrat itu hingga akhir Februari lalu. Pertemuan dengan kalangan akademisi itu diberi tajuk “Silaturahmi dan Serap Aspirasi Amandemen UUD NRI Tahun 1945 Terkait GBHN”.

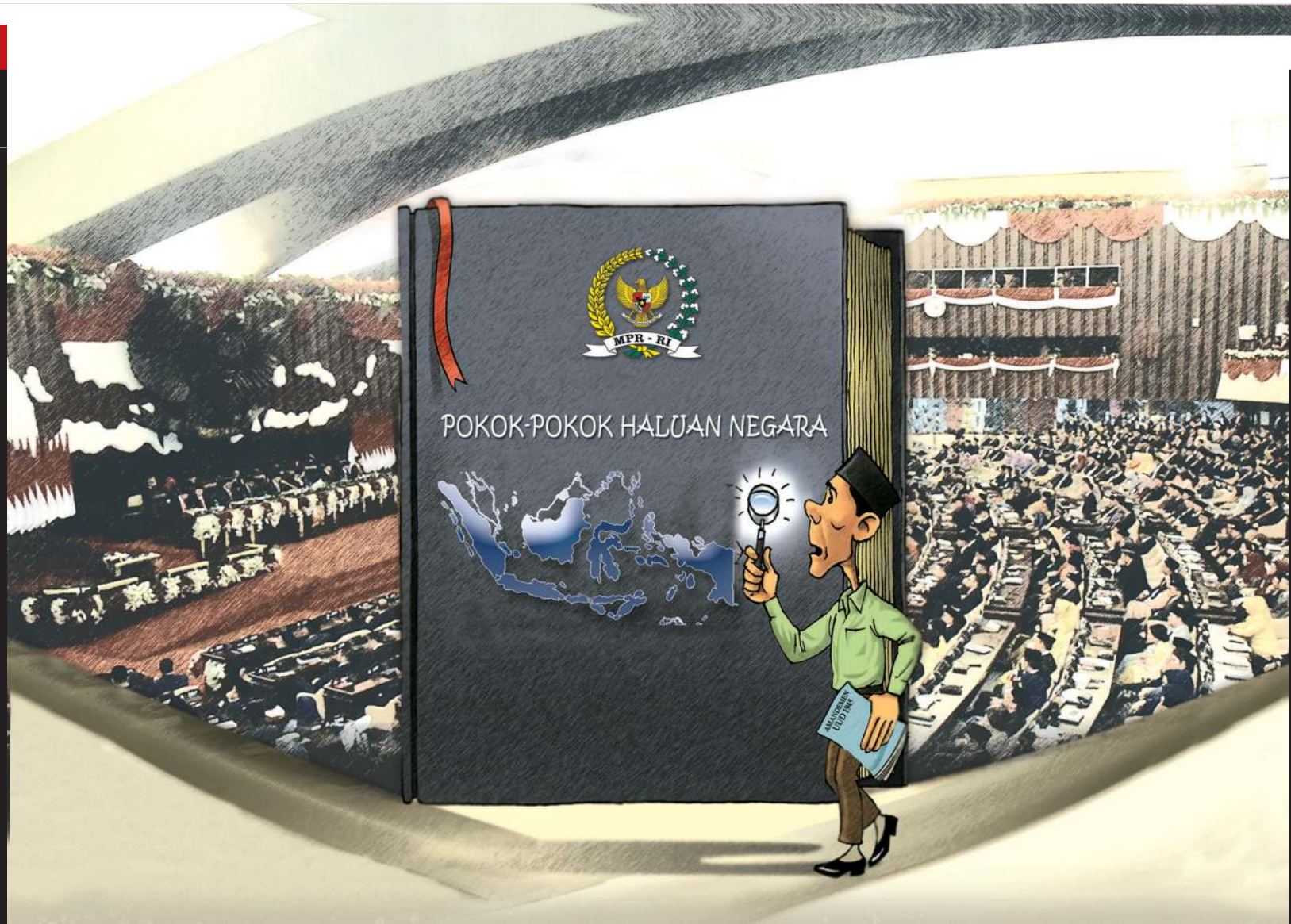
Bukan hanya dengan kalangan perguruan tinggi. Setiap kunjungan ke daerah, Syarif Hasan juga menyerap aspirasi dari kalangan Pemerintah Daerah. Syarif menilai, kalangan Pemda merupakan representasi dari rakyat. “Aparatur Pemda ini langsung bertemu dengan rakyat. Mereka juga yang mengetahui apa yang diinginkan rakyat. Karena itu saya menetapkan bertemu dengan aparatur Pemda,” sebutnya ketika bertemu aparatur Pemda Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) beberapa waktu lalu.

Serap aspirasi amendemen UUD NRI Tahun 1945 terkait GBHN itu untuk menjalankan amanah yang tertuang dalam rekomendasi dari MPR

Periode 2014 – 2019 kepada MPR Periode 2019 – 2024. Salah satu amanah itu adalah untuk melanjutkan kajian yang mendalam terhadap usulan masyarakat tentang GBHN, yaitu memasukkan Pokok Pokok Haluan Negara ke dalam UUD NRI Tahun 1945. Serap aspirasi kepada setiap elemen masyarakat, seperti akademisi, tokoh masyarakat, Ormas, Ormas keagamaan, masyarakat profesi, media massa, mahasiswa, dan lainnya adalah dalam rangka menjalankan amanah tersebut.

Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad juga mengungkapkan, wacana amendemen terbatas terkait Pokok-Pokok Haluan Negara merupakan rekomendasi MPR periode 2014 – 2019. “Ini sedang dalam kajian mendalam di MPR. Dalam proses pendalaman kajian ini Pimpinan MPR melibatkan masyarakat Indonesia sebagai implementasi dari musyawarah untuk mencapai mufakat. Untuk itulah Pimpinan MPR melakukan silaturahmi ke berbagai elemen masyarakat, seperti tokoh bangsa, pimpinan Parpol, pimpinan Ormas, pimpinan Ormas keagamaan, dan lainnya, untuk meminta masukan, saran, dan aspirasi,” paparnya kepada *Majelis*.

Dari berbagai saran dan aspirasi masyarakat itulah kemudian MPR melakukan kajian kembali. Sekarang prosesnya masih melakukan serap aspirasi ke masyarakat. Nanti hasilnya akan diramu di dalam MPR, yaitu di Badan Pengkajian MPR. “Kami, Pimpinan MPR, berharap dalam waktu



dekat kajian akan rampung dan bisa diketahui arah hasil kajian itu, apakah akan melakukan amandemen terbatas atau tidak. Tetapi tampaknya tidak dalam waktu dekat, karena masih ada perbedaan pendapat soal ini,” katanya.

Namun, tentu saja, amandemen UUD terkait GBHN atau sekarang disebut Pokok-Pokok Haluan Negara akan mempunyai implikasi terhadap kedudukan dan kewenangan MPR. Apakah dengan dimasukkannya Pokok-Pokok Haluan Negara dalam konstitusi, misalnya, membuat kedudukan dan kewenangan MPR kembali sebagai lembaga tertinggi negara. Apakah MPR mendapat kewenangan untuk membuat Ketetapan (Tap) MPR yang sifatnya mengatur? Lalu, apakah Presiden menjadi pelaksana Pokok-Pokok Haluan Negara? Bagaimana jika dianggap gagal, apakah Presiden bertanggungjawab kepada MPR?

Memang ada kekhawatiran, jika amandemen UUD NRI Tahun 1945 dilakukan tanpa persiapan yang matang bisa menjadi bola



Aboebakar Al Habsy

liar. Karena itu, amandemen UUD perlu dilakukan secara terbatas, hanya menyangkut soal Pokok-Pokok Haluan Negara dan kewenangan MPR. Namun, selain amandemen UUD, ada cara lain yang bisa ditempuh untuk menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara, yaitu melalui Undang-Undang. Jika

UU menjadi pilihan maka pemerintah atau DPR cukup menyampaikan usul inisiatif tentang Pokok-Pokok Haluan Negara atau UU Pokok-Pokok Haluan Negara.

Pada masa lalu (Orde Baru), MPR menjadi lembaga tertinggi negara dengan kewenangan yang tinggi melalui produk hukum MPR, berupa Ketetapan MPR. Materi dan muatan Ketetapan MPR pun tidak terbatas. Namun, setelah amandemen UUD 1945, kewenangan MPR berkurang. Salah satunya adalah MPR tidak lagi berwenang untuk mengeluarkan Ketetapan MPR tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara. MPR pun tidak lagi diberikan kewenangan untuk mengeluarkan Ketetapan MPR yang isinya bersifat mengatur ke luar. Setelah amandemen UUD, kewenangan MPR sifatnya *beschikking*, kecuali mengubah dan menetapkan UUD.

Kewenangan MPR

Anggota MPR dari Fraksi PKS Aboebakar Al Habsy juga mengakui bahwa pembahasan tentang Pokok-Pokok Haluan Negara

masih dalam tahap pembicaraan informal, khususnya terkait dengan amandemen UUD untuk memasukkan Pokok-Pokok Haluan Negara. “Yang kita bicarakan adalah apakah produk hukum dari Pokok-Pokok Haluan Negara itu dalam bentuk Ketetapan MPR atau bentuk lainnya. Ini akan membuat diskusi semakin panjang, karena bakal menyentuh kelembagaan MPR, misalnya apakah MPR kembali menjadi lembaga tertinggi negara atau Presiden kembali menjadi mandataris MPR. Kajian ini tidak sederhana karena memiliki implikasi ketatanegaraan yang substantif dan mendasar,” katanya kepada *Majelis*.

Aboebakar mengungkapkan hasil survei yang dilakukan Indobarometer tentang Pokok-Pokok Haluan Negara pada Januari

lembaga yang mengesahkan Pokok-Pokok Haluan Negara. Maka, lembaga itu kedudukannya harus lebih tinggi dibanding pelaksana Pokok-Pokok Haluan Negara. Lembaga yang mungkin untuk melakukan pengesahan hanya MPR RI.

Jika MPR hanya sebagai lembaga yang mengesahkan Pokok-Pokok Haluan Negara, namun tidak menjadikan Presiden sebagai mandataris MPR, maka atas dasar apa Presiden harus melaksanakan Pokok-Pokok Haluan Negara? Dalam sistem sekarang ini Presiden bukan mandataris MPR dan tidak memiliki kewajiban sebagai mandataris MPR, karena presiden dipilih langsung oleh rakyat.

“Karena itu, cara yang paling sederhana adalah seperti yang diusulkan oleh Fraksi PKS MPR. Yaitu, pengaturan Pokok-Pokok

mudah. Sesuai Pasal 37 UUD NRI Tahun 1945, perubahan UUD harus diusulkan 1/3 dari 711 anggota MPR. Pengambilan keputusan untuk amandemen UUD harus dihadiri sebanyak 2/3 anggota MPR dan keputusan harus disetujui 50% plus 1 anggota MPR.

“Sejauh ini masih sangat sulit melakukan amandemen konstitusi. Jangankan mengenai soal jabatan presiden, untuk Pokok-Pokok Haluan Negara saja masih belum ada kesepakatan di antara fraksi-fraksi di MPR. Rapat pembahasan terakhir soal ini juga tidak ada keputusan apapun, kecuali tujuh fraksi termasuk kelompok DPD menghendaki Pokok-Pokok Haluan Negara diatur dalam Ketetapan MPR,” katanya kepada *Majelis*.

Menurut Riza Patria, kedudukan Ketetapan (Tap) MPR dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan tidak mengalami perubahan. Kedudukan Ketetapan MPR dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan berada satu tingkat di bawah UUD NRI Tahun 1945 dan satu tingkat di atas Undang-Undang/Perppu. Kedudukan ini menimbulkan perdebatan karena kewenangan MPR yang berubah seiring dengan perubahan UUD 1945. Kewenangan yang berubah sebenarnya memengaruhi kedudukan produk hukum MPR.

Karena itu, Riza Patria mengusulkan bukan dalam bentuk Ketetapan MPR melainkan Peraturan Negara. Konsekuensinya, Peraturan Negara dapat dilakukan pengujian (review). Pengujian Peraturan Negara bisa dilakukan oleh MPR sendiri. Ini berbeda dengan judicial review terhadap UU yang kedudukannya di bawah Peraturan Negara. Judicial review dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Apakah MPR bisa menjadi lembaga tertinggi? Ahmad Riza Patria berpendapat, berdasarkan perubahan UUD 1945: *Pertama*, kedudukan MPR menjadi sejajar dengan lembaga negara lainnya. *Kedua*, mempertahankan kedudukan lembaga-lembaga negara yang lama (Presiden, DPR, BPK, MA). *Ketiga*, menambah lembaga-lembaga negara baru yang berdasarkan rumpun kekuasaan legislatif (DPD) dan rumpun kekuasaan yudikatif (Mahkamah Konstitusi). Masih menganut Trias Politika, konsep pemisahan kekuasaan tidak memisahkan lembaga yang satu dengan yang lain, melainkan melalui mekanisme checks and balances.



Ahmad Riza Patria

2020 lalu. Sebanyak 55,1% responden berpendapat, Indonesia memerlukan Pokok-Pokok Haluan Negara untuk pembangunan. Namun, mayoritas responden tidak sepakat dengan amandemen kelima UUD NRI Tahun 1945. Sebanyak 62% menilai belum perlu dilakukan amandemen UUD. “Artinya, hasil survei tersebut sama seperti sikap Fraksi PKS MPR bahwa Pokok-Pokok Haluan Negara memang diperlukan, namun tidak harus dengan amandemen UUD NRI Tahun 1945,” ujarnya.

Persoalannya, lanjut Aboebakar, jika dilakukan amandemen UUD maka bakal berdampak pada pola ketatanegaraan lainnya. Sebab, semua ada dalam satu paket sistem. Misalnya, dengan adanya Pokok-Pokok Haluan Negara maka harus ada

Haluan Negara dimungkinkan melalui UU. Sehingga tidak perlu menata lagi kewenangan MPR. Artinya, tidak perlu melakukan amandemen UUD NRI Tahun 1945,” tegas Aboebakar.

Ketua Fraksi Partai Gerindra MPR Ahmad Riza Patria juga mengakui, saat ini masih ada perbedaan pendapat tentang pembahasan Pokok-Pokok Haluan Negara. Sebanyak tujuh fraksi menyatakan produk hukum Pokok-Pokok Haluan Negara melalui Ketetapan MPR, sedang tiga fraksi menyatakan cukup diatur melalui Undang-Undang. Intinya, belum ada kesepakatan di antara fraksi-fraksi di MPR mengenai produk hukum Pokok-Pokok Haluan Negara.

Untuk melakukan amandemen atau perubahan UUD pun sebenarnya memang tidak

“Usulan mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara merupakan kemunduran dari sistem demokrasi di Tanah Air. Di samping itu, hal itu akan melemahkan sistem check and balances antar lembaga negara. Padahal, untuk menjamin demokrasi berjalan baik, seluruh lembaga negara harus ada sistem check and balances. Jika sistem check and balances tidak terpenuhi maka salah satu lembaga negara berpotensi tumbuh secara otoriter. Ini harus dihindari,” terangnya.

Ahmad Riza Patria menjelaskan lebih lanjut, perubahan UUD 1945 telah melahirkan perubahan yang mendasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia seperti perubahan yang bersifat peralihan kekuasaan, perubahan yang bersifat penegasan pembatasan kekuasaan, dan perubahan yang bersifat pengembangan kekuasaan, perubahan mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan lembaga negara. Secara a contrario, MPR masih menjalankan kedaulatan rakyat sekalipun kewenangannya sudah dikurangi.

“MPR tetap merupakan rumah penjelmaan seluruh rakyat yang strukturnya dikembangkan dalam dua kamar, yaitu DPR dan DPD. Maksudnya, seluruh aspirasi rakyat benar-benar dijemlakan ke dalam MPR yang terdiri dari dua pintu itu,” katanya.

Dalam UUD NRI Tahun 1945, rakyat masih memberi kewenangan kepada MPR seperti mengubah dan menetapkan konstitusi, melantik Presiden dan Wakil Presiden, melakukan impeachment, dan menyelenggarakan sidang sedikitnya sekali dalam



Fadel Muhammad

lima tahun. Karena itu, meski kedaulatan tidak lagi dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR, bukan berarti MPR setelah perubahan UUD 1945 kehilangan semua kewenangan. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan melalui perubahan UUD 1945 masih sepakat memberikan beberapa kewenangan kepada MPR.

Agak berbeda, anggota MPR dari Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay menegaskan bahwa pembahasan dan kajian mendalam tentang Pokok-Pokok Haluan Negara memang belum tuntas. Malah, Saleh Daulay justru berpendapat, sebenarnya Pokok-Pokok Haluan Negara itu sudah tidak diperlukan karena Indonesia memiliki UU RPJP (Rancangan Pembangunan Jangka Panjang) dan UU RPJM (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah). RPJP dan RPJM untuk 25 tahunan. UU itu dibuat untuk menentukan arah pembangunan Indonesia ke depan. “Sehingga UU ini bisa disempurnakan dan diperbarui begitu sebuah rezim selesai, karena haluan atau arah pembangunan bisa berganti,” katanya kepada *Majelis*.

Bagi Saleh Daulay, amandemen UUD tidak bisa dibatasi spesifik. Amandemen sifatnya terbuka. “Karena itu harus ada pembicaraan dulu lintas fraksi atau partai sehingga mengunci amandemen UUD agar tidak melebar. Bagi Fraksi PAN, tidak ada istilah amandemen terbatas,” katanya.

Menurut Saleh Daulay, perlu lebih dulu dilihat dari substansi amandemen itu. Dalam hal ini bukan ruh atau marwah MPR yang diperkuat, melainkan sistem presidensialnya. Penataan kewenangan MPR bukan dalam arti mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi. Justru jika MPR menjadi lembaga tertinggi maka akan mengganggu supremasi

presidensial. “Ketika melaporkan evaluasi kinerja pemerintah bukan hanya sekadar pidato seremoni, tetapi harus ada laporan pertanggungjawaban yang jelas di MPR. Semua lembaga pemerintah termasuk Presiden dan para menteri membuat laporan,” ujarnya.

Kembali kepada kemungkinan MPR menjadi lembaga tertinggi, Fadel Muhammad dengan tegas menyatakan tidak setuju jika kedudukan MPR dikembalikan seperti dulu, yaitu sebagai lembaga tertinggi negara dengan kewenangan memberi mandat kepada presiden. “Kalau MPR seperti itu, saya pribadi tidak setuju. Biarlah sistem pemilihan langsung oleh rakyat. Biarlah seperti itu. Presiden dipilih langsung oleh rakyat,” tuturnya.

Karena itu, Fadel lebih setuju dengan kedudukan MPR seperti sekarang ini, yaitu lembaga negara yang memiliki kewenangan tertinggi. “Kita setuju dan memang seperti itu sekarang ini. Kita masih mencari formula penataan kewenangan MPR. Intinya, seperti sudah saya sebutkan, demokrasi kita terbilang masih muda. Kita lihat saja dulu perjalanan demokrasi kita. Jika memang ke depan memerlukan evaluasi, tentu kita akan mengadakan evaluasi,” katanya.

“Kita lihat saja nanti dari aspirasi masyarakat dan hasil pembahasan dari kajian di MPR. Apakah perlu amandemen UUD untuk menghidupkan kembali Pokok-Pokok Haluan Negara, dan bagaimana kedudukan MPR apakah menjadi lembaga tertinggi negara atau tetap seperti sekarang ini. Apapun keputusan yang akan kita ambil nanti semua adalah demi kebaikan bangsa, negara, dan rakyat,” imbuhnya. □

DER/EFP/BSC



Saleh Partaonan Daulay

Menata MPR Sesuai Semangat Pendiri Bangsa

Kelembagaan MPR perlu penataan agar selaras dengan semangat para pendiri bangsa ketika menggagas keberadaan lembaga MPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.



MAJELIS Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah melakukan kajian tentang penataan kewenangan MPR sejak periode 2014 – 2019. Kajian dilaksanakan dengan berbagai metode dan kelompok sasaran. Kajian dilakukan baik secara teoritis, praksis, yuridis, maupun politis. Namun MPR masa jabatan 2014 – 2019 belum dapat melakukan penataan sistem ketatanegaraan sesuai amanat dari rekomendasi yang tertuang dalam Keputusan MPR Nomor 4/MPR/2014. Malah kemudian MPR Periode 2014 – 2019 merekomendasikan kepada MPR masa jabatan 2019 – 2024 untuk melanjutkan kajian lebih mendalam, terutama mengenai penataan kewenangan MPR.

Untuk itu Badan Pengkajian MPR periode 2019 – 2024 melanjutkan pengkajian dan penyerapan aspirasi terkait penataan wewenang lembaga-lembaga Negara, terutama lembaga negara yang wewenang dan tugasnya diberikan langsung oleh UUD NRI Tahun 1945. Pimpinan Badan Pengkajian MPR terus bertemu dengan para pakar, akademisi, para penyelenggara negara,

praktisi, tokoh masyarakat dan mahasiswa.

Badan Pengkajian MPR memerlukan berbagai informasi, penelitian, data, dan literatur yang komprehensif dan terbaru sehingga apa yang menjadi fokus dalam isu tentang penataan kewenangan MPR dapat digali secara tuntas dan bisa diterima semua pihak. Secara umum masih terdapat perbedaan pendapat mengenai apakah perlu dilakukan penataan kewenangan MPR atau apakah kewenangan MPR sudah tepat seperti saat ini.

Pemikiran penataan kewenangan MPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia meliputi beberapa hal, antara lain: Pokok-Pokok Haluan Negara, kedudukan MPR, kewenangan MPR membuat Ketetapan MPR, dan Ketetapan MPR tentang Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian MPR sebagai penafsir konstitusi, kewenangan MPR menyelenggarakan Sidang Tahunan MPR, dan penyelenggaraan Sidang Paripurna MPR dalam rangka melaksanakan wewenang dan tugas. Selanjutnya meninjau dan mengevaluasi Ketetapan MPR RI Nomor 1/MPR/2003 tentang Peninjauan Materi dan

Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR dari tahun 1960 sampai dengan tahun 2002.

Mengapa perlu penataan kewenangan MPR? Perubahan UUD 1945 telah menyebabkan terjadinya pergeseran sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satunya lembaga negara yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 kedudukannya sejajar. MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi Negara, tetapi lembaga negara yang sejajar atau sederajat dengan lembaga-lembaga negara lainnya. MPR juga tidak lagi melaksanakan kedaulatan rakyat dan kewenangan MPR pun sangat terbatas.

Perubahan lembaga MPR juga terjadi pada keanggotaannya. Jika sebelum UUD 1945 diamandemen, anggota MPR terdiri dari anggota DPR ditambah utusan daerah dan utusan golongan. Komposisi ini dimaksudkan agar seluruh rakyat, seluruh golongan, dan seluruh daerah mempunyai wakil dalam majelis sehingga MPR benar-benar dianggap sebagai penjelmaan rakyat.

Setelah UUD 1945 diamandemen, keanggotaan MPR berubah. Berdasarkan UUD

NRI Tahun 1945, anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. Tidak ada lagi anggota MPR yang berasal dari utusan golongan. Keanggotaan MPR saat ini belum mewakili seluruh elemen masyarakat. Sebab, meskipun anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD, tapi dalam kenyataannya mereka yang mewakili daerah dengan menjadi anggota DPD sebagian dari mereka sebelumnya aktif di partai politik dan pernah menjadi anggota DPR. Masih terdapat golongan masyarakat yang belum terwakili di MPR. Golongan tersebut misalnya golongan masyarakat dari unsur keagamaan, kesatuan masyarakat hukum adat, dan masyarakat yang mempunyai aspirasi tertentu.

Selain keanggotaan yang berubah, cara

memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden, menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara, dan mengeluarkan Ketetapan MPR yang bersifat mengatur.

Maka telah terjadi perubahan fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yaitu dari sistem vertical hierarkhis dengan prinsip supremasi MPR menjadi sistem horizontal-fungsional dengan prinsip saling mengimbangi dan mengawasi antar lembaga negara. Menurut Pasal 3 UUD NRI Tahun 1945, kewenangan MPR adalah mengubah dan menetapkan UUD, melantik presiden dan/atau wakil presiden, memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD.

Berkaca dari sistem parlemen di negara-

karena Indonesia yang terdiri atas beberapa daerah, wakil-wakilnya tidak menurut banyaknya penduduk dalam daerah saja, melainkan pula dengan melihat keadaan daerah, maka diadakanlah wakil untuk mewakili daerah dalam permusyawaratan. Demikian pula dalam majelis duduk wakil-wakil golongan rakyat.”

Soepomo mempertegas pendapat Muhammad Yamin. Dalam Sidang BPUPKI pada 15 Juli 1945, Soepomo menyatakan: “Majelis Permusyawaratan Rakyat harus terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan. Seluruh rakyat, seluruh golongan, seluruh daerah akan mempunyai wakil dalam Majelis



Muhammad Yamin



Soepomo

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

MPR dalam mengambil keputusan juga berubah. MPR sebagai lembaga permusyawaratan seharusnya melakukan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dengan cara musyawarah saat ini mulai jarang terjadi pada lembaga MPR. Setiap keputusan dilakukan dengan cara voting atau pemungutan suara. Hal ini tidak sesuai dengan semangat sila keempat Pancasila, yaitu permusyawaratan/perwakilan.

Oleh karena itu perlu dilakukan rekonstruksi kelembagaan MPR agar selaras dengan semangat para pendiri bangsa ketika menggagas adanya lembaga MPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Kedudukan MPR menjadi lembaga negara yang sejajar dengan lembaga negara lain berimplikasi pada pengurangan kewenangan yang dimiliki MPR. Kewenangan MPR yang berkurang adalah MPR tidak lagi berwenang

negara lain, semestinya Indonesia tidak meniru sistem parlemen negara lain. Indonesia perlu menyusun sistem parlemen sendiri dengan ciri khas Indonesia. Karena itu ada beberapa alternatif. *Pertama*, agar keanggotaan MPR lebih representatif maka anggota MPR selain dari anggota DPR dan DPD perlu ditambahkan dari elemen masyarakat lain. Misalnya unsur utusan golongan dihidupkan lagi agar seluruh elemen masyarakat mempunyai wakil di MPR.

Penambahan unsur utusan golongan ini sesuai dengan semangat para pendiri bangsa ketika menyusun UUD. Dalam Sidang BPUPKI, 11 Juli 1945, Muhammad Yamin menyatakan bahwa “Majelis Permusyawaratan diduduki oleh wakil-wakil daerah dan wakil golongan atau rakyat Indonesia seluruhnya, yang dipilih dengan bebas dan merdeka oleh rakyat dengan suara terbanyak. Wakil-wakil daerah sangat perlu

Permusyawaratan Rakyat sehingga majelis itu akan betul-betul dapat dianggap sebagai penjelmaan rakyat yang memegang kedaulatan rakyat.”

Kedua, jika sistem parlemen Indonesia tetap dipertahankan, yaitu ada DPR, DPD, dan MPR maka yang perlu dilakukan adalah menyejajarkan kewenangan dan fungsi DPR dan DPD, serta memperkuat kewenangan MPR sebagai lembaga negara yang berdiri sendiri dan bersifat permanen.

Rekonstruksi lembaga MPR juga perlu dilakukan dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan dalam persidangan MPR. Musyawarah menjadi semangat para pendiri bangsa ketika membahas lembaga MPR. MPR merupakan lembaga permusyawaratan sehingga seharusnya setiap pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah. □

BSC (dari berbagai sumber)



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Fadel Muhammad Wakil Ketua MPR RI

Soal Haluan Negara dan Penataan Kewenangan MPR Masih Berproses

MPR Periode 2019 – 2024 sedang giat-giatnya melakukan silaturahmi kembangsaan dalam rangka serap aspirasi ke berbagai elemen masyarakat, baik Ormas, pakar, tokoh masyarakat, maupun kalangan akademisi, sehubungan dengan wacana amendemen UUD NRI Tahun 1945 terkait Pokok-Pokok Haluan Negara. Ini sesuai amanat rekomendasi dari MPR Periode 2014 – 2019 kepada MPR Periode 2019 – 2024 untuk melakukan kajian mendalam tentang reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional. Kajian Pokok-Pokok Haluan Negara itu pun akan menyentuh penataan kewenangan MPR, khususnya kewenangan MPR untuk mengeluarkan Ketetapan MPR.

Untuk mengetahui lebih jauh perkembangan pemikiran tentang Pokok-Pokok Haluan Negara dikaitkan dengan penataan lembaga MPR, Majelis mewawancarai Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad. Berikut petikan wawancara dengan Wakil Ketua MPR dari Kelompok DPD ini.

Sejauh ini bagaimana perkembangan kajian yang lebih mendalam tentang Pokok-Pokok Haluan Negara?

Ya, perkembangan wacana amendemen terbatas terkait Pokok-Pokok Haluan Negara yang merupakan rekomendasi MPR periode 2014 – 2019 sedang dalam kajian mendalam di MPR. Dalam proses pendalaman kajian ini Pimpinan MPR melibatkan masyarakat Indonesia sebagai implementasi dari musyawarah untuk mencapai mufakat. Untuk itulah Pimpinan MPR melakukan silaturahmi ke berbagai elemen masyarakat, seperti tokoh bangsa, pimpinan Parpol, pimpinan Ormas, pimpinan Ormas keagamaan, dan lainnya, untuk meminta masukan, saran, dan aspirasi.

Dari berbagai saran dan aspirasi masyarakat itulah kemudian MPR melakukan kajian kembali. Sekarang prosesnya masih melakukan serap aspirasi ke masyarakat. Nanti hasilnya akan diramu di dalam MPR, yaitu di Badan Pengkajian MPR. Kami, Pimpinan MPR, berharap dalam waktu dekat kajian akan

rampung dan bisa diketahui arah hasil kajian itu, apakah akan melakukan amendemen terbatas atau tidak. Tetapi tampaknya tidak dalam waktu dekat, karena masih ada perbedaan pendapat soal ini.

Dalam rekomendasi MPR Periode 2014 - 2019, masih ada 3 fraksi (Fraksi Partai Golkar, Demokrat, dan PKS) yang belum setuju dengan bentuk hukum Pokok-Pokok Haluan Negara berupa Ketetapan MPR. Mengapa pendekatan tidak difokuskan pada tiga fraksi itu saja agar terjadi kesepakatan?

Saya kira tidak bisa seperti itu. Kita di MPR mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Apalagi masalah amendemen ini sangat berdampak buat bangsa dan negara ini secara keseluruhan. Karena itu serap aspirasi masyarakat sangat diperlukan, karena kedaulatan ada di tangan rakyat. Jadi, seluruh rakyat tanpa kecuali memiliki hak yang sama dalam berpendapat, apalagi pendapat tentang konstitusi negara. Masyarakat juga ada yang setuju dan tidak

setuju soal amandemen. Itu adalah keberagaman pendapat. Perbedaan pendapat adalah hal yang biasa dalam negara demokrasi.

Salah satu bagian yang serius dikaji secara mendalam di MPR adalah soal bentuk hukum haluan negara itu. Intinya, keputusan yang akan diambil nanti komposisinya seimbang. Semua memiliki peran ketika keputusan itu sudah diambil. Keputusan ini sesuai dengan kebutuhan bangsa ke depan dan juga dengan sistem ketatanegaraan kita. Jadi, jangan balik ke belakang lagi. Seharusnya kita fokus lurus ke depan. Misalnya, kewenangan MPR untuk memilih presiden itu adalah sebuah kemunduran.

Jika ada kesepakatan Pokok-Pokok Haluan Negara dalam bentuk Ketetapan MPR, artinya akan ada amandemen UUD terbatas hanya soal Pokok-Pokok Haluan Negara. Lalu bagaimana posisi kelembagaan MPR? Apakah MPR mendapat tambahan kewenangan untuk membuat Pokok-Pokok Haluan Negara?

Begini, setelah serap aspirasi masyarakat dirasa sudah cukup dan kajian mendalam sudah dilakukan, kemudian keputusannya adalah perlu dilakukan amandemen terbatas UUD terkait haluan negara maka baru akan dibicarakan bagaimanakah kewenangan membuat haluan negara atau pihak mana yang akan menyusun haluan negara tersebut. Jadi, biarlah berproses dan jangan terburu-buru menafsirkan dan mengandaikan bahwa amandemen UUD tersebut akan berimbas kepada dikembalikannya kewenangan MPR seperti dulu.

Apakah akan ada perubahan ke-



lembagaan MPR? Posisi MPR di atas lembaga negara lainnya karena mengeluarkan Ketetapan MPR tentang Pokok-Pokok Haluan Negara?

Jika kedudukan MPR dikembalikan seperti dulu, yaitu sebagai lembaga tertinggi negara dengan kewenangan memberi mandat kepada presiden, saya pribadi tidak setuju. Biarlah sistem pemilihan langsung oleh rakyat. Biarlah seperti itu. Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Demikian juga anggota parlemen. Menurut saya, itu sudah baik mencerminkan kedaulatan rakyat. Kalau memang belum sempurna dalam perjalanannya, saya pikir demokrasi kita baru berjalan beberapa tahun. Biarlah kita melihat dulu prosesnya. Mungkin ke depan kita evaluasi lagi. Tentu saja dengan melibatkan seluruh rakyat Indonesia.

Bisakah MPR kembali menjadi lem-

bagi tertinggi Negara, namun bukan seperti MPR pada masa Orde Baru. Ini hanya untuk mengembalikan ruh dan marwah MPR sebagai lembaga tertinggi seperti sebelumnya?

Kalau MPR seperti itu saya setuju. Dan, sekarang MPR memang sudah seperti itu. MPR memiliki kewenangan tertinggi, seperti mengubah dan menetapkan UUD. Karena itu kita sekarang melakukan serap aspirasi ke masyarakat. Tujuannya untuk mendapatkan berbagai masukan yang bagus untuk MPR ke depan, bagaimana sistem ketatanegaraan kita yang mendekati ideal sesuai keinginan rakyat.

Apakah Bapak setuju dengan penataan kewenangan MPR?

Ya, kita setuju dan memang seperti itu sekarang ini (sedang mencari formula penataan kewenangan MPR). Intinya, seperti sudah saya sebutkan, demokrasi kita terbilang masih muda. Kita lihat saja dulu perjalanan demokrasi kita. Jika memang ke depan memerlukan evaluasi, tentu kita akan mengadakan evaluasi.

Menurut Bapak bagaimana seharusnya kewenangan MPR itu? Apakah perlu perubahan atau masih tetap seperti sekarang?

Kita lihat saja nanti dari aspirasi masyarakat dan hasil pembahasan dari kajian di MPR. Apakah perlu amandemen UUD untuk menghidupkan kembali Pokok-Pokok Haluan Negara, dan bagaimana kedudukan MPR apakah menjadi lembaga tertinggi negara atau tetap seperti sekarang ini. Apapun keputusan yang akan kita ambil nanti semua adalah demi kebaikan bangsa, negara, dan rakyat. □



Pergantian Antar Waktu

Bambang Soesatyo MPR Memiliki **Kewenangan** Mulia



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Pada saat melantik Anggota MPR PAW, Ketua MPR Bambang Soesatyo mengingatkan penting memahami MPR sebagai lembaga kedaulatan rakyat dan wadah aspirasi besar rakyat Indonesia.

MAJELIS Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menggelar acara Pengucapan Sumpah/Janji untuk dua anggota MPR Pergantian Antar Waktu (PAW), yaitu: Renny Astuti dari Fraksi Gerindra dari daerah pemilihan Sumatera Selatan I menggantikan Edhy Prabowo yang ditunjuk menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan, dan Muhammad Ali Ridha dari Fraksi Golongan Karya dari dapil Jawa Timur XI menggantikan H. Zainudin Amali yang mengundurkan diri.

Acara sumpah/janji akan menjabat sebagai anggota MPR RI untuk masa bakti 2019-2024 dipandu oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, didampingi tiga Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Jazilul Fawaid, dan Lestari Moerdijat. Acara berlangsung di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara IV, Kompleks MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta, Rabu (29/1/2020).

Dalam sambutannya, Ketua MPR Bamsuet mengingatkan kedua anggota MPR baru tersebut menjelaskan tentang lembaga MPR RI serta tugas-tugas dan kewenangannya. Lembaga MPR adalah sebuah lembaga negara, lembaga demokrasi dan lembaga permusyawaratan yang menjalankan mandat rakyat berdasarkan konstitusi. Salah satu kewenangan mulianya, kata Bamsuet, adalah mengubah dan menetapkan UUD.

“Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan mulia tersebut, MPR harus mampu menjelma sebagai lembaga yang sanggup merespon

dan menyediakan saluran aspirasi besar rakyat, sehingga seluruh kehendak rakyat Indonesia dapat diwujudkan dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara,” katanya.

Salah satu saluran aspirasi besar rakyat yang berhasil dihimpun oleh Pimpinan MPR, tambah Bamsuet, adalah munculnya gagasan untuk menghadirkan kembali sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN sebagai pedoman dalam penyelenggaraan negara.

Wacana tentang pentingnya menghadirkan kembali sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN sebagai pedoman dalam penyelenggaraan negara, menurut Bamsuet, menjadi sangat penting. Sebab, sejak dihapuskannya kewenangan MPR untuk menetapkan GBHN maka sistem pembangunan nasional tidak berlandaskan kepada Ketetapan MPR tentang GBHN, tetapi berlandaskan pada UU tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), UU tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), dan Perpres tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang disusun berdasarkan visi dan misi calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

“Dengan model perencanaan pembangunan nasional model demikian memungkinkan RPJMN dilaksanakan secara tidak konsisten. Sebab sistem tersebut hanya berdasarkan visi dan misi Presiden



dan Wakil Presiden terpilih dalam setiap pemilihan umum, yang dalam setiap periode pemerintahannya bisa memiliki perbedaan dalam visi dan misi. Inkonsistensi dan ketidakselarasan sistem pembangunan nasional juga bisa terjadi di daerah-daerah, sebab adanya perbedaan visi misi antara pusat dan daerah,” jelasnya.

Inkonsistensi arah dan kebijakan nasional antara pusat dan daerah, lanjut Bamsuet, akan berpotensi menghasilkan program-program pembangunan yang tidak saling mendukung. Inkonsistensi tersebut juga akan berakibat inefisiensi penggunaan sumber daya pembangunan.

“Dalam kerangka itulah, MPR masa jabatan 2014-2019 telah menetapkan rekomendasi yang dituangkan dalam Keputusan MPR No. 8 Tahun 2019. Salah satu rekomendasi penting yang perlu ditindaklanjuti oleh MPR periode 2019-2024 adalah melakukan pengkajian lebih mendalam mengenai substansi dan bentuk hukum Pokok-Pokok Haluan Negara, termasuk mengupayakan

untuk ditetapkan melalui Ketetapan MPR dengan catatan tetap membuka peluang untuk diatur melalui UU,” ujar Ketua DPR RI periode 2014-2019 ini.

Tugas MPR lainnya yang sangat penting, tambah Bamsuet, adalah melakukan Sosialisasi Empat Pilar MPR, yakni Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Khusus mengenai pemasyarakatan Pancasila, MPR perlu terus menumbuhkan keyakinan tentang kebenaran Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara yang menginspirasi seluruh pengaturan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

“Bangsa Indonesia harus bangga memiliki Pancasila sebagai ideologi yang bisa mengikat bangsa kita yang sedemikian besar dan sangat majemuk. Pancasila adalah konsensus nasional yang dapat diterima semua paham, golongan, dan kelompok masyarakat di Indonesia. Pancasila juga merupakan dasar negara yang mempersatukan bangsa, sekaligus menjadi bintang penuntun yang dinamis,

mengarahkan bangsa kita mencapai tujuannya,” terangnya.

Dalam kesempatan itu, Bamsuet mengajak anggota MPR yang baru untuk terus menggalai metode- metode pemasyarakatan Pancasila yang tepat, mengingat Pancasila sebagai sistem nilai bukan sekedar untuk dihafal dan dimengerti saja, tapi juga harus diterima, dihayati, dan juga dipraktikkan sebagai kebiasaan. Bahkan, harus menjelma menjadi sebuah sifat yang menetap di dalam diri manusia Indonesia.

“Saya berharap, saudara sebagai anggota MPR RI yang baru dilantik dapat menjalankan amanah dengan sebaik mungkin. Saya juga berharap semua anggota MPR mampu menjalankan tugas dan kewenangan konstitusional Majelis dengan sebaik-baiknya, dan penuh tanggung jawab. Sehingga, apapun yang kita ikhtirakan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara tercinta,” tandasnya. □

DER

Delegasi Forum Parlemen Muslimin se-Dunia

Ajak Tetap Semangat Memperjuangkan Demokrasi dan Demokratisasi

Forum Parlemen Muslimin se-Dunia mengajak agar tetap bersemangat memperjuangkan demokrasi dan demokratisasi, dan berjuang melalui parlemen.



Hidayat Nur Wahid



Abdul Majid Munasharah

WAKIL Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menerima kunjungan delegasi The International Islamic Forum of Parliamentarians atau Forum Parlemen Muslimin se-Dunia. Dalam pertemuan, Hidayat Nur Wahid didampingi beberapa anggota MPR, sedangkan delegasi The Internasional Islamic Forum of Parliamentarians ini dipimpin oleh Ketua Dr. Abdul Majid Munasharah dari

Aljazair.

Forum Parlemen Muslimin se-Dunia ini selama empat hari berada di Indonesia. Forum beranggotakan anggota parlemen muslim dari beberapa negara mengadakan beberapa kegiatan, di antaranya seminar dan mengunjungi beberapa tempat.

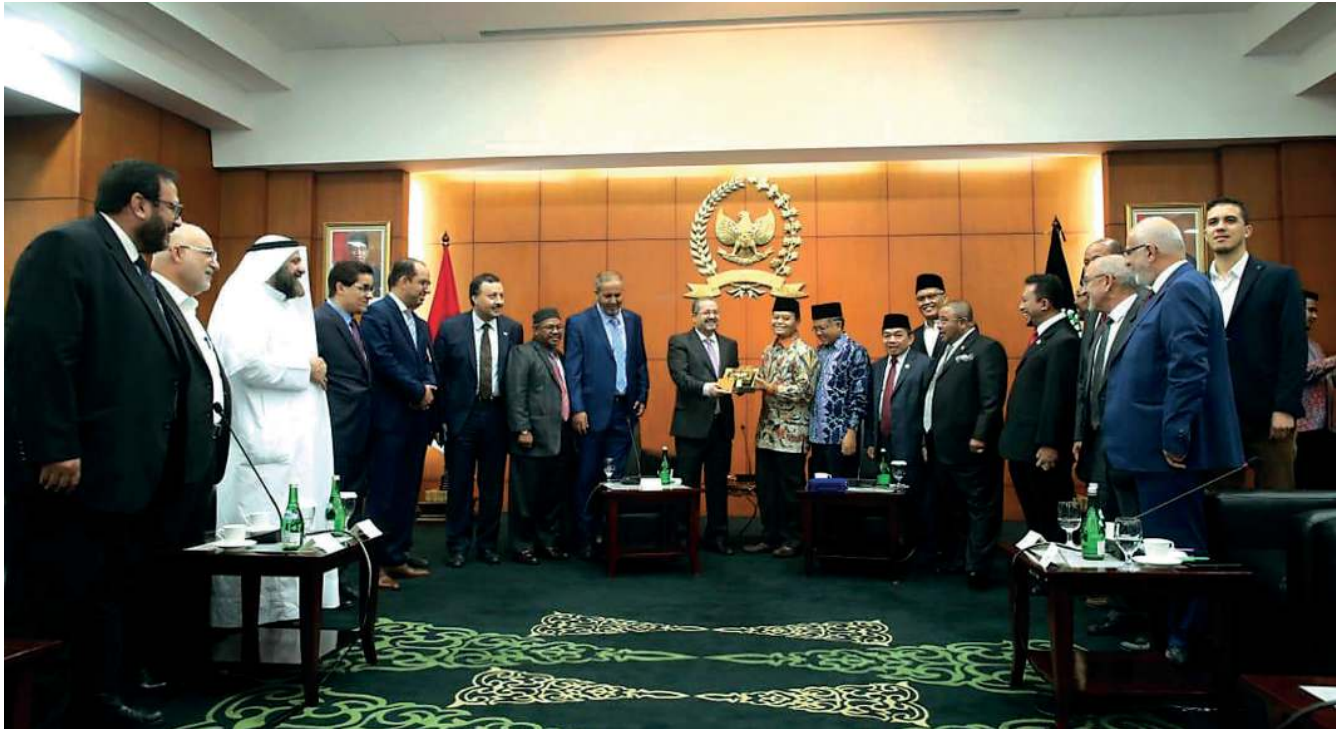
“Mereka akan mengadakan beberapa kegiatan di Indonesia. Selain berkunjung ke

MPR, mereka juga mengadakan kegiatan-kegiatan untuk memperkenalkan organisasi ini, tidak hanya kepada masyarakat Indonesia tetapi juga kepada masyarakat dunia dengan berbagai kegiatan,” kata Hidayat Nur Wahid usai pertemuan yang berlangsung di Ruang Delegasi, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/02/2020).

Hidayat mengungkapkan, Parlemen



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI



Muslimin se-Dunia mengajak agar tetap bersemangat memperjuangkan demokrasi dan demokratisasi, berjuang melalui parlemen, dan meningkatkan kualitas pembelaan terhadap kemanusiaan dan masyarakat tertindas, seperti masyarakat Palestina, Rohingya, dan lain-lain.

“Mereka menegaskan bahwa perjuangan melalui parlemen perlu kerjasama, penyebarluasan, dan penguatan. Sebab, melalui demokrasi dan parlemen banyak hal yang bisa dilakukan untuk kepentingan kemanusiaan. Dalam konteks Islam, ini membuktikan bahwa Islam itu memang rahmatan lil alamin, tidak anti demokrasi, dan membawa kebaikan. Tentu kita menyambut dengan baik ajakan itu,” ujar Hidayat.

Dalam pertemuan itu, Hidayat juga menyampaikan pengalaman partai Islam di Indonesia dalam berdemokrasi. “Saya menyampaikan partai Islam, dalam hal ini PKS, bersama komponen partai politik yang lain bisa mengusulkan agar ada UU tentang Kewirausahaan Nasional. Ini menegaskan bahwa partai Islam juga memikirkan tentang ekonomi bangsa. Kita juga mengusulkan UU tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Perlindungan Simbol-simbol Agama. Artinya, partai Islam tidak hanya berpikir tentang ulama, tapi juga tokoh agama dalam arti



luas,” jelasnya.

Kepada delegasi Forum Parlemen Muslimin, Hidayat juga menjelaskan bahwa MPR telah melakukan amandemen UUD untuk menghadirkan kemaslahatan. Misalnya, ketentuan tentang pendidikan nasional yang tidak hanya mengutamakan kecerdasan tetapi juga iman, takwa, dan akhlak mulia. “Ini menegaskan parlemen bisa menghadirkan kemaslahatan, bukan hanya bagi umat Islam tapi juga bagi bangsa,” sebutnya.

Usai pertemuan, Ketua Forum Parlemen

Muslimin se-Dunia, Dr. Abdul Madjid Muna-sarah, menyebutkan, dengan forum ini bisa saling tukar pengalaman dan saling belajar tentang UU di negara masing-masing. Dia juga memuji demokrasi di Indonesia.

“Demokrasi di Indonesia berkembang pesat. Kami banyak belajar dari demokrasi di Indonesia. Keberadaan kami beberapa hari ini menjadi bukti bahwa demokrasi di Indonesia memang luar biasa bagus. Saling menghormati meski ada perbedaan dan keragaman,”ujarnya. □

BSC

Kunjungan ke Media Group

Bamsoet: Semua Sepakat Perlunya Pokok-Pokok Haluan Negara

Jadi atau tidaknya amandemen terbatas UUD NRI Tahun 1945 harus diputuskan oleh MPR RI periode 2019-2024.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI Bambang Soesatyo mengungkapkan, sejak periode 2004-2009, dilanjutkan 2009-2014, kemudian 2014-2019, MPR RI seperti berada di persimpangan jalan. Lantaran ketidakjelasan rencana perubahan terbatas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai road pembangunan bangsa. Karena itu, MPR RI 2019-2024 bertekad mengakhiri persimpangan itu dengan mengambil jalan yang pasti.

“Apakah UUD NRI Tahun 1945 jadi mengalami perubahan terbatas atau tidak, harus diputuskan oleh MPR RI periode 2019-2024. Karena itu, MPR RI terus melakukan silaturahmi kebangsaan ke berbagai organisasi masyarakat, tokoh bangsa, hingga partai politik untuk menyerap aspirasi. Khususnya dari media massa, sebagai pilar ke-4 demokrasi, sekaligus corong yang mampu menangkap kegelisahan dan suasana kebatinan rakyat,” ujar Bamsoet saat melakukan media visit ke Media Group News, di Kedoya, Jakarta, Selasa (11/2/20).

Turut hadir para Wakil Ketua MPR RI, antara lain: Ahmad Basarah (F-PDI Perjuangan), Lestari Moerdijat (F-Nasdem),

Jazilul Fawaid (F-PKB), Hidayat Nur Wahid (F-PKS), dan Fadel Muhammad (Kelompok DPD).

Sedangkan jajaran Media Group News yang hadir, antara lain CEO Media Group News Mirdal Akib, Direktur Utama Metro TV Don Bosco Selamun, Direktur Pemberitaan Metro TV Arief Suditomo, Direktur Utama Media Indonesia Firdaus Dayat, Direktur Pemberitaan Media Indonesia Usman Kasong, CEO Medcom.id Kania Sutisnawinata, dan Direksi Medcom.id

Abdul Kohar.

Kepala Badan Bela Negara FKPPi ini menjelaskan, sejauh ini dari berbagai aspirasi yang ditangkap MPR RI, ada enam kelompok pandangan. *Pertama*, pandangan yang menghendaki kembali ke UUD 1945 yang asli, sesuai Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Menurut pandangan ini, perubahan UUD 1945 yang dilakukan sejak 1999 sampai 2002 telah jauh menyimpang dari semangat para pendiri bangsa, sehingga menimbulkan berbagai persoalan ketatanegaraan.





Kedua, pandangan yang menginginkan kembali ke UUD 1945 yang asli, kemudian menyempurnakannya melalui adendum, sehingga naskah asli UUD 1945 sebagai spirit perjuangan yang dirumuskan pendiri bangsa tidak hilang. *Ketiga*, pandangan yang menghendaki penyempurnaan secara menyeluruh terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang telah empat kali dilakukan perubahan. Menurut pandangan ini, terdapat inkonsistensi dan inkoherensi antara Pancasila dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 di satu sisi, dengan pasal-pasal yang terdapat di dalam UUD NRI Tahun 1945 pada sisi lainnya.

Berikutnya, *keempat*, pandangan yang menginginkan penyempurnaan terhadap UUD NRI Tahun 1945,” papar Bamsoet. *Kelima*, pandangan yang menghendaki perubahan terbatas UUD NRI Tahun 1945, yaitu menghadirkan wewenang MPR untuk menetapkan PPHN. “Hanya itu, dan tidak boleh menyentuh pasal-pasal lainnya,” ujar Bamsoet. Sedangkan yang terakhir, *keenam*, pandangan yang menilai bahwa sistem ketatanegaraan kita pada saat ini sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Persoalan yang muncul bukan pada UUD NRI Tahun 1945, tetapi pada implementasi peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan amanat konstitusi.



“Dari keenam pandangan tersebut ada satu kesamaan yang bisa ditarik sebagai titik temu. Semua pandangan menginginkan adanya PPHN sebagai road map pembangunan bangsa. Ketiadaan PPHN pasca bergulirnya reformasi, membuat bangsa ini seperti perahu besar yang mengarungi samudera tanpa kompas sebagai petunjuk arah. Terombang-ambing tak tentu mau kemana,” tandas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum SOKSI ini lebih lanjut menerangkan, MPR RI tak bisa berjalan sendiri dalam memilih jalan yang pasti untuk keluar dari persimpangan jalan. Butuh dukungan pers agar kajian menghadirkan PPHN bisa komprehensif, sekaligus sebagai

jembatan komunikasi antara MPR RI dengan rakyat.

“Memiliki Metro TV sebagai chanel berita pertama di televisi, serta Media Indonesia sebagai surat kabar harian yang sudah berusia 50 tahun, Media News Group punya kekuatan besar menyuarakan sekaligus menggali kebatinan suara publik. Pengalaman, pemikiran, dan sepak terjang Media News Group sangat dibutuhkan MPR RI untuk menjangkau aspirasi publik. Sehingga jadi atau tidaknya MPR RI melakukan perubahan terbatas UUD NRI Tahun 1945 untuk menghadirkan PPHN, semuanya atas keinginan publik,” pungkas Bamsoet. □

BSC

Serap Aspirasi ke Kalimantan Timur

Perlu Kajian Mendalam Untuk Amandemen UUD NRI Tahun 1945

Untuk melakukan amandemen UUD NRI Tahun 1945 perlu konsensus nasional lebih dulu. Selain itu perlu kajian mendalam tentang untung dan rugi adanya haluan negara (Garis-Garis Besar Haluan Negara).



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR Syarifuddin Hasan mengadakan silaturahmi dan serap aspirasi di Provinsi Kalimantan Timur pada 5-7 Februari 2020. Di Provinsi Kalimantan Timur, Syarif Hasan bersilaturahmi dan serap aspirasi “Amandemen UUD NRI Tahun 1945 Terkait GBHN” di Universitas Mulawarman, Samarinda, kantor Pemda Walikota Samarinda, dan di Kabupaten Calon Ibu Kota Negara di Penajam Paser Utara (PPU).

Dalam silaturahmi dan serap aspirasi di Universitas Mulawarman, Samarinda, Syarifuddin Hasan mengungkapkan, kepemimpinan MPR yang sekarang mendapat amanah dari MPR periode sebelumnya, 2004 - 2009 dan 2009 - 2014, untuk melanjutkan kajian yang mendalam terhadap usulan masyarakat di antaranya tentang GBHN, yaitu memasukkan Pokok Pokok Haluan Negara dalam UUD NRI Tahun 1945.

“Tapi kami (MPR) tidak buru-buru mengambil keputusan karena kita harus bertanya

kepada masyarakat, kita harus bertatap muka dengan rakyat sebelum mengambil keputusan. Sebab, MPR adalah mesin konstitusi Indonesia. MPR merupakan lembaga kedaulatan rakyat yang tinggi di Indonesia,” katanya dalam silaturahmi dan

serap aspirasi yang dihadiri Rektor Universitas Mulawarman Prof. Dr. Masjaya, dan segenap pimpinan fakultas dan lembaga di Unmul.

Salah satu langkah bertatap muka dengan rakyat adalah serap aspirasi ke perguruan





tinggi. “Salah satu cluster yang menjadi target adalah akademisi. Saya sudah mendatangi enam universitas. Saya ingin lebih banyak mendengar dan menerima masukan,” tutur politisi Partai Demokrat ini.

Menurut Syarif Hasan, GBHN diperlukan karena adanya kekhawatiran kebijakan yang tidak konsisten bila pimpinan berganti. “Namun, ada implikasinya. Apakah MPR kembali seperti dulu sebagai lembaga tertinggi atau tidak. Implikasi lainnya, siapa yang akan menyusun GBHN, apakah akan membuat badan baru misalnya Badan Perencanaan Nasional atau disusun oleh MPR? Kalau disusun MPR maka presiden sebagai pelaksana GBHN. Lalu jika gagal maka presiden bertanggung jawab pada MPR,” paparnya.

Ada juga kekhawatiran, lanjut Syarif Hasan, tidak hanya GBHN tapi dalam

wacana amandemen muncul ide penguatan DPD, penambahan masa jabatan presiden dari lima tahun menjadi 8 tahun, atau menambah menjadi tiga periode.

“Ada juga pandangan dari sebagian kalangan bahwa sebelum dilakukan amandemen perlu ada konsensus nasional dulu. Para pemimpin nasional kita duduk bareng satu meja. Bahwa yang kita inginkan adalah amandemen hanya soal GBHN, misalnya,” katanya.

“Kalau pemimpin nasional ini sudah duduk satu meja, Insya Allah dalam rapat paripurna, rapat gabungan MPR akan selesai per-soalannya,” imbuhnya.

Staf Pengajar Unmul, Edi Rahmat, berpendapat tentang perlunya konsensus nasional sebelum melakukan amandemen UUD NRI Tahun 1945. “Untuk melakukan perubahan UUD paling tidak harus ada

konsensus dulu. Kalau tidak ada konsensus nasional maka akan ada masalah yang muncul. Misalnya, konsensus nasional untuk sepakat atau tidak dengan GBHN. Sekarang ini kekuatan ada di partai politik,” katanya.

Dosen Unmul lainnya, Dr. Laode berpendapat, tidak cukup hanya dengan konsensus tapi juga perlu kajian ilmiah sebelum melakukan amandemen UUD NRI Tahun 1945. “Perguruan tinggi bisa melakukan kajian terhadap apa yang menjadi keinginan rakyat, apakah perlu atau tidak GBHN. Perlu dikaji apa untung dan ruginya dengan ada GBHN,” ujarnya.

Masih di Samarinda, pada Kamis (6/2/2020), Syarif Hasan bersilaturahmi dan serap aspirasi ke pemerintah Kota Samarinda. Silaturahmi dan serap aspirasi yang berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Walikota Samarinda ini dihadiri Wakil Walikota Samarinda M. Barkati dan Sekda, dan SKPD, serta para camat.

Syarief Hasan menegaskan bahwa jika nanti MPR melakukan amandemen UUD NRI Tahun 1945 maka amandemen itu bukanlah untuk kepentingan kelompok tertentu, melainkan untuk kepentingan bersama. Karena itu, perlu dicapai konsensus nasional bahwa perubahan UUD adalah untuk kepentingan bersama.

Pernyataan Syarif Hasan itu menanggapi aspirasi yang disampaikan peserta silaturahmi. Misalnya, aspirasi dari salah satu peserta bahwa amandemen UUD jangan sampai seperti pembahasan UU. “Seperti dalam pembahasan UU ditentukan oleh koalisi mayoritas di parlemen, sehingga lebih mengutamakan kepentingan kelompok. Jangan-jangan amandemen itu nantinya seperti itu,” kata peserta itu.

Peserta lain juga mengungkapkan bahwa amandemen UUD ini sangat sarat dengan kepentingan-kepentingan tertentu. Dan, ada pula peserta yang berharap amandemen kelima nanti adalah amandemen terakhir dan jangan ada amandemen lagi. “UUD jangan terlalu sering diamandemen,” ujarnya.

Menanggapi aspirasi itu, Syarif Hasan mengungkapkan, ada tiga opsi amandemen yang dominan diterima MPR. “Sedikitnya ada tiga opsi yang dominan, yaitu kembali ke UUD 1945 yang asli, tetap seperti sekarang saja, dan opsi melakukan perubahan UUD dengan amandemen secara terbatas,” katanya.



Dari tiga opsi itu, salah satu opsi, yaitu perubahan secara terbatas UUD menjadi perhatian. Salah satu cara menyikapi perubahan UUD secara terbatas adalah mengupayakan sebuah konsensus nasional terkait apa yang dimaksudkan atau diinginkan dengan perubahan terbatas itu. “Perubahan UUD secara terbatas ini yang harus kita sikapi bersama. Untuk menyikapi perubahan UUD secara terbatas itu akan lebih baik jika ada konsensus nasional,” tutur politisi partai Demokrat ini.

“Para tokoh kebangsaan dan partai bertemu. Ketua-ketua Umum Partai Politik itu bertemu membuat satu konsensus bersama. Konsensus nasional,” imbuhnya.

Dengan konsensus nasional, lanjut Syarief Hasan, maka tidak ada lagi kepentingan-kepentingan tertentu atau kepentingan kelompok dalam amandemen UUD itu, karena konsensus nasional adalah untuk kepentingan bersama.

“Konsensus ini untuk kepentingan bersama sehingga amandemen UUD tidak berdasarkan kepentingan tertentu, kepentingan politik dan sebagainya. Dalam konsensus nasional itulah disepakati apa yang dimaksud dan diinginkan dengan perubahan secara terbatas,” jelasnya.

Calon Ibu Kota Negara

Hari ketiga, Jumat petang (7/2/2020), Syarifuddin Hasan mengadakan silaturahmi dan serap aspirasi di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Kalimantan Timur. Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan calon Ibu Kota Negara (IKN). Silaturahmi dan Serap Aspirasi ini dihadiri Bupati PPU Abdul Gafur Mas’ud, Sekda, anggota DPRD Kabupaten PPU, para kepala dinas, dan tokoh masyarakat.

Mengawali silaturahmi dan serap aspirasi, Syarif Hasan mengatakan, semua perhatian saat ini tertuju pada Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). “Saya yakin di masyarakat Indonesia saat ini di dalam pikirannya ada keinginan untuk melakukan kunjungan ke PPU, calon ibu kota negara (IKN),” katanya.

Alasannya, lanjut Syarif Hasan, karena pemerintah sudah menetapkan untuk memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara. “Jadi kedatangan kami dari luar PPU ke-



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

mudian datang ke PPU seolah-olah datang dari daerah ke ibu kota negara,” ujar Syarif Hasan disambut senyum peserta.

Karena itu, Syarif Hasan mengungkapkan, memberi prioritas ketika mempunyai kesempatan untuk berkunjung ke PPU. Setelah datang berkunjung ke PPU, Syarif Hasan mendapat kesan luar biasa dari kabupaten ini. “Tadi saya katakan kepada Bupati, terkesan dengan Kabupaten PPU melihat pembangunan yang berjalan di kabupaten ini,” tutur politisi Partai Demokrat ini.

“Dalam hal apapun ada first impression atau kesan pertama akan muncul secara otomatis. Dan, kesan saya terhadap PPU ini sangat luar biasa. Di Pulau Jawa pun suasana seperti di PPU jarang terlihat. Karena itu saya ucapkan selamat kepada bupati yang sedang memimpin PPU,”

imbuhnya.

Dalam silaturahmi dan serap aspirasi itu Syarif Hasan mengatakan, dalam rangka wacana amandemen UUD NRI Tahun 1945 terkait dengan GBHN, MPR ingin mengkaji lebih mendalam dengan cara bertatap muka dengan rakyat. “Saya akhirnya memilih bertatap muka dengan kalangan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota,” ujarnya.

Syarief menilai, kalangan Pemda merupakan representasi dari rakyat. “Aparatur pemda ini langsung bertemu dengan rakyat. Mereka juga yang mengetahui apa yang diinginkan rakyat. Karena itu, saya menetapkan bertemu dengan aparatur Pemda. Kabupaten PPU merupakan kabupaten pertama yang saya kunjungi,” sebutnya.

Silaturahmi dan serap aspirasi ini diikuti

sekitar 100 orang. “Ini menunjukkan kepedulian pada konstitusi di Kabupaten PPU ini tinggi sekali. Saya memberikan apresiasi. Karena itu saya ingin mendapatkan banyak masukan. Semua masukan itu akan dicatat dan menjadi dokumen resmi dalam pembahasan di MPR,” ujar Syarief Hasan.

Dalam serap aspirasi itu muncul beberapa isu dan pernyataan, di antaranya soal otonomi daerah yang perlu dikembalikan lagi ke tingkat kabupaten, persoalan tanah adat, pertanyaan tentang urgensi menghidupkan kembali GBHN, dan soal regulasi yang memberi kemudahan pelayanan kepada masyarakat. □

BSC



Bertemu Sahabat Lama

SEBELUM bertolak kembali ke Jakarta, Sabtu (8/2/2020), Wakil Ketua MPR Syariefuddin Hasan menyempatkan untuk bertemu Gubernur Kalimantan Timur H. Isran Noor. Pertemuan akhirnya terlaksana di VIP Room Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman

Utara sebagai calon Ibu Kota Negara (IKN). “Sowan ini yang pertama sebenarnya untuk nostalgia,” ujar Syarief, sapaan akrabnya, saat membuka pembicaraan sambil tertawa.

“Yang kedua, terkait dengan perjalanan saya ke titik nol IKN kemarin, saya bilang sama

kala itu mendukung agar pemindahan ibu kota NKRI berada di Pulau Kalimantan. “Sebenarnya, akhir Juli 2019 lalu, 78% itu IKN masih berada di Kalteng, hampir 15% di Kalsel, dan Kaltim masih pada 6,8%,” ujar Isran.

Isran mengakui, tidak pernah melobi



Balikpapan. Dalam pertemuan itu, Syariefuddin Hasan didampingi Staf Khusus Wakil Ketua MPR Andi Nurpati Baharuddin.

Kepada Isran Noor, Syarief Hasan mengatakan, memang sengaja ingin bertemu “sowan” kepada Gubernur Kaltim. Selain untuk terus menjalin tali silaturahmi dengan orang nomor satu di Kaltim, Syarief Hasan juga mengungkapkan selama kunjungannya di Kaltim, di antaranya ke Kabupaten Penajam Paser

Ibu Andi Nurpati kok rasanya kurang lengkap jika sebelum pulang kami tidak sowan dulu dengan Pak Gubernur,” lanjutnya.

Gubernur Isran Noor menyambut baik kunjungan Wakil Ketua MPR RI yang juga merupakan kawan lamanya. “Mudah-mudahan silaturahmi ini bisa terus kita lakukan untuk bersama-sama membangun Indonesia lebih maju.” ujarnya.

Isran Noor, orang nomor satu di Benua Etam itu, menceritakan kembali bagaimana

Presiden Joko Widodo. “Tetapi saya bilang bahwa provinsi yang paling setia itu Kalimantan Timur di republik ini,” lanjutnya disambut tawa hangat Syariefudin dan Andi Nurpati.

Pertemuan dilanjutkan makan siang bersama. Kemudian Gubernur Isran mengantarkan kawan lamanya sampai ke bus yang mengantarkan ke pesawat untuk kembali ke Jakarta. □

BSC

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Tingkat Maturitas SPIP Sekretariat Jenderal MPR Sudah Level 3

Dengan level 3 ini Sekretariat Jenderal MPR sudah memenuhi sejumlah indikator penting dalam membangun kualitas pelaksanaan SPIP.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

SEKRETARITAT Jenderal MPR telah menerima penilaian dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait dengan tingkat maturitas dari Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Berdasarkan penilaian BPKP, pencapaian maturitas SPIP di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR sudah masuk di level 3.

“Saya kira level 3 adalah harapan level secara nasional. Dengan level ini Sekretariat Jenderal MPR sudah memenuhi sejumlah indikator penting dalam membangun kualitas pelaksanaan SPIP,” kata Sekretaris Jenderal MPR, Dr. Ma’ruf Cahyono, SH., MH., usai penyerahan laporan penilaian maturitas SPIP dari BPKP di Ruang Delegasi, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (17/2/2020).

Laporan penilaian BPKP itu diserahkan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polhukam dan PMK Iwan Taufiq Purwanto.

Menurut Ma’ruf, Sekretaris Jenderal MPR memiliki tanggungjawab untuk menjalankan SPIP secara efektif dan berkualitas. “Karena itu, dengan penilaian dari BPKP ini saya merasa senang dan bangga atas kerja keras





dari bagian pengawasan dan seluruh unsur SPIP yang ada di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR. Ini juga menjadi tanggung-jawab yang harus terus-menerus dipertahankan dan ditingkatkan,” ujarnya.

Ma’ruf menjelaskan, ada lima unsur maturitas dari SPIP, antara lain lingkungan pengendalian internal, manajemen risiko, aktivitas dari pengendalian yang ada, komunikasi dan informasi yang bisa dipublikasikan, monitoring (pemantauan) dan evaluasi. “Lima hal penting itu kemudian dijabarkan dalam banyak aspek kriteria. Ini adalah cara Sekretariat Jenderal MPR untuk mengawal reformasi birokrasi sampai pada titik pencapaian pemerintahan yang bersih (clean government) dan pemerintahan yang baik (good governance),” paparnya.

Ma’ruf menambahkan, tingkat maturitas di level 3 dari BPKP, penilaian WTP dari BPK dan nilai-nilai birokrasi seharusnya bisa terasa dalam pengelolaan di internal Sekretariat Jenderal MPR. “Termasuk adanya perubahan perilaku, manajemen yang semakin baik dan berkualitas. Indikatornya antara lain kedisiplinan, efektivitas, produktivitas, dan lain-lain. Ini menjadi pendorong dan pendukung agar sumber daya manusia yang bekerja di Sekretariat Jenderal MPR akan semakin baik ke depan,”



ujarnya.

Dalam laporan penilaiannya, BPKP juga menyertakan beberapa catatan yang perlu diperhatikan dalam SPIP di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR. Ma’ruf menilai, catatan-catatan dari BPKP itu bukan menjadi permasalahan, justru catatan-catatan dari BPKP menjadi pendorong untuk lebih meningkatkan hal-hal yang kurang tadi menjadi lebih baik. “Saya menilai itu bukan masalah. Justru dengan catatan-catatan BPKP itu kita diberikan instrumen untuk melakukan perbaikan,” tuturnya.

Sementara itu, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang

Polhukam dan PMK Iwan Taufiq Purwanto mengatakan, pencapaian maturitas SPIP level 3 di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR sudah melalui proses sesuai pedoman yang telah ditetapkan oleh BPKP. Proses itu dimulai dengan membangun kepedulian di lingkup Sekretariat Jenderal MPR, kemudian dilakukan penilaian mandiri oleh Bagian Pengawasan internal MPR.

“Hasil penilaian mandiri ini kemudian dimintakan *quality assurance* kepada BPKP. Dan, kami melakukan penjaminan kualitas SPIP di Sekretariat Jenderal MPR, yang Alhamdulillah sudah level 3 definisi,” ujarnya. □

BSC

Kompleks Parlemen Jakarta

Ahmad Muzani Sahkan Pimpinan dan Anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR

Anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR adalah mereka dengan kualifikasi kepakaran dalam hukum tata negara, ekonomi, politik, dan pemerintahan, serta mantan anggota MPR yang pernah terlibat dalam perubahan UUD, Badan Sosialisasi, maupun Badan Pengkajian MPR.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR Ahmad Muzani mengesahkan pimpinan dan anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR. Komisi Kajian Ketatanegaraan dipimpin oleh Daryatmo Mardiyanto sebagai ketua, dengan para wakil ketua masing-masing: Rambe Kamarul Zaman, Martin Hutabarat, Bachtiar Aly, dan Hj Siti Masrifah. Anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan berjumlah 45 orang.

“Dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim*, 45 orang anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan serta Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan dan para Wakil Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan, dengan ini dinyatakan sah,” kata Ahmad Muzani dalam Rapat Pleno I Komisi Kajian Ketatanegaraan di Ruang GBHN, Kompleks Parlemen Jakarta, Senin (3/2/2020). Rapat Pleno Komisi Kajian Ketatanegaraan ini dihadiri para anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan.

Ahmad Muzani menjelaskan bahwa Komisi Kajian Ketatanegaraan merupakan amanat dari Pasal 57 Tata Tertib MPR tentang Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR. Nama-nama yang menjadi anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan diserahkan pada pengajuan (usulan) fraksi-fraksi dan Kelompok DPD.

Komposisi anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan terdiri dari 8 orang diajukan (atas usulan) dari Fraksi PDI Perjuangan, 5 orang dari Fraksi Partai Golkar, 5 orang dari Fraksi Partai Gerindra, 4 orang Fraksi PKB, 4 orang dari Fraksi Nasdem, 3 orang dari Fraksi PKS, 3 orang dari Fraksi PAN, 1 orang dari Fraksi PPP, dan 9 orang dari

pengajuan Kelompok DPD. “Jumlah itu sudah sesuai dengan Tata Tertib MPR tentang Komisi Kajian Ketatanegaraan,” kata Ahmad Muzani.

Nama-nama anggota Komisi Kajian MPR adalah nama-nama dengan kualifikasi kepakaran dalam hukum tata negara, ekonomi, politik, dan pemerintahan, serta





mantan anggota MPR yang pernah terlibat dalam perubahan UUD, Badan Sosialisasi, maupun Badan Pengkajian MPR. Dari 45 anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan terdapat nama-nama antara lain: Andi Mattalatta, Margarito Kamis, Didik J Rachbini, dan E.E. Mangindaan.

Wakil Ketua MPR yang membidangi Komisi Kajian Ketatanegaraan ini menambahkan, dalam Rapat Gabungan Pimpinan MPR dengan Fraksi dan Kelompok DPD, Pimpinan MPR mendapat mandat untuk menetapkan

Pimpinan Komisi Kajian Ketatanegaraan. Akhirnya disepakati Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan dipimpin Daryatmo Mardianto sebagai ketua (dari Fraksi PDI Perjuangan), dan para wakil ketua: Rambe Kamarul Zaman (Fraksi Partai Golkar), Martin Hutabarat (Fraksi Partai Gerindra), Bachtiar Aly (Fraksi Partai Nasdem), dan Hj Siti Masrifah (Fraksi PKB).

Sementara itu Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan, Daryatmo Mardiyanto, mengungkapkan, Komisi Kajian Ketata-

negaraan MPR akan bertemu dengan Badan Pengkajian MPR. Pertemuan untuk menjalin komunikasi dan melakukan persiapan-persiapan serta koordinasi tentang pekerjaan yang menjadi ruang lingkup Komisi Kajian Ketatanegaraan dan ruang lingkup Badan Pengkajian MPR agar tugas dua alat kelengkapan MPR itu sinkron. "Pertemuan itu menjadi jalan bagi Komisi Kajian Ketatanegaraan untuk menyampaikan pikiran-pikiran," ujarnya. □

BSC



Serap Aspirasi di Bali

Pimpinan MPR Kunjungi Pemda dan Universitas Udayana



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR RI Syarif Hasan melakukan kunjungan, sekaligus silaturahmi, ke Provinsi Bali dalam rangka serap aspirasi, terkait wacana amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kunjungan tersebut dilaksanakan pada Jumat (14/2). Dalam kunjungan sehari itu, Wakil Ketua MPR bertemu Gubernur Bali, Dr. Ir. Wayan Koster, MM., dan civitas akademika Universitas Udayana.

Pertemuan Syarif Hasan dengan Gubernur Bali berlangsung pukul 10.00 WITA di Ruang Tamu Gubernur. Ikut hadir pada acara itu, I Gusti Agung Ngurah Sudarsana, SH., MH., (Kepala Kesbangpol Provinsi Bali), Drs. Ketut Ngurah Boy Jayawibawa, M.Si., (Kepala Disdikpora), I Gede Indra Dewa Putra, SE., MM., (Asisten Pemerintahan dan Kesra), Ida Bagus Gede Sudarsana, SH., (Karo hukum), dan I Ketut Sukra Negara, S.Sos., M.Si., (Karo Pemerintahan dan Kesra).

Menyangkut pertemuan dengan gubernur, Syarif Hasan mengatakan, itu pilihan yang sangat strategis, untuk mengetahui aspirasi dari pimpinan daerah, khususnya terkait wacana hadirnya haluan negara. Ini penting,

karena pimpinan daerah merupakan pihak yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Pimpinan daerah juga menjadi pihak yang paling banyak mengetahui persoalan dan tuntutan masyarakat.

“Ada usulan menarik dari Pak Gubernur, hendaknya rencana pembangunan nasional itu dipisah menjadi dua. *Pertama*, ada yang harus diikuti dan dipatuhi oleh daerah, dan *kedua*, ada pula yang diberi kebebasan kepada daerah untuk membangun sesuai potensi daerah masing-masing. Bali misalnya, jangan dipaksa untuk ikut melakukan pembangunan terkait energi, karena potensi besar yang dimiliki Bali adalah pariwisata,” kata Syarif Hasan.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Bali mendukung wacana perubahan terbatas menyangkut haluan negara. Karena, hadirnya haluan negara memang sangat penting untuk menjamin keberlangsungan dan keberhasilan pembangunan. Selain itu, pimpinan daerah Bali juga setuju menjadikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara.

Seperti yang bisa dijumpai di negara manapun, ada lembaga tertinggi berbentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tetapi

MPR sebagai lembaga tertinggi tidak harus melakukan pemilihan presiden, seperti di zaman dulu. MPR sebagai lembaga tertinggi hanya bisa ikut memutuskan konflik nasional.

Dan, “Pak Gubernur tadi juga mengatakan bahwa saat ini adalah momen yang tepat untuk melakukan amandemen”, kata Syarif Hasan.

Tak berapa lama setelah bertemu Gubernur Bali, Wakil Ketua MPR langsung menuju Gedung Rektorat Universitas Udayana. Di tempat ini, Syarif Hasan bertemu dan berdialog dengan Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Informasi Universitas Udayana, Prof. Dr. Ida Bagus Wyasa Putra SH., M.Hum., beserta para dosen Fakultas Hukum, Fisip, dan Kewarganegaraan. Kehadiran Syarif Hasan di Universitas Udayana terasa istimewa, karena kunjungan tersebut merupakan yang pertama kali dilakukan oleh pimpinan MPR.

Kotak Pandora

Pada pertemuan ini, Syarif Hasan memastikan, perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 akan dilakukan dengan cara



yang tepat. Bukan hanya menggunakan pendekatan kajian, tetapi juga kontempelasi berbagai masalah yang ada di sekitarnya. Termasuk menggunakan dasar hukum yang tepat, seperti ketetapan MPR.

Selain itu, perubahan terhadap UUD NRI Tahun 1945 akan terus dikawal dan dijaga agar tidak dilakukan semata-mata karena keinginan partai politik saja. Tetapi juga sesuai keinginan seluruh rakyat Indonesia. Karena itulah, Syarif Hasan mengaku akan terus melakukan silaturahmi dan menampung aspirasi dari daerah. Termasuk dari perguruan tinggi dan pemerintah daerah.

Dalam pertemuan tersebut, para dosen meminta pimpinan MPR tidak perlu takut melaksanakan amandemen terhadap UUD NRI Tahun 1945. Karena amandemen yang akan dilakukan berfungsi untuk menyempurnakan UUD yang sudah ada. Apalagi, seperti yang dulu disampaikan sendiri oleh

Bung Karno bahwa konstitusi yang sekarang itu dibuat pada saat darurat. Karena itu, perubahan yang dilakukan harus bersifat penyempurnaan.

“Kawan-kawan Udayana menyatakan kesiapannya ikut melakukan kajian yang sifatnya penyempurnaan. Karena itu, MPR tidak perlu takut melakukan perubahan. Bahkan perubahan yang akan dilakukan jangan dibatasi, dan jangan takut seolah-olah akan membuka kotak Pandora,” kata Syarif Hasan.

Sebelumnya Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Informasi Universitas Udayana Prof. Dr. Ida Bagus Wyasa Putra, SH., M.Hum., menyambut baik kehadiran Wakil Ketua MPR di kampusnya. Menurut Ida Bagus Wyasa, kehadiran Syarif Hasan merupakan kedatangan Wakil Ketua MPR yang pertama ke Udayana. Karena itu, pihaknya sangat menghargai dan memberi



apresiasi yang tinggi atas kehadiran Syarif Hasan. Apalagi, dalam kunjungan ini Wakil Ketua MPR melakukan dialog dan menyerap aspirasi terkait wacana perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Wacana Pengembalian WNI eks ISIS

Dalam kunjungan ke Bali, Syarif Hasan turut menyampaikan pendapatnya terkait isu aktual selama Februari. Salah satunya menyangkut wacana pengembalian WNI eks anggota ISIS yang ada di Syuriah dan beberapa negara sekitarnya. Menurut Syarif Hasan, sesuai amanat UUD NRI Tahun 1945, pemerintah wajib melindungi warga negara, meskipun secara implisit warga negara juga harus melindungi dirinya. Karena itu, pemerintah harus berhati-hati dalam menetapkan kebijakan melarang warga negara yang menjadi anggota ISIS untuk kembali ke Indonesia. Karena, kalau ternyata mereka bisa pulang sendiri dikhawatirkan bisa jadi ancaman di dalam negeri.

Intinya, boleh saja pemerintah melarang WNI eks anggota ISIS kembali ke Tanah Air. Tetapi, pemerintah juga harus ingat kewajibannya melindungi warga negara, kecuali kalau mereka benar-benar telah berganti kewarganegaraan. Apalagi pemerintah juga memiliki program deradikalisasi dalam menghadapi para pelaku terorisme.

Deradikalisasi, kata Syarif Hasan, bisa dilakukan dengan banyak cara. Yang penting, dilakukan *brainwash*. Dan, kalau ada yang salah diingatkan agar kembali berada di jalan yang benar. Dan, “Yang perlu dilakukan adalah identifikasi secara cermat. Siapa saja yang berjuang untuk negara lain, siapa yang sudah membuang kewarganegaraan Indonesia dan masuk menjadi warga negara lain, semua ada aturannya, semua ada implikasinya sesuai UU Kewarganegaraan,” tegas Syarif Hasan.

Sedangkan bagi anak-anak dan kaum perempuan, menurut Syarif Hasan, pemerintah harus tetap berusaha memulangkan mereka. Karena sesungguhnya anak-anak dan kaum perempuan bukan pelaku langsung, dan mereka tetap menjadi warga negara, sehingga layak untuk dipulangkan. □

MBO

Pelantikan Pengurus KAMMI

Tugas Pemuda Sekarang Menjaga dan Mengawal Cita-Cita Kemerdekaan

Pergerakan pemuda Indonesia memiliki perjalanan sejarah panjang sejak awal perjuangan kemerdekaan. Kini, pemuda berperan mengisi kemerdekaan.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengingatkan bahwa organisasi pergerakan kepemudaan Indonesia saat ini tidak lepas dari rentetan sejarah perjuangan pemuda di awal kemerdekaan. Pergerakan saat itu merupakan hasil dari pemikiran, peran, dan kiprah para pemuda terpelajar Indonesia dahulu, dengan satu tujuan mulia menuju Indonesia merdeka.

HNW mengungkapkan hal tersebut ketika menghadari dan menyampaikan sambutan pada acara Pelantikan Pengurus Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) periode 2019-2021 di Aula Museum Gedong Joang '45 Menteng, Jakarta, Jumat (7/2/2020).

Peran, pemikiran, dan semangat para pemuda tersebut, lanjut HNW, mesti menjadi teladan buat seluruh organisasi pergerakan kepemudaan di era kekinian. Tercatat dengan tinta emas sejarah perjuangan bangsa Indonesia, di mana beberapa pemuda terpelajar Islam menjadi tonggak awal terbentuknya negara Indonesia melalui organisasi intelektual kepemudaan. Di antara para pemuda itu



Hidayat Nur Wahid

terdapat kakak-beradik Satiman Wirjosandjojo dan Soekiman Wirjosandjojo.

Satiman adalah pendiri 'Jong Java', suatu organisasi kepemudaan yang didirikannya pada 7 Maret 1915 dengan nama awal *Tri Koro Dharmo*. Sedangkan Soekiman adalah pencetus pertama istilah pergerakan Indonesia dengan mengubah nama organisasi kepemudaan 'Indonesische Vereeniging' menjadi 'Perhimpunan Indonesia' dan ini adalah organisasi pertama menggunakan nama Indonesia pada 1925.

Kemudian, pada 1945, Soekiman menjadi Ketua Umum pertama partai Islam Masyumi.

Artinya, mereka, para pemuda, sekitar 100 tahun lalu telah menorehkan prestasi luar biasa, yang dampaknya dirasakan hingga saat ini. "Semangat mereka, keberanian mereka, dari mulai pendirian organisasi, bersatu dalam sumpah pemuda, sampai menjadi bagian dari BPUPKI telah mengantarkan bangsa ini ke gerbang kemerdekaan," ungkap HNW.

Pimpinan MPR dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini berharap, pemuda saat ini mesti melanjutkan perjuangan mereka. Karena dari perjalanan sejarah tersebut, ada yang bisa dimaknai dan diambil pelajarannya untuk bangsa Indonesia di masa sekarang ini, yakni pentingnya menghadirkan kembali peran kelompok pemuda terpelajar dalam memberikan koreksi atas perjalanan bangsa dan negara guna menuju ke arah yang lebih baik.

"Tentu saja peran pemuda saat ini bukan untuk meraih dan menghadirkan kemerdekaan. Namun, tugas pemuda masa sekarang adalah mengawal dan menjaga cita-cita Indonesia merdeka," tandasnya. □

DER

Ma'ruf Cahyono:

Tidak Ada Transfer Dana Menyimpang di DPD

Transfer keuangan negara ke pihak lain dimonitor dan dievaluasi serta diaudit oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

SEKRETARIS Jenderal MPR Ma'ruf Cahyono yang juga menjadi Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal DPD pada 2018 menegaskan bahwa tidak benar ada transfer dana atau pengelolaan keuangan negara yang menyimpang di Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Transfer keuangan negara ke pihak lain dimonitor dan dievaluasi serta diaudit oleh BPK.

"Tidaklah mungkin dan tidak mudah proses transfer keuangan negara ke pihak lain tanpa rekening yang jelas, karena semuanya ada

monitor dan evaluasi. Ada audit dari BPK dan telah diaudit tidak ada persoalan," kata Ma'ruf Cahyono dalam keterangan kepada media di Media Center MPR/DPR/DPD RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (30/1/2020). Ma'ruf Cahyono memberi keterangan bersama Sekretaris Jenderal DPD, Reydonnizar Moenek.

Keterangan Ma'ruf itu sebagai klarifikasi adanya pemberitaan di beberapa media terkait dengan kepemilikan rekening atau transaksi mencurigakan yang dimiliki oleh

seorang pejabat negara di DPD, yang secara eksplisit disebut Dr. Oesman Saptia. "Karena pemberitaan dikaitkan dengan posisi sebagai pejabat negara, nama dan harkat pejabat negara, juga dengan lembaga DPD, maka saya wajib memberikan klarifikasi," terangnya.

Ma'ruf menyebutkan, pengelolaan keuangan negara di DPD telah mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 13 kali berturut-turut. Untuk mendapatkan penilaian itu sangat berat karena harus



Ma'ruf Cahyono



Reydonnizar Moenek

memenuhi empat indikator, yaitu: laporan keuangan sudah sesuai standard akuntansi pemerintah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan negara, kecukupan dalam pengungkapan, dan pengelolaan keuangan negara dijalankan secara efektif. “Jadi tidak akan ada proses pengeluaran uang negara itu tanpa proses dan harus sesuai aturan yang ada,” jelasnya.

“Jadi, tidak benar ada transfer dana atau pengelolaan keuangan negara yang menyimpang, yang kemudian diberitakan seolah-olah ada penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan keuangan negara, yang diksinya sungguh akan menurunkan harkat dan martabat pejabat Negara, serta harkat dan martabat dewan sebagai lembaga negara yang selama menjalankan tugas dan wewenangnya

sudah memberikan kontribusi optimal terhadap bangsa dan negara ini,” tambahnya.

Ma’ruf khawatir bila pemberitaan seperti itu tidak diklarifikasi akan berpotensi menimbulkan fitnah dan pembunuhan karakter terhadap seseorang. “Juga agar jangan sampai masyarakat menjadi *distrust* terhadap posisi DPD sebagai lembaga negara yang telah berkinerja baik saat itu. Sebab, diksi-diksi seperti transaksi ilegal, rekening, kasino, pencucian uang, akan mencederai kepercayaan masyarakat terhadap lembaga DPD,” tuturnya.

Sekjen DPD Reydonnizar Moenek menambahkan, sistem dan prosedur pengeluaran kas DPD sangat rigid. “Tidak mungkin kita melakukan pembayaran apapun tanpa dilandasi aspek kebenaran tujuan, sampai kebenaran orang yang menerima, dan ada

cantolan dasar hukumnya,” katanya.

Karena itu, Reydonnizar menepis ada transfer dari rekening DPD ke rekening kasino, dan seterusnya. “Jadi, tidak benar dan tidak ada uang sepeserpun yang keluar dari rekening kas umum negara atas nama DPD yang kemudian ditransfer ke kasino, dan seterusnya,” katanya.

“Sama sekali tidak berdasar pernyataan yang menyatakan ada transfer ke rekening, ke kasino. Ini persepsi dan opini yang mau dibangun tapi tidak berdasar dan tidak ada faktanya. Pengalaman kami, Ketua DPD Oesman Sapta tidak pernah mau menggunakan anggaran untuk kepentingan pribadi. Sebagai Sekjen DPD kami sangat berkepentingan menjaga harkat, martabat, marwah, dan nama baik DPD,” imbuhnya. □

BSC

Reuni Alumni FH Unsoed

Ma’ruf Cahyono: “Ini Bagian untuk Mengabdikan pada Bangsa dan Negara”



SEKITAR seratus alumni Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (FH. Unsoed) yang tinggal di kawasan Jabodetabek mengadakan silaturahmi dan reuni di Jakarta, 15 Februari 2020. Pertemuan

yang digelar kali ini bertema: ‘Alang-alang dudu aling-aling’.

Sebagai alumni FH. Unsoed angkatan 1986, Ma’ruf Cahyono merasa bahagia, karena kegiatan itu bisa digelar dengan

dihadiri ratusan alumni. Menurut pria yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal MPR itu, silaturahmi dan reuni merupakan cara untuk mengikat emosi dan mengenang masa lalu di antara sesama alumni. Meski



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

saat ini kemajuan teknologi informasi, seperti media sosial, marak digunakan dan mempercepat komunikasi di manapun dan kapan pun, namun menurut Ma'ruf Cahyono, pertemuan secara fisik lebih bermakna.

Pertemuan itu digelar dengan menghadirkan para alumni angkatan 1981 hingga 2013. Dengan pertemuan itu maka di antara alumni bisa saling mengenal secara langsung. Ma'ruf Cahyono mengakui, ada di antara para alumni FH yang belum dia kenal. Maka, "Dengan tatap muka langsung bisa saling mengenal", paparnya. "Tak kenal maka tak sayang," tambahnya.

Ma'ruf Cahyono menyebut setelah menjadi alumni FH. Unsoed semua mempunyai tujuan yang sama, yakni demi kemajuan

bangsa dan negara. Alumni yang hadir dalam acara tersebut mempunyai beragam profesi, ada yang menjadi pengacara, notaris, pengamat politik, pengamat kebijakan pemerintah, hakim, dan jabatan lainnya. Beragam profesi tersebut, menurut Ma'ruf Cahyono, perlu dihimpun dalam 'cluster' yang selanjutnya di antara alumni bisa saling mendukung, menopang, dan menjalin kerja sama. "Ini bagian dari kita untuk mengabdikan pada bangsa dan Negara," tegasnya. "Dalam kelompok yang diutamakan adalah kebersamaan, bila ada yang menyimpang perlu diluruskan", tambahnya. Lebih lanjut, dia mengungkapkan, beragam profesi yang ada perlu disatukan untuk membumikan kebersamaan.

Pada pertemuan yang digelar pada Sabtu itu mereka membahas rencana Reuni Akbar Alumni FH Unsoed yang akan digelar di Purwokerto, 22 - 23 Februari 2020. Sebagai Ketua Panitia Reuni Akbar Alumni FH. Unsoed, Ma'ruf Cahyono mengajak seluruh alumni FH. Unsoed untuk hadir dan menyukseskan acara tersebut. Bagi Ma'ruf Cahyono, yang lebih penting adalah reuni. Dalam reuni yang muncul adalah suasana suka cita. "Mudah-mudahan reuni dan Munas FH. Unsoed yang akan digelar sukses", harapnya. Selepas reuni dan Munas, dia berharap, para alumni terus bersilaturahmi hingga tujuan Tri Dharma Perguruan Tinggi tercapai. □

AWG



H. Mutahar

Habib Si Penyelamat Sang Saka *Merah Putih*

KEBERHASILAN bangsa Indonesia meraih dan mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 tak lepas dari campur tangan dan pengorbanan para pahlawan. Tidak sedikit para pahlawan yang ikut berjuang demi kemerdekaan bangsa Indonesia, salah seorang di antaranya adalah Muhammad Husein bin Salim bin Ahmad bin Salim bin Ahmad Al Mutahar atau dikenal Husein Mutahar atau H. Mutahar.

H. Mutahar adalah salah seorang Pahlawan

pada 19 Desember 1948, Belanda melancarkan agresi kedua, dan menawan seluruh pejabat tinggi Republik Indonesia. Pada saat genting, sebelum Presiden pertama Republik Indonesia ditangkap, Bung Karno memanggil Mayor M. Husein Mutahar, selaku ajudannya. Bung Karno, saat itu, memberi tugas pada H. Mutahar untuk melakukan penyelamatan bendera pusaka, dan akan meminta bendera itu kembali jika situasi sudah terkendali.

putih itu sebagai bendera, supaya tidak disita. Ini penting, karena di mata seluruh bangsa Indonesia, bendera itu adalah sebuah “prasasti” yang tidak boleh raib dari jejak sejarah.

Seperti yang sudah diperkirakan, tak lama setelah itu Presiden Soekarno ditangkap oleh Belanda dan diasingkan ke Prapat (kota kecil di pinggir danau Toba) sebelum dipindahkan ke Muntok, Bangka. Sementara Wakil Presiden Mohammad Hatta langsung diasing-



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Nasional yang memiliki darah keturunan Arab. Ia lahir di Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah, pada 5 Agustus 1916, kemudian wafat pada 9 Juni 2004 dan atas permintaannya dimakamkan di Pemakaman Jeruk Purut, Jakarta Selatan.

Salah satu peristiwa yang membuat Husein Mutahar dikenang oleh seluruh bangsa Indonesia adalah sikap heroik dan patriotiknya saat menyelamatkan Sang Saka Merah Putih. Penyelamatan bendera Sang Saka Merah Putih oleh Husein Mutahar dimulai ketika Soekarno-Hatta memindahkan ibukota negara ke Yogyakarta, dan membawa serta Sang Saka Merah Putih dari Jakarta ke Yogyakarta pada Januari 1946.

Namun, belum genap dua tahun, tepatnya

Seketika itu pula, anak dari Salim Mutahar ini berfikir keras mencari cara menyelamatkan Sang Saka Merah Putih. Maklum, saat itu situasi benar-benar tak terkendali. Di mana-mana terdengar desingan puluru meriam dan bau mesiu. Beruntung H. Mutahar segera menemukan cara bagaimana menyelamatkan Sang Saka Merah Putih tersebut. Caranya, ia memisahkan kedua carik kain merah dan putih yang disatukan membentuk bendera Sang Saka. Kemudian kedua carik kain itu diletakkan di dasar dua tas berbeda, dan di bagian atasnya diberi tumpukan pakaian serta perlengkapan pribadi miliknya.

Selanjutnya dia pasrah, sembari berharap tentara Belanda tidak mengenali kain merah-

kan ke Bangka. Sedangkan, Mutahar dan beberapa staf kepresidenan diangkat dengan pesawat Dakota dibawa ke Semarang, dan ditahan di sana.

Saat jadi tahanan kota, Mutahar berhasil melarikan diri, dan naik kapal laut menuju Jakarta. Selanjutnya, di Jakarta Mutahar berpindah-pindah tempat tinggal, sembari mencari cara agar bisa menyerahkan kembali bendera Pusaka itu kepada Presiden Soekarno.

Pucuk dicinta ulampun tiba. Suatu pagi, di pertengahan Juni 1948, ia menerima surat dari Presiden Soekarno. Isinya, perintah agar menyerahkan bendera pusaka itu kepada Soedjono untuk dibawa ke Bangka. Soedjono dipilih, karena dalam pengasingan,



Bung Karno hanya boleh dikunjungi oleh anggota delegasi Republik Indonesia yang ikut dalam perundingan dengan Belanda di bawah pengawasan UNCI (United Nations Committee for Indonesia). Dan, Sudjono adalah salah satu anggota delegasi.

Mutahar pun bergegas menyatukan kedua helai kain (merah dan putih) agar kembali menjadi bendera Sang Saka. Bendera pusaka yang tadinya antara kain merah dan putih terpisah, kemudian dijahit kembali. Menjahitnya pun sangat hati-hati. Benang jahitan harus persis masuk di lubang bekas jahitan tangan Ibu Fatmawati. Setelah dijahit, bendera pusaka itu dibungkus kertas koran, kemudian diberikan kepada Soedjono untuk diserahkan kembali kepada Bung Karno.

Lagu Syukur

Menyelamatkan bendera Sang Saka Merah Putih adalah satu sisi dari perjuangan seorang H. Mutahar untuk kemerdekaan Indonesia. Di sisi lain, tak kalah pentingnya adalah andilnya dalam menggelorakan dan membangkitkan semangat juang bangsa Indonesia melalui lagu-lagu perjuangan.

H. Mutahar memang seorang komposer, dan pencipta lagu-lagu perjuangan. Salah satu lagu perjuangan yang ia ciptakan dan cukup fenomenal adalah *Hari Merdeka* (1946). Serta sejumlah lagu-lagu lainnya, seperti *Syukur* yang diperkenalkan pada Januari 1945. Kemudian, lagu *Dirgahayu Indonesiaku* (lagu resmi peringatan Hari

Ulang Tahun ke-50 Kemerdekaan Indonesia), dan Hymne Pramuka.

Tidak hanya lagu-lagu yang bernuansa perjuangan, H. Mutahar juga dikenal sebagai pencipta lagu anak-anak. Tak sedikit lagu anak-anak yang berhasil diciptakannya, antara lain: *Gembira*, *Silang-silang*, *Mari Tepuk*, *Slamatalah*, *Jangan Putus Asa*, dan *Saat Berpisah*.

Selain penyelamat bendera Sang Saka Merah Putih, mencipta lagu-lagu perjuangan dan lagu anak-anak, H. Mutahar juga termasuk sosok penting dalam kependuan



Indonesia. Dia termasuk pendiri Pramuka, organisasi baru hasil peleburan seluruh gerakan kependuan yang ada di Indonesia.

Dan, H. Mutahar juga tak bisa dipisahkan dari Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka). Karena keberadaan pasukan pengibar bendera pada setiap peringatan kemerdekaan 17 Agustus tak lepas dari peran seorang H. Mutahar. Sebagai ajudan Presiden, Mutahar diberi tugas menyusun upacara

pengibaran bendera ketika Republik Indonesia merayakan hari ulang tahun pertama Kemerdekaan pada 17 Agustus 1946.

Waktu itu, dia memilih lima pemuda dari berbagai daerah yang berdomisili di Yogyakarta (tiga laki-laki dan dua perempuan) sebagai wakil daerah masing-masing. Pemilihan ini didasari keyakinan bahwa pengibaran bendera pada Peringatan 17 Agustus sebaiknya dilakukan oleh pemuda-pemudi perwakilan dari daerah-daerah di seluruh Indonesia.

Dan, di era Orde Baru, H. Mutahar pun masih dibutuhkan pengabdianya. Tepatnya, pada 1967, Mutahar diminta Presiden Soeharto menyusun tata cara pengibaran bendera pusaka pada peringatan Hari Kemerdekaan di tahun ini. Lalu, ia menyusun pasukan yang dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu: Kelompok 17 sebagai pengiring, kelompok 8 sebagai pembawa bendera, dan kelompok 45 sebagai pengawal. Pembagian kelompok tersebut merupakan simbol dari tanggal, bulan, dan tahun Hari Kemerdekaan Indonesia. Karena itu H. mutahar disebut Bapak Paskibraka.

Selama hidupnya, H. Mutahar tidak menikah, namun ia mempunyai 8 anak angkat (6 laki-laki dan 2 perempuan). Anak-anak yang diasuhnya itu adalah anak yatim yang sengaja diserahkan oleh orangtuanya. Maka lengkaplah perjuangan seorang H. Mutahar. Sebagai pejuang kemerdekaan, dan juga pejuang kemanusiaan. □

MBO

Ujian Promosi Doktor UNJ

Beberapa Variabel Pengaruhi Kinerja DPR

Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid raih gelar Doktor dari Universitas Negeri Jakarta setelah mempertahankan disertasinya berjudul: “Pengaruh Rekrutmen, Kompetensi, dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Anggota DPR RI Periode 2014-2019.”



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

AULA Gedung Bung Hatta Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Rawamangun, Jakarta, hari Senin, 17 Februari 2020, dipadati ratusan pengunjung. Di antara para pengunjung itu terdapat sejumlah pejabat negara. Mereka adalah Ketua MPR Bambang Soesatyo; para Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, Zulkifli Hasan, Lestari Moerdijat, Fadel Muhammad; Pimpinan DPR RI Azis Syamsudin, dan Muhaimin Iskandar; Ketua Komisi Yudisial RI Jaja Ahmad Jayus; dan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman.

Kehadiran mereka di UNJ itu guna menyaksikan ujian Promosi Doktor untuk promovendus Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid. Di depan tim penguji terdiri dari: Prof. Dr. Lili Romli, Prof. Dr. Nadiroh, Prof. Dr. Yetti Supriyati, Prof. Dr. R. Madhakomala, Dr. Komarudin dan Dr. Mardi, promovendus mempertahankan disertasi berjudul: ‘Pengaruh Rekrutmen, Kompetensi, dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Anggota DPR RI Periode 2014-2019’.

Dalam disertasi Jazilul menguraikan bahwa DPR adalah lembaga terhormat yang memiliki kewenangan legislasi. Sebagai lembaga terhormat, tentu diisi oleh orang-orang yang terhormat dan mulia.

Tetapi, selama ini kinerja anggota DPR masih menjadi sorotan masyarakat, bahkan ada opini dari beberapa lembaga survei menyebutkan kinerja DPR kurang memuaskan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukannya, promovendus menemukan kinerja DPR akan sangat berpengaruh kepada masyarakat sebagai penerima layanan dan pemerintah. Jika kinerja DPR bermasalah maka ada kemungkinan ada beberapa variabel yang mempengaruhi kinerja tersebut dan perlu perbaikan. “Peneliti melihat masalah yang muncul dari kinerja DPR tersebut karena ada beberapa variabel yang kemungkinan menjadi faktor penyebabnya, yakni soal rekrutmen, kompetensi dan komitmen,” ujar Jazilul.

Menurut Jazilul, saat ini partai politik (parpol) dalam melakukan rekrutmen anggota DPR dipilih dan diputuskan melalui suara terbanyak, bukan karena kompetensi. Maka, yang banyak masuk menjadi anggota DPR bukan dari kalangan parpol atau kader, tetapi dari kalangan profesi lain yang bukan pelaku politik, sehingga komitmen dalam menjalankan tugas kurang begitu baik.

“Jika beberapa variabel itu diperbaiki serta

dilakukan secara benar maka akan berimplikasi langsung secara positif terhadap kinerja dan organisasi, serta berdampak baik pada masyarakat,” kata Jazilul.

Terhadap paparan Jazilul tersebut, beberapa anggota Dewan Penguji mengajukan pertanyaan dan sanggahan, tapi mampu dijawab secara lugas dan meyakinkan oleh promovendus. Selanjutnya Ketua Dewan Penguji, Dr. Komarudin mengumumkan hasil yudisium, yang memutuskan bahwa Jazilul Fawaid dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan.

Sejak hasil yudisium itu diumumkan, Jazilul Fawaid berhak menyangand gelar Doktor. Dan, Jazilul adalah doktor ke-4083 dari UNJ. “Saya bersyukur dengan pencapaian pendidikan saya dari awal sampai saat ini,” ujar Jazilul kepada pers usai acara.

Dia mengatakan, gelar doktor ini adalah suatu amanah, suatu kebahagiaan yang disyukuri dan dijaga dengan baik. Dan, menurut Jazilul, yang penting bagaimana ke depannya, mengaplikasi temuan-temuan dalam penelitian yang dilakukan, sehingga memberi manfaat kepada peneliti, lembaga DPR, dan kepada seluruh elemen masyarakat. □

DER

Selamat, atas penetapan
Ambon sebagai Kota Musik
oleh UNESCO

"All over the world, these cities,
each in its way, make culture the pillar,
not an accessory, of their strategy,"
says UNESCO Director-General Audrey Azoulay.



Ambon Kota Musik Dunia Sejajar dengan Liverpool dan Sevilla

Berkat perjuangan yang tekun dari pemerintah dan masyarakat Ambon, akhirnya ibu kota Provinsi Maluku itu ditetapkan sebagai Kota Musik Dunia oleh UNESCO. Lembaga yang bernaung di bawah PBB itu menetapkan Kota Ambon menjadi Kota Musik Dunia, karena semua persyaratan yang ditentukan UNESCO telah terpenuhi. Dengan demikian, Kota Ambon sekarang sejajar dengan Liverpool, Sevilla, dan Auckland, yang lebih dahulu dinobatkan menjadi Kota Musik Dunia.

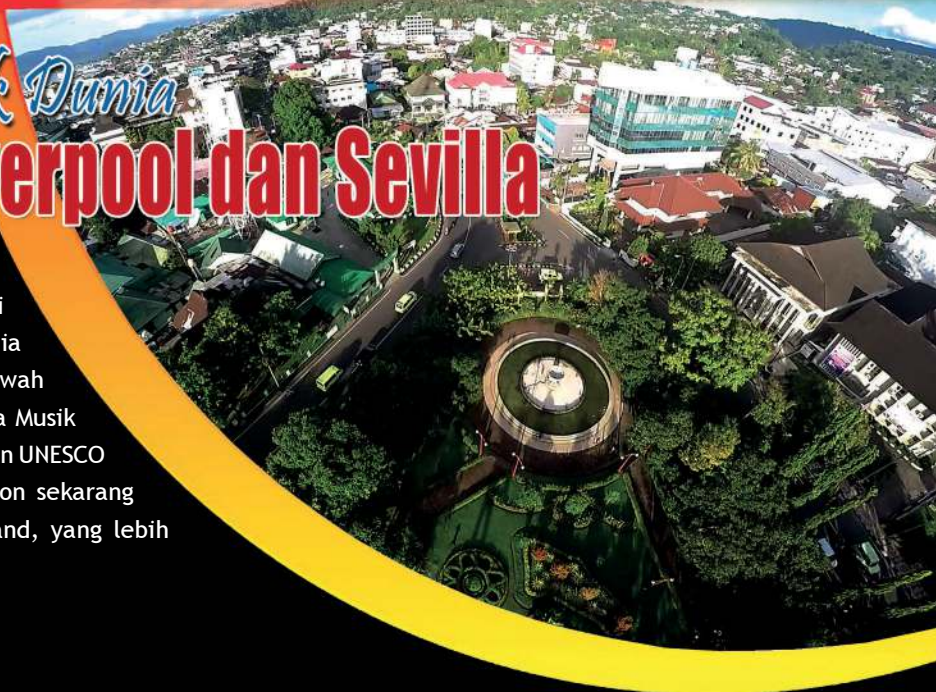


FOTO-FOTO: ISTIMEWA



HARI ITU, 31 Oktober 2019, adalah hari yang amat membahagiakan bagi Glenn Fredly. Musisi kelahiran Jakarta, 30 September 1975, itu pantas berbahagia, sebab kota asal dari keluarganya, Ambon, Maluku, ditetapkan oleh UNESCO sebagai Kota Musik Dunia. Ungkapan kegembiraan dari pria yang sudah manggung sejak 1995 atas ditetapkannya Ambon sebagai Kota Musik Dunia dituang lewat akun instagram, @glennfredly309. Di media social itu, penyanyi yang sudah mengeluarkan sembilan album itu mengatakan: *selamat masyarakat Kota Ambon! Kerja keras banyak pihak membuah hasil Kota Ambon menjadi kota pertama di Asia Tenggara yang masuk dalam jaringan sebagai kota musik dunia oleh UNESCO*. Lebih lanjut dia mengungkapkan, *ini adalah berkah dan harapan baru bagi masyarakat Kota Ambon di tengah peristiwa fenomena alam (gempa) yang terjadi. Beta percaya segala sesuatu indah pada waktunya*.

Untuk menjadikan ibu kota Provinsi Maluku sebagai Kota Musik Dunia telah dirintis sejak 2016. Waktu itu, tepatnya 28 Oktober 2016, Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon men-



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

canangkan kota itu sebagai Kota Musik. Bahkan jauh sebelumnya, 2011, masyarakat di sana mendeklarasikan hal serupa, Ambon Kota Musik. Agar eksistensinya lebih mendunia, Pemkot Ambon dan Pemerintah Provinsi Maluku bersama *Ambon Music Office (AMO)* dengan difasilitasi oleh Deputi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), serta dukungan dari beberapa musisi, mengajukan Ambon sebagai Kota Musik pada UNESCO. Pada September 2018, kebetulan lembaga itu mengadakan pertemuan di Bali

sehingga di Pulau Dewata-lah AMO, Pemkot Ambon, Pemerintah Provinsi Maluku, Bekraf bersama-sama mengajukan dokumen yang mendukung kota itu memang layak disebut sebagai kota musik.

UNESCO dalam menetapkan sebuah kota layak disebut sebagai kota musik tentunya dengan menetapkan standar-standar khusus. Berdasarkan standar yang ditetapkan oleh UNESCO, sebuah kota dapat disebut sebagai kota musik apabila infrastruktur penunjang, berupa ketersediaan sumber daya manusia (SDM) di bidang



musik, gedung pertunjukan seni, studio rekaman, dan sekolah musik. Rupanya, semua persyaratan itu ada di Ambon, sehingga tanpa mengalami kesulitan, UNESCO setuju Ambon masuk kategori Kota Musik Dunia.

Sekretaris Kota Ambon, Anthony Gustav, saat itu, mengatakan bahwa Kota Ambon memang layak disebut sebagai Kota Musik, karena Kota Ambon memiliki semua aspek dalam musik. Dia mencontohkan, Ambon memiliki musisi yang berprestasi di tingkat nasional dan internasional, seruling bambu yang menjadi ciri khas Kota Ambon, dan upaya musisi Indonesia dalam meningkatkan nilai Kota Ambon dengan mengadakan Konferensi Musik Indonesia di Kota Ambon.

Indonesia, 25/05/2019, Direktur UNESCO City Of Music Mannheim, Jerman, Rainer Kern, mengatakan, Ambon sudah siap menjadi Kota Musik Dunia. Kern mengutarakan hal itu, setelah selama beberapa hari mengunjungi Ambon. Ditemani oleh Tamara Kemanski dari Polandia, Kern melihat langsung, bertemu, dan berbagi pendapat dengan masyarakat dan komunitas musik. "Kita sepakat Ambon menjadi Kota Musik Dunia," tuturnya. Menurut Kern, untuk menjadi Kota Musik Dunia harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan UNESCO. "Banyak hal yang dapat ditunjukkan, karena Ambon memang memiliki berbagai hal, baik kualitas bermusik, keragaman sosial, dan budaya, ini tentunya menjadi nilai yang berbeda," ujarnya seperti

Portugal; dan Auckland, Selandia Baru. Kota-kota itu layak disebut sebagai Kota Musik Dunia karena di sana musik menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Dalam *Kompas.com*, 08/11/2019 dipaparkan, di Sevilla, kota yang berada di kawasan Andalusia dengan jumlah penduduk 1.500.000 jiwa, musik adalah segalanya dan dapat ditemukan di mana saja, mulai dari simfoni, opera, hingga tempat publik dipersembahkan musik. Kota ini ditetapkan sebagai Kota Musik Dunia pada 2006. Tahun itu merupakan tahun di mana Sevilla ditetapkan sebagai kota pertama penerima penghargaan Kota Musik Dunia.

Pun demikian Liverpool. Ketika mendengar nama kota ini kita langsung teringat pada klub



Dan, untuk mendukung upaya itu, di Kota Ambon dibangun dua bangunan, yakni fasilitas dan infrastruktur, seperti Gedung Studio Musik di Universitas Pattimura, dan Gedung Pertemuan Musik Etnik di kampus Institut Agama Islam Negeri Ambon.

Meski lahir di Jakarta, Glenn tentu sangat paham bagaimana perjalanan perjuangan untuk membuktikan Kota Ambon memang layak menyandang sebutan Kota Musik Dunia. "Perjalanan panjang dan tidak mudah terjadi karena kolaborasi dan kerendahan hati banyak pihak untuk mewujudkannya bersama," ungkap Glenn. Nah, dengan ditetapkan Kota Ambon sebagai Kota Musik Dunia, dia berharap, bisa memicu kebangkitan musik Indonesia. "Jadikan momentum ini sebagai kebangkitan musik Tanah Air yang dimulai dari Timur Indonesia," harapnya.

Sebelumnya, seperti diberitakan *CNN*

termuat dalam berita itu. Dalam kunjungan itu, Kern terkesan dengan keramahan masyarakat, terutama dalam hal kualitas bermusik sangat baik yang dimulai sejak kecil, serta keragaman budaya. "Bukan hanya itu, masyarakat terus mewujudkan perdamaian dan musik menjadi media pemersatu masyarakat", ujarnya.

Selama di Ambon, Kern mengunjungi komunitas musik, yakni musik suling bambu di Negeri Tuni, Tahuri di Hutumuri, musik Sawat di Negeri Batu Merah, menyaksikan Festival Ramadan, dan pagelaran seni di taman budaya.

Ditetakannya Ambon sebagai Kota Musik Dunia maka kota yang memiliki semboyan *Bersatu Manggurebe Maju* itu bisa bersanding dengan kota musik dunia lainnya, seperti: Sevilla, Spanyol; Hamamatsu, Jepang; Liverpool, Inggris; Idanha-a-Nova,

sepakbola Liverpool FC. Kota ini juga membangkitkan kenangan pada *The Beatles*, sebuah grup musik dengan legendanya John Lenon yang eksis pada 1960 – 1970. Musik bagi masyarakat di sana sudah menjadi nadi kehidupan. Kekayaan dan keragaman musik sudah ada di sana sejak Abad XVIII. UNESCO menobatkan kota ini sebagai Kota Musik Dunia, karena musik berada di jantung dari kehidupan setiap orang. Panitia dari UNESCO menyatakan, kota pelabuhan di Region Merseyside itu merupakan surga dengan beragam acara, seperti *International Music Festival*, *Sound City*, dan *Psych Fest*. UNESCO juga mencatat *Royal Liverpool Philharmonic Orchestra* di mana konduktor kepala Vasily Petrenko menyatakan, penghargaan itu adalah pengakuan sebagai kota besar musik dunia. Pada 2015, UNESCO menetapkan kota ini sebagai Kota Musik Dunia.



Audrey Azoulay

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Sedang Idanha-a-Nova juga hidup dengan ritme musi. Dari logo pemerintah kotanya juga menunjukkan kota ini adalah kota musik, yakni *Tamborin Adufe*. Menariknya, kota ini memiliki pagelaran musik yang begitu populer selama 20 tahun terakhir, yakni *The Boom Festival*. Festival ini menghidupkan kota selama dua pekan sepanjang musim panas. Festival yang digelar di area seluas 140 hektar ini mampu menarik perhatian 40.000 pengunjung dari ratusan negara. Pentingnya kohesi sosial melalui music di kota ini merupakan fokus utama dari *Idanhense Brass Band* yang berusia 130 tahun.

Selanjutnya, Auckland. Kota ini merupakan pusat segala aktivitas terkait musik di Selandia Baru. Dalam *Kompas.com*, 08/11/

2019, dengan musik dan bahasa yang terkait budaya Maori maupun Pasifik, komunitas yang ada menambah kekayaan dan suara unik pada budaya Auckland. Lagu Maori, *Waiata*, dipadukan *moteatea* (keluh kesah) sehingga menyuguhkan sejarah, cinta, ketakutan, kemarahan, hingga rasa duka lewat musik. Auckland, dinobatkan UNESCO sebagai Kota Musik Dunia pada 2017, sebagai pengakuan bahwa para musisi maupun musiknya berperan penting dalam meningkatkan status mereka. Di Kota ini digelar berbagai acara terkait music, seperti *The Going Global Music Summit*. Acara ini mampu meningkatkan koneksi dengan produser internasional. Tak hanya itu, juga ada *Musicians Mentoring in Schools* yang

menghubungkan musisi lokal dan internasional, dengan talenta yang bersinar.

Di Asia, sebelum Ambon ditetapkan sebagai Kota Musik Dunia, sudah lebih dulu ditetapkan sebagai Kota Musik Dunia adalah Kota Hamamatsu. Kota yang terletak di antara Tokyo dan Osaka ini merupakan tempat pabrik peralatan musik yang sudah sangat kesohor, yakni *Yamaha*, *Kawai*, dan *Roland*. Di kota ini, rutin setiap tahun digelar *Kompetisi Piano Internasional Hamamatsu* maupun *Kompetisi Opera Internasional Shizuoka*. Tak hanya itu, di sana juga berdiri *Museum Instrumen Musik*. Di museum ini, para wisatawan bisa mendapatkan perspektif baru mengenai koleksi alat musik dari seluruh dunia. Hamamatsu ditetapkan sebagai Kota Musik Dunia pada 2014.

Masyarakat Ambon dan juga tentunya bangsa Indonesia bangga, karena bersama 65 kota dunia, Ambon kini bergabung dalam wadah: *Jaringan Organisasi Kota Kreatif* se-dunia. Direktur Jenderal UNESCO Audrey Azoulay mengatakan, kota yang terpilih dikarenakan menjadikan budaya sebagai pilar bukan aksesoris. "Strategi mereka juga kami lihat untuk membawa budaya sebagai pilar, bukan aksesoris. Hal demikian, menurut Audrey, mendukung inovasi politik dan sosial serta sangat penting bagi generasi muda.

Jaringan Organisasi Kota Kreatif adalah jaringan yang menyatukan kota-kota yang mendasarkan pengembangan mereka pada kreativitas, baik dalam musik, seni dan kerajinan rakyat, desain, bioskop, sastra, seni digital, dan gastronomi. Jaringan ini tidak hanya berfokus pada budaya, melainkan juga akses, inklusi, pendidikan kewarganegaraan global, pertahanan hak, ekonomi, dan pekerjaan. Tak hanya itu, jaringan yang ada juga mempunyai aktivitas bagaimana pencegahan dan ketahanan terhadap perubahan iklim. Penghargaan yang dilakukan secara rutin merupakan sebuah kesempatan untuk berdialog tentang perkotaan, sehingga menampilkan kota-kota luar biasa yang mengandalkan inovasi dan kecerdasan kolektif untuk membangun masa depan kota. □

AWG/dari berbagai sumber





Tumbuh Secara **Kultural dan Struktural**

Musik telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Kota Ambon. Di desa-desa hidup tradisi memainkan instrumen musik tertentu. Pemerintah mendorong musik ukulele masuk kurikulum Sekolah Dasar. Di sana musik tak hanya sekadar menghibur namun juga sebagai wahana untuk menjalin perdamaian.

BAGI masyarakat Kota Ambon, Maluku, bermain musik tak hanya berlangsung sejak lama, namun juga dilakukan sejak anak-anak. Di desa-desa (negeri) di Ambon, bermain musik sudah menjadi bagian dari kehidupan. Salah satu desa yang menjadikan musik sebagai bagian dari kehidupan adalah Tuni. Selepas Ambon dijadikan Kota Musik Dunia oleh UNESCO, negeri itu (Tuni) akan dicanangkan menjadi Desa Musik. Bukan tanpa alasan, karena Tuni memang identik

rangka melestarikan pohon bambu itu.

Dalam memproduksi instrumen suling, dalam sebuah berita *online* diceritakan, bila ingin membuat suling sebanyak 100 batang maka diperlukan 200 ratus ruas bambu. Memang diperlukan jumlah ruas bambu yang lebih dengan tujuan untuk jaga-jaga bila ada produksi yang gagal, seperti tidak sesuai dengan ukuran, retak, pecah, dan suara yang kurang, bahkan tidak pas.

Selain menjaga kebutuhan dasar instru-

bermusik dan membaca notasi angka. Kekompakan dan keterpaduan dalam berorchestra membuat warga masyarakat berbondong-bondong ingin menjadi anggota grup itu.

Saat dibentuk, grup ini mengalami kendala, yakni sedikitnya keberadaan perajin suling. Hal demikian mengakibatkan muncul inisiatif pendiri grup membuat alat musik sendiri. Untuk membuat sebanyak 60 suling membutuhkan waktu sekitar tiga bulan. Suling



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

dengan instrumen musik suling bambu. Selain suling bambu, karena di sana bermain musik dilakukan secara konsisten sejak anak-anak.

Banyak kiat agar suling bambu tetap terjaga keberadaannya. Pada November 2018, pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat melakukan tanam pohon bambu di Tuni di lahan seluas 1 hektar. Penanaman pohon yang tumbuh subur di Asia itu adalah dalam rangka untuk menyediakan kebutuhan pembuatan suling. Diakui, selama ini, untuk menyediakan kebutuhan bahan baku pembuatan suling diambil dari hutan. Maka, dengan menanam pohon bambu di lingkungan sekitar, selain tak perlu lagi jauh-jauh masuk ke hutan, juga dalam

men musik, bambu tetap tersedia. Mengingat di Ambon juga berdiri grup musik *Molucca Bamboowind Orchestra*. Grup ini kerap mengisi berbagai acara festival musik yang diselenggarakan oleh berbagai pihak, baik di Kota Ambon maupun daerah luar. Grup itulah yang juga akan mendukung Tuni sebagai desa musik.

Di *Kompas*, 03/10/2012, diceritakan bahwa *Molucca Bamboowind Orchestra* dibentuk pada 2006. Anggota grup ini beragam, ada siswa SMP, SMA, mahasiswa, guru, wiraswasta, pensiunan PNS, tukang ojek, penyadap Nira, dan montir bengkel. Meski mereka beragam dan memiliki status pendidikan tak sama, namun mereka memiliki semangat besar untuk berlatih

yang dihasilkan mampu memberi ragam nada, mulai dari sopran, alto, tenor, sampai bas yang rendah.

Ketika *Molucca Bamboowind Orchestra* tampil di Auditorium Taman Budaya, Karang Panjang, Kota, Ambon, pada 2012, salah satunya lagu yang ditampilkan, *Rayuan Pulau Kelapa*, mampu membuat penonton terkesima. Para penonton terdiam menikmati begitu indahnya permainan mereka. Di saat lagu syahdu dialunkan, para penonton duduk terkesima, namun begitu lagu riang didengarkan, penonton pun tergugah ceria, bahkan ada yang ikut berjoget.

Selain di Tuni, Amahusu juga merupakan negeri yang hendak dicanangkan sebagai desa musik. Bila di Tuni berbasis suling, maka



di Amahusu berbasis pada ukulele. Ukulele adalah alat musik petik sejenis gitar berukuran kecil, sekitar 20 inci.

Kebiasaan bermain musik di masyarakat Ambon sejak anak-anak itu rupanya lebih didorong oleh pemerintah dengan program *Ukulele Goes to School*. Program ini diluncurkan oleh Pemerintah Kota Ambon pada Juli 2019. Kali pertama program diluncurkan, ada beberapa sekolah yang dijadikan sasaran, yakni SD Inpres 42 Ambon, SDN 1 Amahusu, dan SDN 2 Amahusu. Selanjutnya ukulele masuk di sekolah-sekolah yang lain.

Ukulele Goes to School, selain sebagai upaya untuk lebih memasyarakatkan musik ke lembaga-lembaga formal, juga sebagai cara untuk mendorong anak-anak melakukan kegiatan yang lebih bermakna. Program itu dimaksudkan sebagai solusi mengeliminir

dampak dari kemajuan teknologi dengan maraknya penggunaan gadget oleh anak. Koordinator dan pelatih *Amboina Ukulele Kids Community*, Nicko Tulalessy menyebut, program itu menandakan Ambon sebagai kota pertama di dunia yang menggelar ukulele masuk sekolah.

Buah dari masuknya ukulele ke sekolah-sekolah adalah mahirnya anak-anak di sana bermain alat musik itu. Pada Desember 2019, puluhan anak Desa Amahusu memeriahkan acara *Amahusu Bagara*. Dalam kesempatan itu, anak-anak di sana pentas dengan memainkan ukulele. Saat pentas mereka tak hanya memainkan lagu-lagu daerah, namun juga lagu-lagu pop. Mereka terlihat ceria dan penonton pun terhibur.

Sebagai pulau yang pada masa lalu menjadi pusat komoditas yang dicari bangsa-bangsa Eropa, rempah-rempah, di

Maluku terjadi persilangan dan percampuran berbagai budaya. Hal itu tercermin dari Musik (Tari) Sawat. Musik Sawat sudah menjadi bagian masyarakat Ambon. Pada musik sawat terjadi perpaduan dari beragam instrumen, seperti rebana, suling, dan tifa. Dalam *Wikipedia* disebut, tifa merupakan alat musik khas Indonesia bagian Timur, khususnya Maluku dan Papua. Alat musik ini bentuknya menyerupai kendang dan terbuat dari kayu yang dilubangi tengahnya. Ada beberapa jenis Tifa, yakni Tifa Jekir, Tifa Dasar, Tifa Potong, Tifa Jekir Potong dan Tifa Bas.

Tifa mirip dengan gendang yang dimainkan dengan cara dipukul. Setiap suku di Maluku dan Papua memiliki tifa dengan ciri khas masing-masing. Alat musik ini biasa digunakan mengiringi tarian perang dan beberapa tarian daerah lainnya, seperti tari Lenso dari Maluku yang diiringi juga dengan alat musik totobuang. Dalam beberapa pertunjukan musik ini biasanya disandingkan dengan musik sawat yang dimainkan oleh orang-orang yang tinggal di wilayah mayoritas Muslim.

Tifa dari Maluku memiliki nama lain, seperti tahito atau tihal yang digunakan di wilayah Maluku Tengah. Sedang di Pulau Aru, tifa memiliki nama lain, yaitu titir. Jenisnya ada yang berbentuk seperti drum dengan tongkat, seperti yang digunakan di masjid. Badan kerangkanya terbuat dari kayu dilapisi rotan sebagai pengikatnya, dan bentuknya berbeda-beda berdasarkan daerah asalnya. □

AWG/dari berbagai sumber



FOTO-FOTO: ISTIMEWA



Para Pelantun Lagu Berdarah Ambon

Banyak penyanyi kondang di Indonesia mulai 1960-an berdarah Ambon, Maluku. Mereka menjadi penyanyi kesohor karena talenta yang menurun dari orangtua, dan lingkungan yang mendukung. Meski di antara mereka sudah tiada, namun suara dan lagunya masih dikenang. Banyaknya penyanyi berdarah Ambon, semakin menyakinkan kota itu sebagai Kota Musik Dunia.

Broery Marantika

Di 1970-an, hingga saat ini, bila mendengar lagu *Widuri*, perasaan kita pasti tersentuh sebab bait dan irama lagu yang diciptakan oleh Adriadie pada 1972 itu sangat melankolis. Kali pertama lagu itu dipopulerkan oleh Bob Tutupoly, penyanyi berdarah Maluku yang mulai akrab di masyarakat sejak kemunculan TVRI. Selanjutnya lagu itu dinyanyikan kembali oleh Broery Marantika.

Baik saat didendangkan oleh Bob maupun Broery, lagu *Widuri* sama enakannya bila didengar. Broery adalah pria kelahiran Ambon, 25 Juni 1948. Pria yang kerap meraih penghargaan dalam dunia musik, seperti pemenang lagu *Surat Untuk Kekasih di Malaysia Official Music Industry Award*, *Album soundtrack terbaik di Malaysia Hapuslah Air Mata*, dan meraih penghargaan dalam enam kategori di *Jakarta Music Festival*; itu memiliki nama asli Simon Dominggus Pesulima. Namun dalam kariernya sebagai penyanyi ia menggunakan nama marga dari ibunya, Marantika.

Pria yang juga pernah bermain di layar lebar itu, sejak manggung di 1970-an sudah mendendangkan ratusan lagu dan membuat puluhan album. Dalam *Wikipedia* disebut ada dua lagu yang dinyanyikan membuat namanya populer, yakni *Mawar Berduri* dan *Angin Malam*. Lagu lain yang pernah dilantunkan *Mengapa Harus Jumpa*, *Siti Nurbaya*, *Selamat Tinggal*, *Aku Jatuh Cinta*, *Ayah*, *Kharisma Cinta*, *Duri Dalam Cinta*, dan *Senja Di Kuala Lumpur*.

Harvey Malaihollo

Dibesarkan dalam keluarga penyanyi, bisa jadi yang membuat Harvey Benjamin Malaihollo terasah bakatnya hingga menjadi penyanyi pop yang sangat dikenal masyarakat di tahun 1980 hingga 1990-an. Setiap acara musik yang diprogramkan oleh TVRI,



Broery Marantika

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

saat itu, seperti *Safari*, *Kamera Ria*, dan *Album Minggu Ini*, penyanyi berdarah Ambon itu sering nongol di layar kaca.

Ibunya adalah seorang biduanita di grup *Titaley*. Sedang kakeknya, Bram *Titaley*, adalah seorang penyanyi yang juga kesohor. Dari keluarga penyanyi inilah maka tak heran bila Harvey sejak kecil sudah akrab dan diakrabkan dengan dunia tarik suara. Meski ayahnya, Daniel Benjamin Malaihollo, bukan penyanyi namun ia selalu menyemangati anaknya dengan menghadiahkan kaset dan piringan hitam dari diva pop dunia,

yakni Frank Siantra dan Michael Jackson.

Pria kelahiran Jakarta, 3 Mei 1962, itu mengawali kariernya pada 1970-an. Kesabaran dalam menekuni dunia tarik suara itu buahnya dapat dirasakan pada 1980-an. Di era itu ia menjuarai festival Bintang Radio dan Televisi. Album yang diluncurkan ke publik oleh Harvey adalah *Sudah Kubilang*, *Coklat Susu*, *Senja Dibatas Kota*, *Taragak (Pop Minang)*, *Aku Begini Kau Begitu*, *Mau Tak Mau*, *Kugapai Hari Esok*, *Pengertian*, *Hidup Yang Sepi*, *Tetaplah Bersamaku*, dan *Begitulah Cinta*.



Harvey Malaihollo

Utha Likumahuwa

Di tahun 1990-an, ada penyanyi kelahiran Ambon yang suaranya melengking. Ia adalah Utha Likumahuwa. Sebagai penyanyi yang penuh bakat, pria kelahiran 1 Agustus 1955, itu mempunyai banyak prestasi, seperti *Penampilan terbaik kedua pada ASEAN Pop Song Festival 1989 di Manila, Juara 2 Asia Pacific Singing Contest di Hongkong, dan Juara 2 Asia Pacific Broadcasting Union/ABU Golden Kite World Song Festival di Kuala Lumpur.*

Sebagai penyanyi yang memulai karier di 1981, pria yang mempunyai nama asli Doa Putra Eval Johan Likumahuwa itu sudah mengeluarkan album, seperti *Nada Dan Apresiasi, Dengarlah Suara Kami, Bersatu Dalam Damai, Aku Pasti Datang, Aku Tetap Cinta, Dansa Suka – Suka, Puncak Asmara, Untuk Apa Lagi, Masih Ada Waktu, Classic, dan Tak Sanggup Lagi.*

Melly Manuhutu

Sebagai penyanyi berdarah Ambon, Mellyana Manuhutu mengawali kariernya sebagai penyanyi di usia masih anak-anak. Anak-anak seusianya yang juga menekuni dunia musik adalah Anggun C. Sasmi, Irma June, Novia Kolopaking, Murni Chania, dan Rika Callebout.

Perempuan kelahiran Jakarta, 5 Juli 1975, itu menunjukkan bakatnya dalam dunia musik setelah albumnya yang berjudul *Mellyana* beredar dan sukses di Jepang. Dalam *Wikipedia* disebut album itu diproduksi oleh *Wave Records* itu diproduseri oleh Makoto



Bob Tutupoly

Kubota, serta musiknya ditangani oleh *Guest Music*. Di album ini ada lagu *Yamko Rambe Yamko, Cublak-Cublak Suweng, dan Tokecang.*

Meledak dari album pertama, selanjutnya kesuksesan dilanjutkan dengan produksi album *Beatify*. Seperti album sebelumnya, album ini diproduksi oleh *Kubota* dan *Wave Records*. Dalam album kedua ini, diisi hits *Love at First Sight*. Ketika namanya sudah kondang, pada 1999, ia membuat album ketiga. Judul album ini adalah namanya sendiri, *Melly Manuhutu*. Kali ini albumnya diproduksi BMG Music Indonesia dengan lagu unggulan *Ada Cinta dan Biarkan Bebas*.

Dalam *Wikipedia* diungkap, Melly dikenal sebagai Diva R&B Indonesia. Dia punya idealis. Menurutny ia tidak mau terjebak

dalam tren musik pop komersial yang bukan ‘jiwa’-nya. Dia merasa R&B adalah jiwanya. “Saya tetap di jalur musik R&B karena saya ingin menampilkan, mengekspresikan sesuatu tidak dengan paksaan”, ujarnya.

Bob Tutupoly

Bagi generasi 1960 hingga 1990-an pasti mengenal nama Bob Tutupoly. Di masa stasiun televisi yang hanya ada TVRI, pria berdarah Maluku kelahiran Surabaya, 13 November 1939, itu kerap muncul tak hanya sebagai penyanyi, namun juga presenter acara kuis.

Bob merupakan anak dari Adolf Laurens Tutupoly dan Elisabeth Wilhemmina Henket-Sahusilawane. Ayahnya adalah seorang tentara di angkatan laut. Meski berdinast di angkatan laut, namun ayahnya adalah seorang pemain suling dan ibunya merupakan penyanyi di gereja. Dua hal inilah yang membentuk Bob bisa cemerlang dalam dunia seni musik.

Ia mulai rekaman pada 1965 bersama Pattie Bersaudara. Dari sinilah namanya mulai melambung dengan lagu-lagunya seperti *Lidah Tak Bertulang, Tiada Maaf Bagimu, Tinggi* dan *Gunung Seribu Janji*. Bob sendiri sebelumnya bergabung dengan Bill Saragih di band *The Jazz Riders*. Selepas kembali dari Amerika, pada 1977, ia menyanyikan lagu *Widuri*. Lagu itulah yang membuat namanya menjadi lebih terkenal dan menjadikan ia legenda musik di Indonesia. □

AWG/dari berbagai sumber



Utha Likumahuwa



Melly Manuhutu

Faisal Zein

Pimpinan Ponpes Gelar Cianjur

Agama dan Pancasila Tidak Perlu Diperdebatkan

PONDOK pesantren adalah lembaga pendidikan yang bukan hanya menitik beratkan kepada pelajaran agama, tetapi juga pendidikan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa kita, yakni Pancasila. Jadi, tidak perlu khawatir hubungan antara agama dan Pancasila, terutama dengan agama Islam. Sebab, nilai-nilai Pancasila juga diambil dari nilai agama.

Intinya, antara agama dan Pancasila itu dua hal yang semestinya tidak usah diperdebatkan lagi. Sebab dulu para pendiri bangsa dan pahlawan bangsa juga berasal dari kaum nasionalisme dan kaum ulama, santri bahu-membahu berjuang demi Indonesia merdeka.

Saya juga sangat mengapresiasi pejabat-pejabat negara yang sudi menyambangi pondok pesantren, walaupun lokasinya terpencil. Hal tersebut penting, selain sebagai wujud perhatian pejabat-pejabat negara kepada rakyatnya juga untuk menangkis soal-soal yang sedang berkembang, terutama soal radikalisme.

Saya juga berharap banyak para pejabat negara lainnya memberi perhatian kepada elemen-elemen rakyat yang di daerah-daerah terpencil agar keinginan mereka di dengar, sehingga ada pemerataan perhatian dan pada akhirnya ada pemerataan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia. □

DER



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Ws. Budi S. Tanuwibowo

Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia

Negara Mesti Jamin Harmonisasi Hubungan Antaragama



SAYA sangat mendukung wacana amandemen terbatas UUD NRI Tahun 1945, terutama menyangkut soal munculnya kembali haluan negara semacam GBHN. Sebab, jika negara menganggap hal itu sangat penting maka rakyat, seperti kami juga akan menganggap hal tersebut adalah hal yang sangat penting.

Namun, negara mesti memastikan bahwa segala hal yang menyangkut rakyat, termasuk soal haluan negara itu harus ada jaminan bahwa hal tersebut ke depannya menjadikan hubungan antar-rakyat antaragama menjadi lebih akur, lebih damai, lebih tenteram, lebih saling menghormati dan saling menghargai.

Kami juga mendukung adanya gagasan, pikiran atau wacana adanya utusan golongan yang dapat mewakili seluruh komponen masyarakat, termasuk agama Khonghucu. Perwakilan utusan golongan kami rasa perlu agar semua elemen masyarakat terwakili dalam mewarnai perjalanan bangsa dan negara kita. □

DER

Apa Motif Berdirinya Kerajaan Baru

Tiba-tiba bermunculan kerajaan baru. Ada yang menamakan dirinya Kerajaan Agung Sejadag, dan ada pula mengaku kerajaan Sunda Empire. Sang raja dan ratu secara terus terang mendeklarasikan kekuasaannya. Ini fenomena apa? Berikut pendapat anggota MPR terkait munculnya kerajaan baru.

Gusti Arya Wedakarna, Anggota MPR dari Kelompok DPD

Wajar Selama Tidak Melanggar Hukum

MENURUT saya adalah hal wajar jika masyarakat modern ini selalu mencari jati dirinya. Jati diri itu adalah akar dari sebuah kebudayaan. Kita tahu sejarah Nusantara ini penuh dengan sejarah hebat para leluhur. Sejak Kerajaan Kutai di abad IV, munculnya Sriwijaya, Singosari, Kediri, Padjajaran, Majapahit hingga kerajaan berbasis Islam setelah abad XV. Jadi selain pergerakan alam, juga kerinduan pada sejarah leluhur. Selama tidak melanggar undang-undang, setiap warga negara wajar menggali akar (*roots*) hingga nenek moyangnya. Ini yang dinamakan Bung Karno sebagai Trisakti ketiga, yakni: “Berkepribadian di bidang budaya”. Intinya, tidak melanggar aturan dan undang-undang. Secara alam, kita juga heran dengan hampir setiap bulan ada candi-candi yang bermunculan, khususnya di Jawa. Saya pernah hadir bersama BPCB di candi-candi yang baru ditemukan, ini pasti kehendak Tuhan juga. Dalam ajaran Majapahit, fenomena ini bisa jadi bagian dari Ramalan *Sabdo Palon Nayogenggong*.

Siapa pun warga negara yang “gandrung” akan budaya nusantara harus dihargai. Lebih baik mengagumi kerajaan nusantara dibanding mengagumi budaya asing yang impor dari luar negeri. Semua itu bentuk nasionalisme kekinian. Ada rasa bangga kalau ada anak bangsa yang bicara Majapahit, bicara Sriwijaya, bicara tatar Sunda. Tapi jangan sampai kebanggaan kita para sejarah masa lalu malah dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, termasuk ada pungli atau ada pemaksaan untuk percaya. Jadi ada fenomena kerinduan di masa lalu itu hal yang wajar. Orang Barat saja sering



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

travel ke dunia Timur, baik ke Mesir, India, maupun Cina untuk mencari jati dirinya.

Apakah masa sekarang penuh dengan kegaduhan sehingga orang ingin kembali ke masa lalu? Bisa jadi, kan belum ada jaminan jika NKRI akan bertahan ke depan, karena gerakan khilafah cukup marak, gerakan sparatis juga masih mengintai. Belum lagi bahaya neo komunis dan disintegrasi bangsa. Kita lihat sejarah Indonesia bahwa Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit yang begitu besar saja runtuh. Dan, ini tugas anak muda Indonesia untuk menjaga agar NKRI ini bertahan dan senjatanya hanya Pancasila. Secara teori sosial politik adalah wajar jika kondisi ekonomi sebuah bangsa turun maka pikiran revolusi itu menjadi kreatif. Dan, In-

donesia punya tantangan di sana. Jadi jika ada orang yang ingin ke masa lalu, itu wajar dan manusiawi. Sekarang tinggal negara harus bisa hadir.

Kerajaan Baru itu bisa jadi tumbuh karena ada sejarah yang dulu dikaburkan kini muncul. Kita akui, di Indonesia ini banyak kerajaan yang pecah, baik di zaman Belanda dengan *divide et empera* atau juga karena konflik internal. Contoh di Bali, ada banyak leluhur raja-raja Bali yang menyembunyikan gelar (*Nyineb Wangsa*), karena kalah perang, atau yang pro Republik. Maka dari itu sejarah setiap puri di Bali itu berbeda. Dan, kita akui semua adalah keturunan raja. Sehingga mungkin ke depan bukan kerajaan baru yang ditonjolkan, tapi organisasi persatuan para keturunan/trah raja sultan yang perlu dibina. Contohnya ada Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN), Asosiasi Kerajaan Indonesia, atau wadah silaturahmi Raja Sultan Pangeran Putri. Kalau payungnya organisasi, bisa dilindungi oleh UUD NRI Tahun 1945, Pasal 28, kebebasan bersyariat dan berkumpul. Tapi kalau sampai mendirikan kerajaan baru itu kurang patut, karena Indonesia kini sudah republik. Sebaiknya yang merasa keturunan raja cukup menjadi sesepuh, penglingsir, datu atau pembina kebudayaan. Semua terhormat, yang penting menjaga nama baik leluhurnya.

Kasus yang terjadi di kerajaan baru di Jawa tempo hari jelas melanggar hukum, karena ada kutipan dan iuran. Ini tidak benar secara aturan UU. Juga ada pemaksaan dan ancaman untuk bisa menjadi anggota kerajaan. Ini jelas tidak dibenarkan karena sifatnya penipuan. Saya kira bukan pencari

kekuasaan ya, tapi lebih pada ingin “pengakuan”. Mereka orang-orang yang idealis sebenarnya, dan ketika mereka bicara sejarah leluhur, itu sudah bagus. Tapi sayang ideliasme mereka dimanfaatkan untuk kepentingan sekelompok orang. Mereka warga bangsa yang sebenarnya ingin didengar, ingin diakui dan ingin dilibatkan. Di sini peran pemerintah desa, kota/kabupaten dan provinsi hingga pusat untuk hadir. Oknum memanfaatkan keluguan dan mungkin juga penyakit sosial di masyarakat. Ada celah di sana untuk bisa dimanfaatkan. Bisa jadi raja atau ratu ini sosok pemimpin yang sudah gagal dalam kontestasi politik, bisa jadi kan? Saya kira tindakan Polri sudah cukup bijak dalam

memilah masalah yang ada. Jika sudah ada pemaksaan, pengancaman, klaim dan sampai ada iuran, itu sudah melanggar aturan.

Bagaimana sikap pemerintah terhadap kerajan atau kesultanan yang masih ada dan sah? Sebenarnya sudah ada payung hukumnya. Dulu saat FSKN dipimpin oleh saudara kami dari Bali, Raja Cokorda Denpasar IX dari Puri Agung Denpasar, saya kira sudah ada Permendagri yang mengayomi kelestarian Keraton Nusantara. Di sana pemerintah bisa membantu kelestarian puri, keraton, istana dan juga situs budaya. Belum lagi ada UU No. 11/2010 tentang Situs Cagar Budaya yang mana memberikan amanat bahwa bangunan yang

usianya lebih dari 50 tahun, itu bisa dijadikan Cagar Budaya. Jadi celahnya banyak. Intinya walau Indonesia negara Republik, jangan anti dengan kerajaan. Inggris besar karena kerajaan, Jepang jadi hebat karena punya Kaisar. Negara Arab stabil karena Sultan adalah lambang stabilitas tinggi. Lihat saja di ASEAN, negara yang punya Raja Sultan seperti Thailand, Malaysia, Brunei, Kamboja cenderung lebih stabil dan ekonomi maju. Juga ada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitas Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah. □

AWG

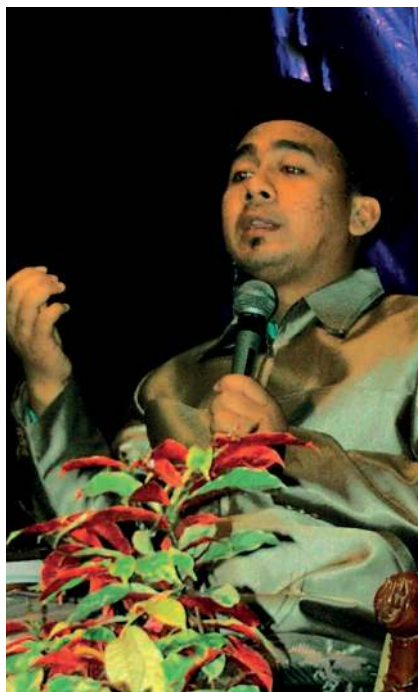
Gus Rojih Ubab Maimoen, Anggota MPR Fraksi PPP

Pengikutnya Hanya Segelintir

FENOMENA yang menyebabkan munculnya kerajaan-kerajaan baru di tanah Jawa, saya melihat ini hanyalah fenomena penipuan biasa yang dilakukan oleh oknum-oknum yang memanfaatkan ketidakstabilan psikologis, rendahnya pengetahuan, dan keterbatasan ekonomi sejumlah masyarakat. Para oknum itu melihat ada peluang untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dengan menjanjikan keuntungan bagi orang yang akan bergabung dengan kerajaan-kerajaan fiktif yang mereka dirikan. Dalam beberapa waktu terakhir, kerajaan-kerajaan itu tidak hanya muncul di Tanah Jawa, namun juga Sunda yang secara tradisi memiliki sejarah berbeda. Keduanya memang berada di Pulau Jawa, namun mempunyai akar sejarah yang berbeda.

Secara umum, saya kira ini bukan kerinduan pada masa lalu, namun lebih pada keinginan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Bagi para pengikut pun, saya yakin mereka tidak meyakini bahwa kerajaan yang mereka ikuti itu adalah benar adanya. Mereka hanya berharap apa yang dijanjikan oleh para raja dan pengurus kerajaan fiktif itu benar-benar terealisasi. Apalagi dana yang dijanjikan sangat besar dibanding dana yang mereka keluarkan untuk menjadi anggota kerajaan.

Sekarang dirasa penuh dengan ke-



gaduhan dan kesengsaraan sehingga orang ingin kembali pada masa lalu. Saya kira tidak demikian, jika pun ada hanya satu dua orang saja yang merasa yakin bisa mencapai kejayaan masa lalu melalui kerajaan-kerajaan fiktif tersebut. Kerajaan fiktif itu tidak bisa dilegalkan karena memang fiktif, bahkan mengandung unsur

penipuan. Malah penegak hukum perlu melakukan proses hukum terhadap praktik penipuan yang dilakukan itu.

Untuk menjadi pejabat di kerajaan baru harus membayar iuran, itu adalah bagian dari janji-janji mereka untuk mendapatkan keuntungan. Saya kira sangat naif jika masyarakat terjebak pada hal tersebut. Masyarakat sebenarnya tidak mudah diiming-imingi janji-janji manis kerajaan fiktif. Terbukti pengikutnya hanya segelintir saja, di mana kebanyakan mereka hanya ingin mendapatkan keuntungan dari janji yang dilontarkan oleh para raja fiktif tersebut.

Benar, ini adalah modus mencari keuntungan. Apalagi dalam perjalanannya, orang yang mengaku sebagai raja itu mempunyai rekam jejak pernah melakukan penipuan sebelumnya dengan modus yang relatif sama, yaitu menjanjikan keuntungan kepada pengikutnya.

Sikap pemerintah dalam melestarikan kerajaan atau kesultanan yang masih ada dan sah di nusantara. Konstitusi telah mengakui bahwa kerajaan-kerajaan terdahulu merupakan bagian dari sejarah Indonesia yang harus dilestarikan. Nilai-nilai tradisi dan budayanya pun harus dijaga bersama sebagai sebuah kekayaan bangsa. □

AWG

Serap Aspirasi di Kalimantan Tengah

Syarief Hasan Kunjungi UPR di Palangka Raya



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KEDATANGAN Wakil Ketua MPR Syarif Hasan di Universitas Palangka Raya (UPR), Palangka Raya, Kalimantan Tengah, 28 Januari 2020, disambut Rektor UPR Andrie Elia beserta jajarannya. “Kami berharap kehadiran pimpinan MPR membawa perubahan bagi UPR, menjadi lebih baik dan mendapat perhatian dari pemerintah pusat,” begitu antara lain sambutan Rektor UPR Andrie Elia ketika menyambut kehadiran Wakil Ketua MPR Syarif Hasan di kampusnya.

Kepada tamunya, Andrie Elia menjelaskan bahwa kampus UPR masih memiliki keterbatasan, namun dia dan civitas akademika UPR tetap semangat dan pantang mundur. Oleh karena itu, sang rektor berharap, kehadiran Syarif Hasan di kampus ini akan menjadikan perguruan tinggi ini menjadi lebih baik lagi, dan tentunya mendapat perhatian dari pemerintah pusat.

Tapi, kunjungan Syarif Hasan di kampus yang berjaket kuning itu untuk untuk lain lain, yaitu serap aspirasi terkait wacana amandemen UUD NRI Tahun 1945 untuk menghidupkan kembali Pokok-Pokok Haluan Negara atau sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN. Acara serap aspirasi digelar di Aula Rahan, Gedung Rektorat UPR, dihadiri oleh puluhan dosen, dekan, kepala jurusan, dan perwakilan mahasiswa Universitas Palangka Raya.

Mengawali sambutannya, Syarif Hasan menjelaskan tentang lembaga MPR. Pimpinan MPR saat ini, menurut pria asal Sulawesi ini,

sangat luar biasa. “Mencerminkan seluruh kekuatan partai politik dan perwakilan daerah,” katanya. Tak hanya itu, dalam pengambilan keputusan, MPR mengedepankan musyawarah untuk mufakat. “Seperti dalam pemilihan Pimpinan MPR Periode 2019-2024 dilakukan melalui musyawarah mufakat.” ujarnya. Meski demikian, Syarif menegaskan, voting juga bagian dari demokrasi. “Musyawarah merupakan jalan terbaik dalam demokrasi, namun voting tak mengurangi nilai demokrasi,” tuturnya.

Selanjutnya, Syarif Hasan dalam kesempatan itu meminta masukan dan pendapat dari para akademisi UPR tentang sejauh mana pentingnya melakukan amandemen UUD. “Sebab amandemen menyangkut hajat hidup orang banyak maka MPR perlu melakukan komunikasi dengan rakyat. Karena rakyatlah yang menentukan,” ungkap Syarif Hasan.

Salah satu bentuk komunikasi dengan rakyat adalah meminta pendapat dan masukan dari rakyat terkait wacana amandemen UUD. Dan, salah bentuknya, pimpinan MPR menyambangi kampus-kampus di Indonesia. “Mengapa MPR mengunjungi kampus-kampus?” tanya Syarif Hasan, yang dijawabnya sendiri, “Karena kampus merupakan salah satu *think tank*.” Untuk itulah dia berharap agar civitas akademika UPR bisa memberi masukan, baik secara langsung hari ini ataupun tertulis,” ujar Syarif Hasan.

Keinginan untuk menghidupkan kembali haluan negara model



GBHN, menurut Syarif Hasan, karena ada masyarakat yang berpendapat bahwa pembangunan yang dilakukan saat ini tidak sinergis antara pemerintah pusat dan daerah. Pembangunan yang dilakukan antarpemerintah dan periode menjadi ter-

putus. Sebenarnya dalam melakukan pembangunan terencana sudah ada payung hukumnya, yakni undang-undang. Namun ada pendapat, undang-undang sebagai payung hukum sangat lemah, sehingga perlu payung hukum lebih kuat yang dituangkan

dalam UUD.

Syarief Hasan mengakui, wacana terkait amandemen UUD menimbulkan dinamika, muncul hipotesa dan antitesa. Untuk itu, semua pendapat dan masukan diharap dilakukan secara analisis. “Untuk itu kedatangan kami ingin menggali masukan dan pendapat dari kalangan akademisi UPR,” ujarnya seraya mengucapkan terima kasih atas saran, masukan, dan pendapat dari para akademisi dan mahasiswa UPR. “Semua masukan akan menjadi dokumen resmi MPR,” katanya.



Bertemu Masyarakat Kalteng

Pada hari sama (28/01/2020), bertempat di Aula Eka Hapakat, Lt. 3, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, juga berlangsung pertemuan Wakil Ketua MPR Syarif Hasan dengan masyarakat Kalimantan Tengah yang berasal dari beragam organisasi dan profesi. Pertemuan itu, menurut Syarif Hasan, juga merupakan serap aspirasi terkait wacana

amandemen UUD NRI Tahun 1945 dalam rangka menghidupkan kembali pokok-pokok haluan negara. Hadir dalam acara itu Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Habib Ismail Bin Yahya, beserta jajaran pejabat pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah dan undangan lainnya.

Dalam pertemuan, Syarief Hasan mengungkapkan rasa bahagiannya, karena dalam perjalanan serap aspirasi masyarakat terkait wacana amandemen UUD di Kalimantan Tengah paling banyak dihadiri oleh peserta. “Kehadiran mereka di acara ini merupakan sebuah bukti bahwa ada keinginan untuk membawa bangsa ini menuju ke hal yang lebih baik”, ujarnya.

Keinginan untuk melakukan amandemen terbatas UUD NRI Tahun 1945 sebagai upaya

Ketatanegaraan. “Pimpinan MPR juga melakukan sosialisasi untuk mendengar aspirasi masyarakat”, paparnya. Apapun pendapat yang datang dari masyarakat, baik pro atau kontra, semua dicatat oleh MPR. Pokoknya, dengan komunikasi yang transparan, keputusan yang diambil akan membuat masyarakat menjadi tenteram.

Lebih lanjut, Syarief Hasan menceritakan, haluan negara pertama kali dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada 1957 dan berlanjut pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, dan berakhir pada awal masa reformasi atau setelah UUD diamandemen. “Namun, sekarang, hal itu ingin dihidupkan kembali,” tutur Syarief Hasan.

Keinginan untuk menghidupkan kembali GBHN, menurut Syarief Hasan, karena muncul

pendapat yang muncul. Menurut pria asal Sulawesi itu, semua pandangan masyarakat Kalimantan Tengah yang hadir dalam kegiatan itu akan dicatat dan dijadikan dokumen resmi MPR untuk bahan pengambilan keputusan. “Masukan dan pendapat itu saya catat semua dan akan memperkaya proses pengambilan keputusan soal amandemen dan GBHN,” paparnya.

Setelah melakukan serap aspirasi terkait wacana amandemen UUD NRI Tahun 1945 untuk menghidupkan kembali GBHN di Universitas Palangka Raya dan Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Syarief Hasan melakukan tanam pohon. Tiga pohon ulin ditanam oleh Syarief Hasan didampingi Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Habib Ismail bin Yahya, di ruang hijau Kantor Gubernur



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

untuk menghidupkan kembali haluan negara (GBHN) merupakan rekomendasi MPR periode sebelumnya, yaitu MPR Periode 2009-2014 dilanjutkan MPR periode 2014-2019. Setelah MPR periode 2019-2024 melakukan rapat pleno maka disepakati untuk membuka selebar-lebarnya menampung pendapat masyarakat terkait wacana amandemen UUD tersebut.

Untuk mendengar aspirasi masyarakat seluruh Indonesia, MPR kemudian membagi tugas kepada para pimpinan untuk menyerap aspirasi berdasarkan cluster. “Saya biasa menyerap aspirasi di perguruan tinggi dan pemerintah provinsi”, ungkap Syarief Hasan. Dalam menyerap aspirasi, kata Syarief Hasan, tak bisa dilakukan dalam satu ‘time line,’ karena masalah ini menyangkut hajat rakyat Indonesia. Selain menyerap aspirasi secara masif, lembaga ini juga membentuk Badan Pengkajian MPR dan Komisi Kajian

anggapan dari masyarakat bahwa pembangunan yang dilakukan selama ini tidak nyambung atau tidak terkoneksi. Selama ini, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta antara kepala daerah sebelum dan sesudahnya, juga antarpresiden sebelum dan sesudahnya, dalam pembangunan tidak berkesinambungan. Dengan adanya GBHN diharap jurang itu bisa ditutupi. “Selain itu ada anggapan tak adanya GBHN membuat sering gonta-ganti kebijakan”, paparnya.

Untuk itu, Syarief Hasan menegaskan, dalam memberikan masukan perlu dilakukan secara ilmiah, analisis, dan berdasarkan fakta di lapangan. “Acara seperti ini akan dicatat sejarah bahwa ini merupakan bagian dari perjalanan demokrasi di Indonesia”, ucapnya.

Syarief Hasan tampak mengikuti dinamika yang berkembang dalam pertemuan serap aspirasi yang mulai digelar pukul 14.00 WIB itu. Dia mengikuti satu persatu saran dan

Kalimantan Tengah.

Sebelum melakukan penanaman pohon, Syarief Hasan menyatakan, menghirup udara segar sekarang ini langka, sehingga alangkah berbahagiannya orang Kalimantan Tengah, sebab di provinsi ini masih banyak hutan dan pepohonan yang tumbuh. “Saya sekarang menjadi bagian dari masyarakat Kalimantan karena lewat upacara Suku Dayak saya ditetapkan menjadi bagian dari keluarga Dayak,” tuturnya.

Syarief Hasan menekankan agar setiap kesempatan kita selalu menanam pohon. “Insya Allah bila saya bertandang ke sini lagi, pohon akan semakin besar”, harapnya. Dan, mantan Menteri Koperasi dan UKM berharap, mudah-mudahan penanam pohon ini akan semakin mengukuhkan pandangan, Kalimantan merupakan paru-paru dunia. □

AWG

Senayan, Jakarta

Rapat Pleno II Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

RAPAT Pleno ke-2 Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR berlangsung 12 Februari 2020 di Ruang GBHN, Kompleks MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta. Setelah rapat pleno dibuka oleh Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan, Daryatmo, satu persatu anggota Komisi mengutarakan pendapatnya. Ada yang mengemukakan mengenai berlakunya Ketetapan MPR, soal status DPD RI, rencana amandemen UUD NRI Tahun 1945, dan ada pula wacana mengenai menghidupkan kembali sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN.

Kurang lebih satu jam mendengarkan pendapat yang diutarakan oleh para anggota komisi yang diikuti pula diskusi, lalu pimpinan komisi yang lain, Martin Hutabarat, mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh para peserta rapat pleno itu memperkaya wacana dan dinamika. Dia mengakui, Komisi Kajian Ketatanegaraan dan Badan Pengkajian MPR adalah dua badan/lembaga yang mendukung MPR dalam mengkaji sistem ketatanegaraan. "Hasilnya sama, juga diserahkan kepada pimpinan MPR," ujar mantan anggota MPR dari Fraksi Partai Gerindra itu. Menurut Martin, antara Komisi Kajian dan Badan Pengkajian perlu koordinasi agar jangan sampai hal-hal yang dibahas, didiskusikan, dan

dibincangkan, tumpang tindih.

Kepada para anggota Komisi Pengkajian, Martin menjelaskan, fokus Badan Pengkajian adalah membahas mengenai keinginan melakukan amandemen terbatas terkait menghidupkan kembali haluan negara. Untuk itu, Komisi Kajian menyesuaikan dengan apa yang didiskusikan.

Terkait dinamika yang ada, Martin berharap agar dalam rapat-rapat selanjutnya membahas satu topik yang disepakati, sehingga dalam rapat yang digelar bisa fokus. Dia ingin ada tata tertib dalam rapat sehingga rapat yang dilakukan bisa berguna. Selanjutnya, menurut Martin, Pimpinan Komisi akan merumuskan topik-topik yang akan dibahas dalam setiap rapat.

Apa yang dikatakan oleh Martin didukung oleh Bachtiar Aly, juga pimpinan Komisi Kajian Ketatanegaraan. Menurut mantan anggota MPR dari Fraksi Partai Nasdem itu, sebaiknya Komisi Kajian mengerjakan apa yang ditugaskan pada lembaga itu. "Kita mengerjakan saja apa yang ditugaskan kepada kita," ujar pria asal Aceh itu.

Di awal rapat, Daryatmo membacakan tugas dari Komisi Kajian, seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia Pasal 62. Tugasnya adalah memberikan masukan/pertimbangan/saran/usulan yang berkaitan dengan pengkajian sistem ketatanegaraan; Mengkaji dan merumuskan pokok-pokok pikiran yang berkaitan dengan dinamika masyarakat tentang pemasyarakatan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; Menyerap dinamika aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan tugas; Merumuskan pokok pikiran tentang pelaksanaan Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI dari tahun 1960 sampai dengan tahun 2002, khususnya Pasal 4; dan Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dalam Rapat Gabungan.

Mantan anggota MPR dari Fraksi PDI Perjuangan itu menyebutkan, fokus kajian dan output dari Komisi Kajian Tahun 2020 adalah mengevaluasi status hukum/keberlakuan Ketetapan MPR/MPRS yang masih berlaku. Khususnya yang diatur dalam Pasal 4 Ketetapan MPR No. I/MPR/2003. □

AWG

Sosialisasi Empat Pilar IWAPI

Pimpinan MPR Bangga Kaum Perempuan Indonesia Bangkit



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

PERAN dan kiprah kaum wanita Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata. Bahkan, sejak rakyat Indonesia berjuang mati-matian untuk memperoleh kemerdekaan, peran kaum wanitanya juga sangat penting. Malah banyak tokoh pahlawan nasional berasal dari kalangan kaum wanita.

Di era sekarang, peran tersebut makin gencar, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Peran kaum wanita dapat dikatakan sejajar dengan peran kaum pria dalam mengisi kemerdekaan tanpa harus meninggalkan kodratnya sebagai perempuan, sangat luar biasa.

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan hal itu ketika membuka Sosialisasi Empat Pilar MPR dengan peserta Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) di Gedung Nusantara IV, Kompleks MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta, Senin (10/2/2020).

Bahwa kaum wanita Indonesia saat ini, lanjut Lestari, sudah bangkit dan selangkah lebih maju dalam kehidupan bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara. Yaitu, dengan kiprah luar biasa menjadi pengusaha yang biasanya dominan dilakukan kaum pria.

Lestari mengungkapkan, dari catatan dan survei yang dilakukan, bahwa sekitar 36% perempuan Indonesia usia produktif memilih untuk menjadi pengusaha. "Itu sebuah angka yang cukup membanggakan," kata Lestari..



Lestari Moerdijat

Itu artinya, sebuah langkah maju yang dilakukan kaum perempuan Indonesia. Mereka tidak lagi bergantung hanya mengisi lapangan pekerjaan saja, melainkan sudah mampu menciptakan lapangan kerja. Itu luar biasa.

Bagi Lestari, langkah maju yang dilakukan kaum perempuan Indonesia itu harus dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi untuk masa mendatang. Kiprah kaum wanita mesti mendapatkan dukungan, sebab peran aktif perempuan Indonesia memiliki dampak positif yang sangat luas. Bukan hanya berdampak positif untuk dirinya dan keluarganya sendiri, namun juga untuk lingkungan dan bisa bermanfaat dalam tataran lebih luas buat bangsa dan negara.

Namun, menurut Lestari, ada beberapa hal menjadi catatan yang perlu diketahui, bahwa ada berbagai sebab dan latar belakang yang menjadikan 36% perempuan Indonesia tersebut memilih berwirausaha, salah satunya yakni hampir 60% dari mereka menjadi wirausaha karena terpaksa. "Pada awalnya mereka memulai usaha dikarena-

kan tekanan kehidupan,” ungkapnya.

Pada intinya, Pimpinan MPR dari Partai NasDem ini sangat mengapresiasi kiprah hebat kaum perempuan Indonesia tersebut. Apalagi ada wadah organisasi profesional, seperti IWAPI, yang mampu mendukung, melindungi, dan memberikan semangat untuk terus maju.

“Saya yakin IWAPI bisa menjadi wadah profesional yang akan menarik kaum perempuan Indonesia untuk terus semangat, mampu menjadi pengusaha dan memberikan dampak baik untuk semua,” tandasnya.

Kendala dan Hambatan

Acara Sosialisasi Empat Pilar MPR tersebut berlangsung selama setengah hari, dengan menampilkan dua narasumber, yakni Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad, dan anggota MPR RI dari Kelompok DPD RI, Maya Rumantir.

Selain Ibu Lenny Sri Mulyani, istri Ketua MPR Bambang Soesatyo, juga hadir sebagai tamu kehormatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, I Gusti Ayu Bintang Darmawati, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Ketua Dharma Wanita Persatuan Pusat Emi Guntarti Tjahjo Kumolo, Ketum TP PKK Pusat Tri Suswati Tito Karnavian, Ketum Kowani Giwo Rubianto Wiyogo, Ketua Dewan Pendiri IWAPI Dewi Motik Pramono, serta para pimpinan IWAPI Pusat, serta pimpinan daerah dan cabang IWAPI seluruh Indonesia.

Dalam pemaparannya, Fadel Muhammad mengungkapkan bahwa soal nilai-nilai dalam Pancasila bagi anggota Iwapi yang semuanya cerdas, wanita kekinian pasti sudah paham. Hanya, yang perlu dielaborasi



lagi adalah bentuk implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. “Pancasila adalah intisari nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah melekat sejak dulu. Untuk itu, yang sekarang perlu diperhatikan hanya soal realisasinya dalam kehidupan masing-masing,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Fadel Muhammad menyampaikan beberapa hal terkait beberapa masalah seputar dunia wirausaha perempuan Indonesia. Menurut Fadel, kewirausahaan perempuan Indonesia masih tertinggal berdasar pada laporan dan riset Angel Investment Network Indonesia 2019.

Dalam laporan itu, kata Fadel, disebutkan kewirausahaan wanita Indonesia relatif masih tertinggal dibandingkan dengan sejumlah negara. “Pada 2013, sumbangan UMKM terhadap PDB 9,1%. UMKM perempuan di Indonesia cenderung bergerak di sektor jasa ketimbang sektor manufaktur.

Kecuali produksi makanan. Lalu, UMKM perempuan adalah salah satu yang kurang terlayani oleh sektor keuangan,” terangnya.

Melihat hal itu, Fadel menyatakan, kewirausahaan perempuan Indonesia memang masih menghadapi beberapa tantangan dan masalah, yakni: Keraguan untuk memulai, merasa ide bisnisnya tidak potensial, peran majemuk yang diemban (sebagai istri dan ibu), kurangnya pengetahuan untuk memulai dan mengelola bisnis, dan kurangnya akses terhadap pinjaman modal usaha.

Sedangkan beberapa masalah yang dihadapi, antara lain: Masalah ketersediaan sumber daya (keuangan dan infrastruktur), masalah pemasaran (kerasnya kompetisi), dominasi laki-laki dalam dunia bisnis, keraguan dalam mengambil resiko, rendahnya pendidikan, kurangnya informasi bisnis, dan masalah wanita berkeluarga dalam berusaha. □

DER



Fadel Muhammad



Maya Rumantir

Kerjasama MPR dan Kadin Indonesia

Pokok-Pokok Haluan Negara Memberi Ketenangan Bagi Pengusaha



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

BERTEMPAT di Lt. 9 Gedung Nusantara III, Kompleks MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta, 18 Februari 2020, ditandatangani naskah kerjasama Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika (Empat Pilar MPR), antara MPR dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Naskah kerjasama itu ditandatangani oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo dan Ketua Umum Kadin Rosan Perkasa Roeslani.

Dalam penjelasannya, Bambang Soesatyo menyatakan, kerjasama Sosialisasi Empat Pilar MPR ini menunjukkan, antara MPR dan Kadin mempunyai derap langkah yang sama. "Tugas kita adalah melakukan sosialisasi bersama," ujarnya. Selanjutnya, Bamsoet menegaskan, tidak ada pertentangan ideologi antara Pancasila dan agama. Dia mencontohkan, membayar pajak secara jujur adalah bentuk sikap Pancasila. "Demikian pula, berusaha untuk tidak menyuap juga merupakan sikap Pancasila," ujarnya.

Sebelumnya, Bambang Soesatyo mengucapkan terima kasih atas kedatangan

delegasi Kadin ke MPR dalam rangka menandatangani kerjasama Sosialisasi Empat Pilar MPR. Kepada delegasi Kadin, Bamsoet menjelaskan bahwa MPR periode saat ini menerima warisan (rekomendasi) dari MPR periode sebelumnya untuk melakukan amandemen terbatas UUD NRI Tahun 1945 untuk menghadirkan kembali Pokok-Pokok Haluan Negara.

Jadi, "Amandemen dilakukan hanya untuk menghidupkan kembali Pokok-pokok Haluan Negara, tanpa mengubah pasal-pasal lain," untuk pria yang akrab dipanggil Bamsoet ini. Haluan Negara, menurut Bamsoet, sangat penting. Mengingat selepas era reformasi, pembangunan yang berjalan tak terarah. Ini terjadi, karena arah pembangunan berdasarkan pada visi dan misi presiden,





gubernur, bupati dan walikota.

Karena semua tergantung pada pimpinan yang ada, sehingga proses pembangunan jalan sendiri-sendiri. Banyak program pembangunan bagus, namun program pembangunan itu bisa jadi tak dilanjutkan oleh penerusnya, karena tak ada kewajiban untuk melanjutkan program yang ada. Akibatnya, menurut Bambang, pembangunan yang ada seperti tari poco-poco, maju selangkah mundur selangkah, maju dua langkah mundur dua langkah. "Pembangunan juga tak terintegrasi," ungkapnya.

Bambang mengkhawatirkan bila tak ada haluan Negara, sebab membuat pembangunan tak berkelanjutan. Dia mencontohkan soal pembangunan ibu kota yang baru. Di mana Presiden Joko Widodo hendak membangun ibu kota baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, sebagai Ibu Kota Indonesia dengan sistem tata kota yang modern dan canggih. Namun, bila tak ada haluan negara kebijakan itu belum tentu akan dilanjutkan oleh presiden berikutnya. Untuk itulah di sini perlunya haluan negara agar pembangunan bisa berkelanjutan.

Bamsoet juga menunjuk contoh Singapura dan Cina memiliki haluan Negara, sehingga kedua negara itu bisa membayangkan wajah negaranya 50 tahun hingga 100 tahun ke depan. "Inilah yang membuat pokok-pokok haluan negara menjadi penting," tuturnya.



Pokok-pokok haluan Negara, kata Bamsoet, tak hanya membuat pembangunan berkelanjutan, namun juga memberi ketenangan bagi pengusaha, sebab adanya kepastian arah pembangunan.

Ketua Umum Kadin Rosan Perkasa dalam kesempatan itu mengakui bahwa Empat Pilar sudah terbukti mampu membuat bangsa Indonesia bersatu. Dengan sosialisasi yang hendak dilakukan, dia optimistis selain bisa meningkatkan rasa kebanggaan pada bangsa dan Negara, juga mampu meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Rosan mengakui, bangsa ini terdiri dari

beragam suku, bahasa, agama, dan budaya. Hal itu, menurut Rosan, merupakan kekuatan yang bisa membuat Indonesia besar.

Apalagi, pada 2045 Indonesia diprediksi menjadi kekuatan ekonomi dunia. Untuk menuju atau melangkah menjadi kekuatan ekonomi dunia, menurut Rosan Perkasa, banyak hal yang harus dilakukan. "Pengalaman Empat Pilar sangat mutlak," tegas Rosan seraya menyampaikan Kadin akan melakukan sosialisasi tak hanya di pusat, namun juga di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. □

AWG

Silaturahmi Kebangsaan ke TV One

Aspirasi Masyarakat Didengar, Ditampung, dan Diolah



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

PIMPINAN MPR sepakat setiap pengambilan keputusan semua dilakukan secara musyawarah, sehingga untuk MPR Periode 2019-2024 ini belum pernah dilakukan 'voting'. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua MPR Syarif Hasan saat mengadakan pertemuan dengan pimpinan Stasiun Televisi TV One, di Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur, 20 Februari 2020.

Kunjungan pimpinan MPR ke TV One dalam rangkaian serap aspirasi masyarakat terkait wacana melakukan amandemen UUD NRI Tahun 1945 terhadap keinginan untuk menghidupkan kembali pokok-pokok haluan negara. Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua MPR Bambang Soesatyo, Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad, dan Kabiro Humas Setjen MPR Siti Fauziah. Kedatangan delegasi MPR disambut langsung oleh Dirut TV One, Ahmad R. Whidarmana; Wapemred TV One, Totok Suryanto; serta jajaran pimpinan lain di televisi itu.

Syarief Hasan lebih lanjut mengatakan, saat ini pimpinan MPR gencar melakukan silaturahmi kebangsaan dengan berbagai

kelompok masyarakat, media, dan perguruan tinggi. "Kami gencar melakukan silaturahmi dan komunikasi dengan seluruh rakyat Indonesia", ujarnya. Hal itu dilakukan terkait amanat Rekomendasi MPR periode sebelumnya. Salah satu amanat itu adalah melakukan amandemen terbatas terkait dengan keinginan untuk menghidupkan kembali pokok-pokok haluan negara.

Indonesia, menurut Syarif Hasan, berpenduduk 260 juta lebih. Maka, untuk menyerap aspirasi masyarakat, kata pria asal Sulawesi itu, pimpinan MPR membagi tugas secara segmentasi. "Saya ditugaskan menyerap aspirasi di kampus-kampus di seluruh Indonesia, juga pemerintah provinsi", ungkapnya. Selain itu, Pimpinan MPR juga melakukan serap aspirasi ke berbagai me-





dia massa, ormas keagamaan, dan partai politik. Dalam menjalankan tugas serap aspirasi, menurut Syarif Hasan, pimpinan MPR dibantu oleh Badan Pangkajian MPR dan Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR.

Terkait pokok-pokok haluan negara, mantan Menteri Koperasi dan UKM pada masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu mengatakan, haluan negara sudah ada sejak Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto. Setelah UUD diamandemen, rencana pembangunan pada masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dituangkan dalam undang-undang. “Aturan yang ada sebenarnya

sudah sangat jelas dalam soal pembangunan”, ucapnya. Meski sudah ada haluan pembangunan, namun diakui dalam undang-undang itu tak ada sanksi bila kepala daerah tidak menjalankan arah pembangunan dari undang-undang.

Belajar dari pengalaman itu akhirnya ada keinginan untuk memasukkan haluan negara dalam konstitusi. Namun, keinginan itu menimbulkan pertanyaan dan implikasi. Pertanyaannya adalah siapa yang akan membuat haluan negara. Sedang implikasinya, jelas Syarif Hasan, bisa mengubah sistem ketatanegaraan, yaitu bila Presiden menjalankan pokok-pokok haluan

negara lewat Ketetapan MPR maka hal itu akan membuat posisi Presiden di bawah MPR. Bila itu terjadi maka MPR akan menjadi lembaga tertinggi kembali. Di samping implikasi lainnya.

Untuk itulah MPR menyerap berbagai aspirasi masyarakat terkait keinginan melakukan amandemen UUD guna menghidupkan kembali pokok-pokok haluan negara. Dalam menyerap aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat, menurut Syarif Hasan, MPR lebih banyak mendengar. Namun, tambahnya, apapun pandangan masyarakat akan dikaji dan dicatat. “Kita betul-betul mendengar apa yang disampaikan oleh masyarakat,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Fadel Muhammad menuturkan, dalam melakukan serap aspirasi ke berbagai kelompok masyarakat berbagai pikiran yang berkembang saat wacana amandemen UUD digulirkan. Dia menyebut, munculnya keinginan untuk menghidupkan kembali utusan golongan. Namun, kata mantan Gubernur Gorontalo itu, semua pikiran yang ada akan ditampung dan diolah. Semua itu sebagai bagian dalam proses demokratisasi. “Kita pimpinan MPR ingin mengambil peran dalam proses itu”, ucapnya. □

AWG



Universitas Universal Batam

Fadel Muhammad: Tanpa Ideologi Seperti Badan Tanpa Nyawa



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

DI HADAPAN ratusan mahasiswa, rektor, dan dosen Universitas Universal, Kota Batam, Kepulauan Riau, 24 Februari 2020, Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad mengatakan, acara yang digelar di Aula Kampus itu merupakan kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika atau 4 Pilar MPR). “Ini merupakan salah satu tugas MPR di samping tugas-tugas yang lain”, ujarnya.

Fadel menegaskan, bangsa ini harus memiliki ideologi di mana ideologi itu mampu sebagai perekat persatuan. “Bila suatu negara tidak memiliki ideologi maka bangsa itu akan goyah,” ungkap mantan Gubernur Gorontalo itu. Ideologi di masing-masing Negara, katanya lebih lanjut, adalah beragam, ada yang sosialis, komunis, liberalis, dan kapitalis.

Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang plural atau majemuk, terdiri dari beragam suku, bahasa, agama, bahasa, dan budaya. Dari sinilah, menurut Fadel, lahirlah Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa harus menjadi landasan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi

setiap orang Indonesia. “Setiap orang harus memiliki ideologi Pancasila, tanpa ideologi seperti badan tanpa nyawa”, ucapnya.

Selain Pancasila, menurut Fadel, bangsa Indonesia harus menjadikan UUD sebagai pegangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seluruh aturan yang ada harus berlandaskan pada konstitusi. “Tak boleh ada

aturan yang bertentangan dengan UUD”, paparnya. Bila ada aturan, undang-undang yang bertentangan dengan UUD, kata Fadel, mahasiswa dan masyarakat bisa mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). “Banyak pasal dalam undang-undang telah dibatalkan oleh MK”, tuturnya.

Dalam bentuk negara, Fadel mengakui ada





perdebatan. Ada yang ingin federal, serikat, dan bentuk lainnya. Setelah berdebat secara dinamis dan berkembang, akhirnya bangsa Indonesia memilih bentuk NKRI. “Akhirnya kita bersepakat dengan bentuk negara kesatuan,” papar alumni ITB itu. Meski demikian, bangsa ini beragam dan terdiri dari berbagai suku, seperti Jawa, Sunda, Gorontalo, Madura, Bali, Batak, Minang, dan lain sebagainya. Demikian dalam masalah bahasa juga beraneka. Terkait keragaman, para pendiri bangsa mencari slogan apa yang bisa menyatukan keragaman itu sehingga diambil kalimat ‘Bhinneka Tunggal Ika’. “Berbeda-beda tetapi satu”, ucapnya. Dari kesemua pilar MPR, Fadel menegaskan, agar menyatu pada diri kita.

Dinamika masyarakat dalam merespon wacana amandemen ditegaskan oleh Fadel bahwa amandemen hanya sebatas pada menghidupkan pokok-pokok haluan negara. Haluan Negara, menurut Fadel, sudah ada sejak zaman Presiden Soekarno yang disebut sebagai Pembangunan Semesta. Pada masa Presiden Soeharto disebut GBHN. “Sekarang kita bikin pokok-pokok haluan negara”, ucapnya. Dalam pokok-pokok haluan negara dirancang pembangunan 25 tahun hingga 50 tahun. Pada masa Presiden Soeharto dulu ada Repelita



(rencana pembangunan lima tahun).

Saat ini, kata Fadel, landasan pembangunan yang dijalankan oleh presiden, gubernur, bupati, dan walikota berdasarkan pada visi dan misi, sehingga di antara mereka terkadang ada yang bertentangan atau tidak sinkron. “Inilah yang kita khawatirkan,” ujarnya.

Sebagai seorang yang pernah menduduki berbagai jabatan dan profesi, seperti pengusaha, gubernur, menteri, dan sekarang Wakil Ketua MPR, dalam kesempatan tersebut, Fadel mendorong agar sumber daya manusia bangsa ini semakin bagus dan maju. Ia berharap agar lulusan Universitas Universal kreatif setelah lulus dari kuliah.

Dia ingin lulusan perguruan tinggi lebih berorientasi pada jiwa kewirausahaan. “Kita harus berpikir bagaimana bisa menciptakan lapangan kerja”, paparnya. Jiwa orang yang berwirausaha dengan orang yang sekadar bekerja berbeda. Orang yang punya jiwa berwirausaha adalah orang yang mempunyai gagasan dan pikiran, ada peluang apa di masyarakat. “Peluang yang ada itu ingin dimanfaatkan”, ucapnya. Sebagai pimpinan MPR dari Kelompok DPD, Fadel ingin semangat kewirausahaan itu diimplementasikan dalam membangun daerah. “Orang yang unggul adalah mereka yang mempunyai pikiran kewirausahaan”, ucapnya. □

AWG

LCC Empat Pilar Bikers

Agar Pancasila Berada di Semua Relung Hati



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

BERTEMPAT di depan Gedung Nusantara, Kompleks MPR/DPR/DPD RI Senayan, Jakarta, 23 Februari 2020, digelar grandfinal Lomba Cerdas Cermat Riding Kebangsaan Empat Pilar MPR. Hadir dalam acara itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Ketua MPR Bambang Soesatyo, Ketua DPR Puan Maharani, Jaksa Agung S. T Burhanuddin, para Wakil Ketua MPR: Ahmad Basarah, Lestari Murdijat, Hidayat Nur Wahid, Zulkifli Hasan, Arsul Sani, Fadel Muhammad; serta para undangan VVIP, dan ribuan bikers dari berbagai klub dan dari berbagai kota.

Bambang Soesatyo kepada wartawan mengatakan, hari ini (23/2/2020) merupakan grandfinal dari Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR dengan peserta para bikers. Mereka yang menjadi peserta kegiatan ini tercatat 86 klub motor, dan setiap klub diwakili sepuluh (10) peserta. Menurut pria yang akrab disapa Bamsoet, LCC Empat Pilar MPR dengan peserta para bikers merupakan salah satu metoda Sosialisasi Empat Pilar MPR.

"Kita masuk dalam komunitas bikers yang jumlahnya jutaan guna memasyarakatkan

Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika", paparnya. Dari sini, Bamsoet berharap, para penggemar atau penghobi sepeda motor ini bisa menularkan nilai-nilai Empat Pilar kepada masyarakat. Selepas Lebaran nanti, kata Bamsoet, MPR akan menggelar Jambore Kebangsaan dengan peserta para anggota komunitas bikers dan para ojek online. "Akan kita gelar di

Bumi Perkemahan Cibubur," ungkapnya.

Bagi Bamsoet, sosialisasi yang digelar oleh MPR ini ditujukan kepada seluruh masyarakat. Dia menyatakan, akan melibatkan semua. Jadi, nantinya tak hanya bikers tapi juga pesepeda, pesantren, dan kelompok masyarakat lainnya. Metoda Sosialisasi Empat Pilar, menurut Bamsoet, tidak hanya dengan cara masuk ke dalam komunitas-



komunitas yang ada di masyarakat, namun MPR selanjutnya juga akan menggunakan tiktok untuk melakukan sosialisasi. “Sedang sosialisasi kepada para mahasiswa dan pelajar tetap terus berjalan”, tegasnya.

Lebih lanjut Bamsuet menyatakan, LCC

Empat Pilar MPR ini tidak hanya mencari siapa pemenang semata, akan tetapi juga sebagai upaya dan ikhtiar bersama dalam mengembangkan budaya sadar akan nilai-nilai kebangsaan; sadar akan kekuatan bangsa; serta kebanggaan menjadi Indonesia,

utamanya bagi para generasi penerus bangsa. “Tertib di jalan raya, tidak melanggar lalu lintas, tidak gagah-gagahan atau ugul-ugulan, zero accident, tolong-menolong, sikap solidaritas, setia kawan, semangat persatuan dan kesatuan serta gotong-

Wakil Presiden Ma'ruf Amin

Apresiasi MPR Memperluas Jangkauan Empat Pilar



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

SAAT memberi sambutan dalam acara grandfinal Lomba Cerdas Cermat Riding Kebangsaan Empat Pilar MPR di Kompleks MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta (23/2/2020), Wakil Presiden Ma'ruf Amin sembari tersenyum mengatakan bahwa seumur hidup baru kali ini menggunakan jaket bikers. “Ini demi sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika (4 Pilar)”, ujarnya.

Pada hari itu, MPR mengadakan Sosialisasi Empat Pilar MPR dengan metoda Lomba Cerdas Cermat (LCC) dengan peserta para bikers yang datang dari 86 klub motor dari berbagai kota. Lomba cerdas cermat dengan peserta para bikers merupakan salah satu metoda Sosialisasi Empat Pilar MPR.

Acara itu dihadiri oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo, Ketua DPR Puan Maharani, Jaksa Agung S. T Burhanuddin, para Wakil Ketua MPR: Ahmad Basarah, Lestari Murdijat, Hidayat Nur Wahid, Zulkifli Hasan, Arsul Sani, Fadel Muhammad; serta para undangan VVIP dan serta ribuan bikers dari berbagai klub dan datang dari berbagai kota,

Selanjut, Maruf Amin dalam pidatonya menuturkan, bangsa ini mempunyai visi ke depan dengan orientasi kesejahteraan sosial. Untuk mencapai visinya, Indonesia mempunyai program-program pembangunan. Seperti pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, dan reformasi birokrasi.

Untuk mencapai tujuan itu, kata Ma'ruf Amin, bangsa ini dihadapkan berbagai tantangan, seperti adanya kemiskinan. Selain itu, sekarang ini persaingan antarbangsa juga semakin tajam. “Untuk itulah pembangunan sumber daya manusia yang unggul menjadi perhatian pemerintah,” katanya.

Maruf Amin menegaskan, bangsa ini memerlukan komitmen

kebangsaan yang kuat. Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika atau Empat Pilar MPR merupakan kesepakatan bangsa Indonesia. “Empat Pilar merupakan kesepakatan untuk tujuan berbangsa dan bernegara”, ucapnya secaya menegaskan bahwa Indonesia terbentuk karena kesepakatan itu. “Kesepakatan yang ada merupakan potensi yang besar, karenanya harus dijaga dan dilaksanakan,” paparnya.

Selanjutnya, Ma'ruf Amin menegaskan, untuk menjaga kesepakatan itu maka kita harus membangun narasi yang mempersatukan dan merukunkan. “Untuk itulah saya mengapresiasi MPR yang memperkaya metoda dan memperluas jangkauan Sosialisasi Empat Pilar”, ujarnya.

Sementara Wakil Ketua MPR Arsul Sani, dalam kesempatan itu mengatakan, LCC Empat Pilar MPR dengan peserta para bikers ini merupakan ikhtiar MPR untuk menyosialisasikan Empat Pilar dengan cara berbeda. Dia mengakui, selama ini sosialisasi Empat Pilar cenderung berada dalam ruang tertutup dan sifatnya kalau tidak dialogis ya formal.

Maka, katanya lebih lanjut, MPR periode 2019-2024 akan memperluas tata cara, gaya, dalam menyosialisasikan Empat Pilar MPR. Jadi, tidak hanya memperluas kelompok masyarakat tetapi juga memperkaya modelnya. “Seperti kita lihat hari ini diselenggarakan di luar ruangan”, paparnya.

Selain itu, menurut pria asal Pekalongan, Jawa Tengah, ini juga akan mencakup segmen masyarakat yang lebih luas. Jadi, Sosialisasi Empat Pilar harus dimasyarakatkan ke seluruh kelompok masyarakat. “Dengan memasyarakatkan kepada semua kelompok membuat kehidupan berbangsa dan bernegara akan menjadi baik”, tuturnya. □

AWG

royong juga cerminan dari pengamalan Pancasila”, ungkap Bamsuet.

Filosofi Bikers

Jadi, menurut Bamsuet, banyak filosofi bikers yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan keseharian. Seorang biker mesti visioner melihat ke depan, sehingga sigap dan responsif menghadapi kondisi jalan di depan. Bikers wajib punya kontrol diri yang akurat, paham kapan harus menginjak rem, dan kapan harus menekan gas. Bikers pun harus menjaga solidaritas dan kebersamaan, menunggu kawan yang tertinggal di belakang, dan mengingatkan teman yang melaju terlalu kencang di depan. Di dalam komunitasnya, bikers juga mesti bergotong-

tagline Bikers Indonesia yaitu *Bersatu itu, keren!*”

Modifikasi sosialisasi

Dalam kesempatan sama, Ahmad Basarah mengatakan, selama dua hari, yaitu 22 dan 23 Februari 2020, MPR mengadakan Sosialisasi Empat Pilar MPR dengan komunitas motor. “Sosialisasi ini kami kemas seperti ini dalam rangka semakin optimalkan peran, fungsi, dan tanggung jawab MPR, khususnya dalam rangka menyosialisasikan nilai-nilai luhur berbangsa bernegara, Empat Pilar,” kata Basarah kepada para wartawan.

Acara LCC Empat Pilar dengan peserta para bikers ini, menurut Basarah, merupakan

Lewat Sosialisasi Empat Pilar, Basarah ingin Pancasila hidup di komunitas masyarakat. Sama seperti yang diungkapkan oleh Bamsuet, ke depan MPR juga akan mengadakan kerja sama sosialisasi dengan para santri, penggemar burung, penggemar wayang golek, dan lain sebagainya. “Kita harapkan MPR pada periode ini kegiatan sosialisasi yang dilakukan betul-betul membumi di tengah-tengah masyarakat”, tegasnya.

Basarah juga berharap, selepas acara ini akan mendorong bikers agar semakin mengedepankan kesetiakawanan sosial, membantu saudara-saudara yang kesusahan karena bencana. “Dengan demikian tidak ada lagi kesenjangan antara masyarakat yang punya dan yang tidak punya. Karena



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

royong, saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Bagi setiap bikers, nilai gotong-royong adalah nafas komunitas yang menyatukan mereka dalam ikatan kebersamaan.

Dengan jumlah keanggotaan bikers yang sangat banyak, termasuk bikers yang tergabung dalam ojek online yang tersebar di berbagai wilayah, dan dengan semangat ‘brotherhood’ yang solid, para bikers diharapkan akan menjadi duta kebangsaan yang akan membantu menyebarkan nilai-nilai Empat Pilar kepada anggota komunitasnya masing-masing, dan selanjutnya kepada lingkungan masyarakat sekitarnya.

Untuk itu, Bamsuet berpesan agar para bikers tidak terkontaminasi oleh paham-paham radikalisme dan terpapar ideologi transnasional yang dapat memecah belah bangsa, karena itu tidak sesuai dengan

salah satu bentuk modifikasi metoda sosialisasi dengan tujuan membuat Pancasila agar selalu berada di semua relung hati dan pikiran sanubari seluruh segmen dan kelompok-kelompok yang ada di masyarakat. “Kali ini kita sengaja mengadakan kerja sama dengan klub motor untuk menyelenggarakan sosialisasi lewat cerdas cermat”, tuturnya. Turut terlibat dalam acara itu, menurut Basarah, seluruh komunitas motor, tidak hanya motor gede namun juga motor cc kecil, bahkan para ojek online.

Dengan kegiatan ini, Ketua PA GMNI itu berharap, nilai-nilai yang selama ini hidup di komunitas motor, seperti solidaritas, gotong-royong, kesetiakawanan sosial, menjadi budaya dalam berkendara di jalan raya. “Nilai-nilai seperti itulah yang kemudian kita kembangkan kepada komunitas motor yang lain”, harapnya.

Pancasila-lah yang menyatukan kita”, paparnya.

Sementara Ketua Panitia, Nico Marcelino, mengatakan, merupakan suatu kehormatan dipercayakan untuk menyelenggarakan Sosialisasi Empat Pilar dengan metode Lomba Cerdas Cermat MPR para bikers ini. “Kami dari penghobi sepeda motor roda dua bergabung tanpa ada batasan,” ujar Nico. Dan, “Kami berkumpul di sini berbaur satu sama yang lain untuk menjalin silaturahmi”, tambahnya.

Grandfinal lomba cerdas cermat ini menampilkan tiga regu, yakni: Regu A dari Baikers HD; Regu B dari HDCI Jakarta; dan Regu C dari Bromphit. Setelah bertanding selama dua babak, akhirnya Regu B keluar sebagai pemenang lomba dengan nilai 185, sedang Regu A menjadi Juara II dengan nilai 150, dan Regu C menjadi Juara III dengan nilai 145. □

AWG

Kunjungan Siswa MIN I Kota Malang

Anggota MPR, Moreno Soeprapto, Paparkan Fungsi Parlemen

SEBANYAK 282 siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) I Kota Malang, Jawa Timur, bersama 20 guru pendamping, pada 31 Januari 2020 melakukan wisata belajar atau *study tour* ke MPR. Kedatangan mereka di Gedung MPR, Senayan, Jakarta, disambut langsung oleh anggota MPR dari Fraksi Partai Gerindra Moreno Soeprapto dan Kepala Biro Humas MPR Siti Fauziah.

Dalam pertemuan yang digelar di Gedung Nusantara V, Moreno mengucapkan selamat datang kepada delegasi dari MIN Kota Malang. "Selamat datang adik-adik yang saya cintai", ujarnya. "Kedatangan adik-adik dari Malang sudah saya tunggu-tunggu", tambahnya. Moreno mengaku, telah mendengar rencana kedatangan para siswa MIN Kota Malang ini sejak satu bulan lalu. Politisi yang pernah berprofesi sebagai pembalap itu sangat senang menerima kedatangan siswa dan guru MIN di kompleks MPR.

Pria kelahiran 14 November 1982 itu lalu memberi semangat kepada

membuat undang-undang para wakil rakyat mendengar aspirasi dari rakyat. "Sudah banyak undang-undang yang dibuat oleh DPR", ujarnya seraya menyebut undang-undang yang telah dibuat oleh DPR. "Undang-undang yang telah dibuat dalam berbagai hal," ungkapnya.

Moreno sadar bahwa mereka (para siswa) adalah warga bangsa yang belum memiliki hak suara dalam dunia politik. Meski demikian, ia memberi pemahaman sekaligus menjawab pertanyaan salah seorang siswa tentang bagaimana memilih pemimpin yang baik dan bijaksana, mengingat dalam Pemilu ada puluhan partai politik dan ribuan calon anggota legislatif, meliputi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta calon anggota DPD. Untuk itu, Moreno berharap, masyarakat membaca dan mencari informasi tentang sosok-sosok calon yang ada, agar diketahui rekam jejak mereka. Dari sinilah masyarakat bisa menentukan sosok-sosok yang



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

para siswa. "Kalian adalah generasi penerus bangsa", tegasnya. Sebagai generasi penerus bangsa harus terus dan tetap bersemangat. "Dua puluh tahun yang akan datang kalian yang menggantikan kita," ungkap Moreno. Saat itu, lanjut Moreno, adik-adik sebagai warga bangsa Indonesia mendapat kesempatan untuk menjadi apa saja. Untuk itu, dia mendorong agar para siswa mengembangkan cita-citanya. "Ada yang ingin menjadi pembalap, ada yang ingin jadi presiden?" katanya.

Selanjutnya, Moreno menjelaskan bahwa dia adalah anggota DPR yang berasal dari Dapil Malang Raya. Sebagai anggota MPR, ia berasal dari unsur partai politik. "Di MPR ada anggotanya berasal dari unsur partai politik, ada pula dari unsur daerah", ujarnya. "Bila adik-adik ingin menjadi anggota DPR maka kalian wajib masuk partai politik", paparnya. Moreno menjelaskan, anggota MPR merupakan gabungan dari anggota DPR dan DPD. DPR merupakan lembaga yang merepresentasikan partai politik, sedang DPD merepresentasikan daerah.

Selanjutnya, Moreno menjelaskan tentang wewenang MPR. Kewenangan MPR antara lain adalah mengubah dan menetapkan Undang Undang Dasar. Beda dengan DPR yang fungsinya, di antaranya membuat undang-undang sebagai dasar hukum atau landasan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Untuk

bisa diharapkan. "Pilihlah pemimpin yang jujur, amanah, dan berintegritas. Agar bisa memperjuangkan hak-hak kalian," tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Siti Fauziah menjelaskan, pimpinan MPR periode 2019-2024 ada sepuluh orang. "Mereka merepresentasikan seluruh kekuatan partai politik yang lolos 'parlement threshold,' ditambah unsur DPD", ujarnya. Jumlah anggota MPR sebanyak 711 orang, berasal dari anggota DPR sebanyak 575 orang, dan dari anggota DPD 136 orang.

Sama seperti yang diungkapkan Moreno, Siti Fauziah juga gembira atas kedatangan delegasi MIN Kota Malang. "Kalian ke sini langsung mengunjungi tiga lembaga negara di bidang legislatif, yakni MPR, DPR, dan DPD", paparnya. Di kompleks ini, menurut Siti Fauziah, ada gedung yang digunakan para wakil rakyat untuk berkantor dan bersidang. Dia lalu menyebut gedung-gedung itu, yaitu: Gedung Nusantara, Gedung Nusantara I, Nusantara II, Nusantara III, Nusantara IV, dan Nusantara V. "Di tempat adik-adik sekarang ini merupakan gedung yang biasa digunakan oleh DPD untuk bersidang," jelasnya. "Sedang Gedung Nusantara atau gedung hijau merupakan ikon dari parlemen Indonesia", tambahnya. Lembaga MPR, menurut Siti Fauziah, didukung oleh berbagai fasilitas, salah satunya Perpustakaan. "MPR memiliki perpustakaan yang koleksinya komplit", tuturnya. □

AWG

Kunjungan FH. Universitas Galuh, Memperdalam Ilmu di MPR

SEBANYAK 114 mahasiswa dan 14 dosen dari Fakultas Hukum (FH) Universitas Galuh, Ciamis, Jawa Barat, pada 30 Januari 2020, berkunjung ke MPR. Kedatangan mereka ke Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, menurut Ketua Delegasi Universitas Galuh, Enjun Juanda, merupakan kegiatan rutin dilaksanakan setiap tahun. Dia berharap, kedatangan rombongan yang menggunakan tiga bus langsung dari Ciamis ke MPR dengan maksud untuk mendapat pencerahan sesuai dengan ilmu yang ditekuni. “Kami mengucapkan terima kasih atas sambutan yang diberikan,” ungkap Enjun dengan riang begitu tiba di MPR.

Kedatangan delegasi Fakultas Hukum Universitas Galuh disambut oleh Kabag Hukum Setjen MPR, Indro Gutomo. Selain mengucapkan selamat datang di MPR, Indro juga menceritakan dirinya saat masih mahasiswa yang juga melakukan study tour ke MPR. “Kehadiran kalian ke MPR ini mengingatkan saya 23 tahun yang lalu,” tutur pria asal Yogyakarta itu.

Sebagai alumni Fakultas Hukum UGM, Indro mengatakan, ilmu-ilmu yang ditimba di kampus bisa diterapkan di Kesenjangan MPR. Meski demikian, ilmu hukum dalam teori dan praktik, penerapannya



jauh berbeda. “Ada seni untuk menyikapi gap dua hal itu”, tuturnya.

Kedatangan Universitas Galuh, lanjut Indro, merupakan salah satu bentuk kerja sama MPR dengan berbagai perguruan tinggi. MPR telah bekerja sama dengan berbagai pihak, terutama dalam hal melakukan Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta kajian konstitusi.

Selanjutnya, kepada delegasi Fakultas Hukum Universitas Galuh,

Siswa SMA Negeri 1 Warunggunung, Banten, Berkunjung ke MPR



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

GEDUNG Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa pagi (11/2/2020) dipenuhi sekitar 226 pelajar bersama 14 guru pendamping SMA Negeri 1 Warunggunung, Lebak, Banten. Kedatangan rombongan diterima oleh Plt. Kepala Bagian Pemberitaan, Hubungan Antarlembaga, dan Layanan Informasi Biro Humas Sekretariat Jenderal MPR RI, Budi Muliawan.

Pimpinan rombongan Yenny Herawati dalam kata pengantarnya menyampaikan apresiasi atas penerimaan rombongan yang sangat hangat dari MPR. “Terus terang, kami para guru dan siswa baru pertama kali ini mengunjungi dan masuk ke gedung yang sangat terkenal ini. Kami semua merasa sangat terhormat atas penerimaan dari MPR,” katanya.

Tujuan kedatangan rombongan, lanjut Yenny, adalah dalam rangka kunjungan pendidikan untuk menambah wawasan anak didik, terutama tentang kenegaraan. “Harapan kami, anak didik kami mengetahui secara langsung sejarah parlemen bangsanya sendiri, terutama tentang sejarah, fungsi, dan tugas-tugas MPR RI,” ujarnya.

Budi Muliawan di hadapan siswa dan para guru pembimbing mengucapkan selamat datang kepada para tamunya ini. “Selamat datang di Rumah Rakyat Indonesia, kompleks MPR/DPR/DPD RI, tepatnya di Ruang Sidang Gedung Nusantara V,” sapanya.

Alumni Fakultas Hukum Universitas Brawijaya ini mengungkapkan bahwa sebagai rumah rakyat, MPR sangat terbuka dalam menerima kunjungan dari masyarakat. “Jadi jangan sungkan-sungkan, ini rumah kita semua, anggap saja rumah sendiri,” tambahnya.

Selanjutnya, dalam kesempatan itu, Budi Muliawan menjelaskan seputar MPR RI. Dia mengatakan, MPR adalah salah satu dari tiga lembaga negara yang ada di lingkungan Parlemen, dua lainnya adalah DPR dan DPD. Untuk keanggotaan, DPR dan DPD memiliki anggota masing-masing, sedangkan MPR anggotanya terdiri dari anggota DPR dan DPD.

Ketiga lembaga tersebut memiliki tugas dan kewenangannya masing-masing. Salah satu tugas dan kewenangan MPR adalah mengubah dan menetapkan UUD. “Tugas dan wewenang MPR ini sangat istimewa dan penting, sebab UUD adalah sumber hukum tertinggi di negara kita. UUD juga merupakan panduan kita dalam berperilaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan hanya MPR yang memiliki kewenangan tersebut,” terangnya.

Kewenangan MPR lainnya, lanjut Budi Muliawan, melantik Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum. Pemaparan tentang



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Indro menjelaskan, MPR saat ini dipimpin oleh 10 orang. Mereka berasal dari berbagai partai politik yang lolos parliamentary threshold ditambah dengan utusan dari DPD. Sepuluh pimpinan MPR, menurut Indro, merupakan upaya untuk mewujudkan MPR sebagai lembaga musyawarah dan mufakat, sehingga seluruh kekuatan partai politik dan DPD hadir. “Dengan jumlah pimpinan sebanyak itu tak ada aturan yang dilanggar”, tegas Indro.

Indro juga menjelaskan bahwa pimpinan MPR masif menjangar aspirasi masyarakat terkait wacana amandemen UUD NRI Tahun 1945 untuk menghidupkan kembali sistem perencanaan pem-

angunan nasional model GBHN. Menjangar aspirasi ditempuh berbagai cara, ada yang datang langsung ke kampus-kampus, ada pula kampus yang datang ke MPR. Keinginan untuk menghidupkan kembali haluan negara, menurut Indro, agar bangsa ini memiliki pedoman dalam pembangunan sehingga pembangunan bisa berkelanjutan. Namun diingatkan, hal demikian bisa membuat MPR menjadi lembaga tertinggi, sebab haluan itu akan mengatur semua lembaga negara.

Saat sesi tanya jawab dibuka, ada sembilan mahasiswa yang menggunakan waktu itu untuk mengajukan pertanyaan. Di antara mereka ada yang menanyakan, tentang kemungkinan perempuan menjadi pimpinan MPR? “Bisa”, jawab Indro. Selama ini, jelas Indro, sudah banyak lembaga negara yang dipimpin oleh seorang perempuan. Dia mencontohkan, Ketua DPR saat ini dijabat oleh Puan Maharani. Di MPR sendiri, diungkapkan oleh Indro, sudah sering ada unsur perempuan menjadi pimpinan. Mulai dari Moeryati Soedibjo, Melani Leimena Suharli, dan sekarang Lestari Moerdijat.

Ada juga yang bertanya bagaimana cara mencintai NKRI. Indro mengatakan, untuk mencintai NKRI caranya banyak. Cinta NKRI dalam bentuk terkecil dan penting adalah mencintai keluarga sendiri. Dari sinilah muncul rasa nyaman di masyarakat. □

AWG

kelembagaan MPR berlangsung dinamis dan interaktif. Budi Muliawan sebagai pemateri utama memberikan kesempatan kepada para pelajar untuk mengajukan pertanyaan, masukan atau gagasan.

Tawaran tersebut langsung disambut antusias pada siswa. Junaidi, siswa kelas 10 IPA II, misalnya, menanyakan tentang MPR sebagai lembaga yang tidak lagi memiliki wewenang untuk menetapkan GBHN. Pertanyaan siswa tersebut langsung direspon oleh pemateri, yang menjelaskan bahwa kewenangan MPR terkait GBHN dihilangkan ketika ada amandemen terhadap konstitusi yang dilakukan oleh MPR pada 1999 sampai dengan 2002.

Hal tersebut, untuk menjawab semangat reformasi tentang pemerlakuan *check and balances*. Sebab, pasca perubahan UUD semua lembaga negara kedudukannya menjadi sejajar atau seimbang, sehingga *check and balances* dipandang perlu.

Dalam perjalanan waktu, sejak 2009 hingga 2020 ini ternyata ada wacana besar dari masyarakat yang menyatakan perlu adanya haluan negara di Indonesia. Karena, dengan tidak adanya haluan negara, tidak ada jaminan pembangunan nasional berjalan berkelanjutan.

Maka untuk menjawab keinginan itu, MPR berkeliling melakukan safari kebangsaan ke berbagai elemen masyarakat Indonesia, seperti para tokoh bangsa, pimpinan parpol, pimpinan ormas, pimpinan organisasi keagamaan, media massa, dan lainnya, untuk meminta masukan apakah dimungkinkan MPR merumuskan kembali haluan negara.

“Dari safari kebangsaan yang dilakukan MPR tersebut, ternyata ada tendensi kuat menunjukkan bahwa ada keinginan menghidupkan kembali haluan negara. Haluan negara yang sifatnya makro, umum, bukan hanya memberikan haluan kepada Presiden, tetapi juga memberikan haluan kepada seluruh lembaga negara yang ada,”



jelas Budi Muliawan.

Pertanyaan juga diajukan oleh Dila Siska Syafila, siswi kelas 10 IPS I. Pertanyaannya seputar program MPR lima tahun ke depan. Pemateri menjelaskan, lima tahun ke depan MPR program kerja MPR, antara lain melakukan serap aspirasi masyarakat terkait usulan yang berkembang di masyarakat. Lalu, program selanjutnya tetap menjalankan Sosialisasi Empat Pilar MPR yang terdiri dari Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

Di akhir sesi, Budi Muliawan mewakili MPR RI berharap agar kunjungan rombongan ke MPR serta pemaparan materi tentang MPR bisa bermanfaat, sekaligus menambah wawasan pengetahuan buat para pelajar. □

DER



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Syaifulah Tamliha, Anggota Komisi I DPR

WNI Eks ISIS Perlu Divalidasi

RENCANA atau wacana pemulangan Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi kombatan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) menuai polemik. Memang, sejak konflik meletus di Suriah pada 2011, sejumlah WNI secara sukarela melakukan perjalanan ke zona konflik itu dan terlibat dalam perang di Suriah. Dari data media, setidaknya terdapat 689 WNI yang menjadi kombatan ISIS dan hingga kini masih berada di wilayah Suriah dan Turki. Sebagian dari mereka tidak memiliki identitas.

Pemerintah Indonesia dengan berbagai pertimbangan akhirnya memutuskan dengan tegas untuk tidak melakukan pemulangan terhadap WNI tersebut. Keputusan itu diambil dalam rapat kabinet yang digelar tertutup di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/2/2020). Dengan demikian 689 ISIS eks WNI yang tersebar di sejumlah wilayah, seperti Turki dan Suriah tidak akan dipulangkan ke Indonesia. Meski demikian, pemerintah masih membuka peluang bagi kepulangan anak-anak WNI eks ISIS.

Menyikapi penolakan kepulangan WNI eks anggota ISIS, Majelis mewawancarai

anggota MPR dari Fraksi PPP, Syaifulah Tamliha. Berikut petikan wawancara Majelis dengan anggota Komisi I ini.

Pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk menolak kepulangan WNI eks ISIS ke Tanah Air. Pemerintah sedang melakukan kajian lebih mendalam terhadap larangan ini. Bagaimana tanggapan Bapak?

Memang, kita dengar pemerintah sudah mengambil keputusan untuk sementara menolak mereka WNI eks ISIS kembali ke Indonesia. Keputusan pemerintah ini tentu setelah mendengarkan pendapat dan saran dari Ormas-Ormas Islam di Indonesia. Jangan sampai gara-gara WNI eks ISIS yang jumlahnya 600-an lebih itu membuat rusak susu sebelanga.

Tapi yang perlu dicatat adalah bahwa sebenarnya sudah banyak eks ISIS yang kembali ke Indonesia sebelum UU Tindak Pidana Terorisme itu direvisi. BNPT dan BIN perlu memantau mereka yang sudah kembali sebelum UU itu direvisi atau sebelum tahun 2019. Pada tahun 2018 – 2019, banyak juga mereka yang sudah kembali, sekitar 1.300 orang. Itu yang harus dipantau terus.

Dalam UU Tindak Pidana Terorisme yang lama, aparaturnya tidak dapat menangkap, menahan, atau memproses pelaku teror kalau dia belum melakukan tindak terorisme. Kalau dia sudah berbuat teror, aparaturnya baru bisa menangkap, menahan, dan memproses. Sedangkan setelah UU Tindak Pidana Terorisme direvisi, aparaturnya sudah bisa melakukan langkah hukum, dengan menangkap atau memenjarakan mereka (pelaku teror) kalau sudah ada indikasi.

Perlakuan beberapa negara terhadap eks ISIS memang berbeda-beda. Maroko, misalnya, perempuan dan anak-anak di bawah usia 10 tahun bisa kembali ke Maroko. Tetapi, untuk laki-laki tidak bisa kembali ke negaranya. Di Indonesia pemerintah tentu mempunyai pertimbangan tersendiri menolak WNI eks ISIS kembali ke Tanah Air. Kita perlu mendukung langkah pemerintah ini. Namun, perlu juga mempertimbangkan hal-hal lain dengan cara memvalidasi WNI eks ISIS yang berada di Suriah dan Irak. Tetapi juga WNI eks ISIS yang di Afghanistan, Turki. Yang menjadi masalah, markas ISIS di Turki akan ditutup. Kita tidak tahu kemana nanti WNI eks ISIS di Turki.

Bagaimana status kewarganegaraan

WNI eks ISIS itu?

Secara UU mereka adalah WNI yang sudah meninggalkan kewarganegaraannya. Ketika mereka sudah membuang paspor, membakar, dan membunuh hanguskan kewarganegaraannya berarti mereka sudah bukan WNI lagi. Ini juga menjadi pelajaran bahwa sekali menghilangkan, melenyapkan, dan membuang bukti kewarganegaraan maka mereka berisiko untuk tidak bisa kembali ke Indonesia.

Bagaimana dengan mereka yang masih memiliki bukti-bukti kewarganegaraan Indonesia. Apakah mereka bisa kembali ke Indonesia?

Karena itu kita berharap BNPT dan Badan Intelijen Negara memvalidasi mereka yang berjumlah 600-an orang itu. Dengan validasi ini BNPT dan Badan Intelijen Negara tentu punya kriteria-kriteria. Biarlah BNPT dan BIN yang membuat kriteria-kriteria untuk validasi itu. Ini bukan pendataan tetapi validasi. Mereka sebenarnya sudah terdaftar. Validasi itu misalnya apakah mereka pergi karena ikut-ikutan atau sebab-sebab lainnya.

Kalau setelah divalidasi, ada di antara mereka yang pergi karena pengaruh orang lain atau ikut-ikutan, atau mereka tidak dalam kegiatan ISIS. Apakah mereka bisa kembali ke Indonesia?

Kita serahkan kepada lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk itu. Biarlah mereka yang memilikinya. Kalau nanti saya jawab, pendapat saya ada subjektivitasnya.

Berapa lama untuk melakukan validasi terhadap WNI eks ISIS ini?

Kita belum tahu. Tetapi tidak lama lagi mereka harus meninggalkan Turki karena kamp-kamp itu akan dibubarkan.

Jadi bisa dikatakan mereka sebenarnya sudah bukan WNI lagi?

Karena itu perlu validasi. Kalau ternyata mereka masih memiliki paspor yang lengkap dan utuh, tetapi kemudian tertipu bergabung dengan ISIS. Ini yang perlu divalidasi. Kita minta BNPT dan BIN memvalidasi mereka. Tapi untuk sementara itu menghormati keputusan pemerintah.

Bisa saja mereka pura-pura mengaku tertipu. Karena itu intelijen perlu melakukan validasi, misalnya dengan interogasi di negara itu, atau cara lainnya, kita serahkan kepada BNPT dan BIN. Kita punya BIN di luar negeri. Kita juga punya BIN di daerah. Jadi

bisa dilakukan kolaborasi. BIN Luar Negeri bekerja, BIN Daerah juga bekerja. Misalnya, BIN Daerah bisa menelusuri di daerah asal WNI eks ISIS itu. Saya kira validasi ini memang butuh waktu.

Apakah mereka bisa menjadi warga negara lain?

Bisa saja. Mereka bisa minta suaka politik ke negara-negara lain. Tapi negara mana yang mau menerima? Di Eropa, mereka tidak mau menerima eks ISIS. Tapi kadang-kadang mereka datang secara ilegal.

Apakah WNI eks ISIS ini memang masih menjadi ancaman bila kembali ke Indonesia? Padahal sudah ada UU Tindak

pemerintah mempunyai pandangan yang komprehensif. Terutama presiden, pasti mendapatkan masukan dari mana-mana.

Menurut Bapak bagaimana ancaman terorisme di Indonesia saat ini?

Sejak UU Tindak Pidana Terorisme direvisi, tindak pidana terorisme bisa dikatakan jauh berkurang dari sebelumnya. Kalau UU yang lama, pelaku terorisme bertindak baru bisa ditangkap. Tetapi sekarang, dengan UU Tindak Pidana Terorisme yang sudah direvisi, ada aturan dari mekanisme penanganan orang yang akan berbuat teror itu.

Apakah ada kemungkinan WNI eks ISIS dilokalisasi di sebuah pulau



Pidana Terorisme yang sudah direvisi?

Jangan sampai orang yang jumlahnya 600-an itu rusaklah ratusan juta warga negara Indonesia lainnya yang mencintai negaranya dan mengakui NKRI.

Pemerintah sedang mempertimbangkan anak-anak WNI eks ISIS ini. Bagaimana pendapat Bapak?

Mungkin bisa melihat Maroko. Negara itu memvalidasi warga negaranya yang eks ISIS. Perempuan yang sudah tua dan anak-anak di bawah usia 10 tahun bisa kembali ke Maroko. Sementara sisanya (laki-laki) berkeliraran di negara-negara Turki hingga Eropa.

Anak-anak itu kembali ke negaranya tanpa didampingi orangtuanya?

Ya, mereka dibawa ke Maroko. Kita belum melakukan seperti itu. Jadi kita tunggu bagaimana keputusan pemerintah nanti. Kita tunggu sikap resmi pemerintah. Tentu

(seperti suspect virus corona)?

Indonesia mempunyai 17 ribu lebih pulau. Banyak pulau yang tidak dihuni. Sudah saatnya pemerintah mengelola pulau-pulau itu. Seperti penanganan virus Corona. Perlu juga dikantina di sebuah pulau yang tidak ada penduduknya, sehingga tidak terjadi gesekan social, seperti di Natuna.

Terhadap WNI eks ISIS ini, saya kira mereka menderita penyakit ideologi. Jadi, tidak bisa diterima begitu saja. Kalau mereka kembali ke Indonesia bisa menjadi ancaman bagi umat Islam. Sebab, ideologi ISIS menyebut kita sebagai *thogut* atau syaitan.

Yang kita khawatirkan, mereka sudah terlatih. Misalnya, bisa membuat racun asam nitrat atau asam karbonat. Itu adalah teror-teror zaman sekarang. Tidak lagi dalam bentuk bom tetapi racun-racun mematikan. Nah, hal-hal seperti ini perlu divalidasi oleh intelijen. □

Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed)

Ma'ruf Cahyono Ketua Umum Alumni Fakultas Hukum Unsoed

Munas berjalan sangat dinamis. Namun pada akhirnya jalan yang ditempuh adalah musyawarah mufakat.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

DR. H. MA'RUF CAHYONO, SH., MH., terpilih sebagai Ketua Umum Keluarga Alumni Fakultas Hukum (KAFH) Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed). Ma'ruf Cahyono terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Nasional (Munas) KAFH Unsoed yang berlangsung di Java Heritage

Hotel Purwokerto, Sabtu (22/2/2020).

Ketua Panitia Munas KAFH Unsoed, Dr. Kartono SH., MH., mengungkapkan, Munas dihadiri perwakilan dari 35 angkatan (angkatan 1981 hingga angkatan 2015). Setiap angkatan diwakili 3 orang. Dengan jumlah 85 orang yang hadir maka Munas telah

memenuhi kuorum. "Munas berjalan dengan musyawarah mufakat menetapkan Dr. Ma'ruf Cahyono sebagai Ketua Umum KAFH Unsoed periode 2020 - 2025," katanya.

Usai terpilih sebagai Ketua KAFH Unsoed, Ma'ruf Cahyono mengungkapkan, Munas berjalan sangat dinamis. Namun pada



akhirnya jalan yang ditempuh adalah musyawarah mufakat sehingga bisa menghasilkan ketua umum terpilih melalui proses yang sesuai harapan. “Yaitu, tidak melalui cara pemungutan suara atau voting. Dan, tadi telah disepakati saya sebagai Ketua Umum KAFH Unsoed,” ujar alumni FH Unsoed angkatan 1986.

Ma’ruf menilai, jabatan yang diemban sebagai Ketua Umum KAFH Unsoed merupakan amanah dari alumni FH Unsoed mulai angkatan 1981 sampai 2015. “Amanah ini harus saya jalankan dengan penuh dedikasi, kesadaran dan penuh tanggungjawab. Untuk menjalankan amanah itu saya tidak bisa sendiri, tapi harus dibantu semua alumni lintas angkatan,” katanya.

Ma’ruf menambahkan, dalam waktu dekat akan menata kembali AD/ART KAFH Unsoed dan menyusun program dan kegiatan selama lima tahun ke depan dalam bentuk rencana strategis KAFH lima tahunan. “Agar dalam lima tahun periode nanti kita mampu melaksanakan program dan kegiatan yang konkret, nyata, dan bermanfaat untuk kepentingan alumni, almamater, dan lebih luas lagi untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara,” imbuh Ma’ruf Cahyono yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal MPR RI.

Ma’ruf percaya, dengan semangat



Ma’ruf Cahyono

kebersamaan dan kekeluargaan KAFH Unsoed, program dan kegiatan itu bisa dilaksanakan. “Seperti diamanatkan Panglima Besar Jenderal Soedirman sebagai panutan Fakultas Hukum Unsoed, yaitu kita ingin mewujudkan misi ke depan agar kita bisa berperan dan berkiprah untuk alumni, almamater, dan masyarakat, bangsa dan negara,” katanya lagi.

Ma’ruf menyebutkan, dalam periode ke depan ada tantangan-tantangan baru sehingga KAFH Unsoed memerlukan visi misi dan mimpi-mimpi baru, yaitu visi misi bersama yang akan diwujudkan secara bersama-

sama pula. “Kita akan bentuk kepengurusan yang lebih formal, terstruktur dan fungsional sehingga ada pedoman atau guidance. Program dan kegiatan harus nyata dan konkret, memberi manfaat,” tuturnya.

Ma’ruf mencontohkan, alumni FH Unsoed yang tersebar di mana pun, termasuk di luar negeri dengan berbagai macam profesi akan diberdayakan untuk memberikan kontribusi kepada alumni, almamater, dan masyarakat. “Kita akan menata organisasi lebih dulu kemudian membuat program dan kegiatan yang bermanfaat,” pungkasnya. □

BSC





Sejak Dulu Sudah Cinta *Pancasila*



MAYA Olivia Rumantir model, penyanyi lawas asal Sulawesi Utara kelahiran Sulawesi Selatan yang sekarang politikus dan anggota Parlemen, mengungkapkan bahwa sejak dulu hingga kini aktif menyuarakan tentang kebangsaan, persatuan, dan Pancasila.

Sejak era keemasannya sebagai penyanyi tenar, Maya Rumantir dikenal sangat patriotik. Berbagai lagu telah digubahnya, dan sebagian besar lagu itu bertemakan tentang kebangsaan dan persatuan. “Misi saya dulu menyuarakan kebangsaan, yang sekarang dikenal Sosialisasi Empat Pilar MPR melalui lagu,” ucap Maya Rumantir.

Saat ini dia mengeluarkan album khusus: “Indonesia Bersinar” bertemakan patriotik kebangsaan. Salah satu lagunya berjudul: “Torang Samua Basudara.” Lagu ini, menurut Maya Rumantir, milik semua, seluruh rakyat Indonesia. “Saya, Anda kalian semua adalah bersaudara dalam jahitan persatuan NKRI,” ucapnya. □

DER



Maya Rumantir

Perbanyak *Film Indonesia* yang Menginspirasi

ARTIS muda cantik kelahiran Juli 2002, **Tissa Biani**, bersyukur bisa menjadi salah satu pemeran film yang sangat menginspirasi anak-anak milenial, yakni: Film 'Anak Garuda'.

Film besutan Faozal Rizal ini diangkat dari kisah nyata siswa-siswi Sekolah Pagi Indonesia di Batu Malang, Jawa Timur.

Film yang mulai tayang Januari 2020 ini bercerita tentang perjuangan anak-anak yatim piatu yang berasal dari Sekolah Pagi Indonesia. Mereka adalah Sheren, Olfa, Wayan, Dilla, Sayyida, Yohana, dan Robet untuk berani bermimpi pergi ke Eropa (Prancis). Unikny, mereka ini potret keberagaman Indonesia. Berbeda suku dan agama, namun menjadi satu demi tujuan bersama.

Dalam film ini, Tissa memerankan tokoh Sayyida atau Say—seorang cewe berhijab nan lincah, pekerja keras, galak tapi baik hatinya, dan penolong sesama. Selama syuting banyak yang lucu-lucu, apalagi syuting di Eropa. "Aku kan penggemar cemilan Indonesia, ya udah aku bawa aja banyak cemilan Indonesia," katanya seraya terbahak.

Penerima Penghargaan Khusus Piala Citra untuk Anak-anak Tahun 2014 ini berharap, perbanyaklah film Indonesia yang menginspirasi banyak orang. "Bravo film Indonesia," tandasnya. □

DER



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Tissa Biani



Moreno Suprpto

Paparkan Empat Pilar untuk Anak-anak Milenial

SELAMAT datang adik-adik yang saya cintai," sapa anggota MPR dari Fraksi Partai Gerindra, **Moreno Soeprapto**, kepada 282 siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) I Kota Malang, Jawa Timur, saat mengunjungi MPR pada 31 Januari 2020.

"Kedatangan dari Malang sudah saya tunggu-tunggu," tambah mantan pembalap mobil skala internasional ini. "Saya hepi banget kalau ketemu anak-anak milenial, apalagi menyangkut soal pemaparan Empat Pilar MPR. Mereka generasi penerus bangsa, jadi sangat mengena," katanya.

Kepada adik-adik itu, Moreno memberi motivasi bahwa sebagai warga bangsa Indonesia diberi kesempatan untuk menjadi apa saja, untuk itu kembangkanlah cita-cita kalian. "Ayoo semangat.. siapa ingin jadi pembalap, ingin jadi presiden. Segara capai cita-cita kalian dengan belajar yang tekun!" serunya kepada para siswa, yang disambut tepuk tangan riuh

Pada kesempatan itu, Moreno memang sedang memaparkan materi Sosialisasi Empat Pilar MPR kepada siswa MIN I Kota Malang. □

DER



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Natuna Kawasan Berpantai Mempesona

DALAM kurun waktu Januari hingga Februari lalu, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sempat menjadi pusat perhatian. Pasalnya, daerah kepulauan paling utara di selat Karimata ini dijadikan sebagai lokasi karantina sekaligus observasi bagi 238 Warga Negara Indonesia (WNI) yang dipulangkan dari Wuhan, Cina. Mereka diobservasi sejak 2 hingga 15 Februari untuk memastikan mereka tidak terpapar virus Corona.

Upaya pemerintah menggunakan Natuna sebagai kawasan untuk memastikan warganya tidak terkena virus mematikan dari Wuhan itu, sempat mendapat penolakan oleh masyarakat setempat. Ternyata, hingga masa observasi selesai, tidak ada satu pun dari WNI itu yang terkena virus Corona. Sehingga keseluruhan WNI yang dipulangkan Cina itu dinyatakan aman dari virus korona, dan sudah diizinkan untuk kembali ke daerah masing-masing.

Kini, setelah polemik observasi WNI dari Cina selesai, ketenaran Natuna tak lantas redup begitu saja. Bahkan Natuna menjadi sangat populer hingga ke mancanegara. Pasalnya, observasi terhadap WNI dari Wuhan itu mendapat perhatian dari berbagai

negara. Mereka mengikuti perkembangan kesehatan WNI dari Cina itu, hingga dinyatakan sehat dan aman virus mematikan itu.

Selain terbukti cocok untuk melakukan observasi virus Corona, Kabupaten Natuna sendiri sesungguhnya sebuah daerah yang patut mendapat perhatian. Daerah ini memiliki potensi wisata yang sangat besar. Khususnya, pariwisata alam. Mulai dari pantai, pulau-pulau nan indah, desa yang asri hingga air terjun. Potensi ini harus segera dikem-

bangkan agar menjadi alternatif destinasi wisata dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Apalagi, Kepulauan Natuna berada di wilayah yang sangat strategis. Di bagian utara kabupaten ini berbatasan dengan dua negara tetangga, Vietnam dan Kamboja. Di selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Jambi. Di bagian barat dengan Singapura, Malaysia, dan Riau. Sementara di bagian timur berbatasan





dengan Malaysia Timur dan Provinsi Kalimantan Barat. Selain itu, Natuna juga berada pada jalur pelayaran internasional Hongkong, Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan.

Kabupaten Natuna memiliki banyak pantai dengan potensi dan keindahan yang berbeda-beda. Pantai-pantai itu, antara lain Pantai Batu Kasah atau Pantai Cemaga, Pantai Tanjung, Pantai Teluk Buton, Pantai Sahi, dan Pantai Sisi. Berbeda dengan destinasi wisata di Bali yang sudah jadi kawasan wisata romantis dengan pelayanan serba ada, pariwisata Natuna ini lebih cocok buat para wisatawan yang gemar dengan petualangan. Pasalnya, kawasan ini masih minim dengan sarana atau infrastruktur dan pelayanan.

Pasir Putih

Salah satu pantai yang layak dikunjungi saat berwisata di Natuna adalah Batu Kasah. Pantai Batu Kasah berada di Kecamatan Bunguran. Batu Kasah atau Pantai Cemaga mendapat julukan *The Best Beach in Natuna*. Sebutan itu kiranya tidak berlebihan, karena Pantai Cemaga dipercaya merupakan salah satu pantai terbaik yang ada di Kabupaten Natuna.

Pantai Batu Kasah memiliki bibir pantai yang panjangnya mencapai 5 km. Pasir di pantai ini berwarna putih. Sementara air lautnya sangat jernih. Di sekeliling pantai ini ditumbuhi banyak pohon kelapa, serta

serakan batuan granit yang menyempurnakan keindahannya.

Selain Batu Kasah, pantai lain yang tak kalah mempesonanya adalah Pantai Sisi. Keindahan pantai ini diakui dan dipuji oleh Majalah *Island*. Pada 2006, majalah *Island* menobatkan Pantai Sisi sebagai salah satu pantai terbaik di dunia. Pantai Sisi adalah tempat yang sempurna untuk berlibur bersama pasangan, apalagi buat mereka yang sama-sama memiliki hobi berpetualang. Kondisi alam di tempat ini masih natural, belum banyak terjamah tangan manusia, sehingga makin memberi tantangan khususnya bagi para petualang.

Kelebihan Pantai Sisi, antara lain pasirnya berwarna putih dengan tekstur yang agak kasar. Itulah sebabnya, meski pengunjung bergulat dengan pasir di pantai ini, tetapi pakaian akan tetap bersih karena pasirnya tidak lengket di baju dan kulit. Sedangkan, lautnya yang sangat tenang membuat banyak pengunjung asing yang menganggapnya bagaikan kolam.

Bila di Eropa terdapat *Alif Stone Park* yang dikunjungi oleh turis dari berbagai Negara, termasuk Indonesia, di Natuna pemandangan serupa juga bisa ditemukan. *Alif Stone Park* yang ada di Natuna, tepatnya berada di tepi pantai Desa Sepempeng, tak jauh Kota Ranai — ibukota Kabupaten Natuna. Keindahan pemandangan di tempat ini sangat sempurna, sehingga kerap disebut sebagai

ikon paling populer di Natuna.

Sesuai namanya, *Alif Stone Park* merupakan taman batu granit yang berada di tepi pantai. Tempat wisata yang satu ini merupakan perpaduan antara pantai pasir putih, air laut yang jernih, dan gugusan batuan granit yang sangat mengesankan. Di tempat ini, wisatawan bisa berkeliling mengitari area taman batu itu dengan berjalan melalui jembatan kayu yang menghubungkan batu besar yang satu dengan batu besar lainnya.

Selain wisata alam, Natuna juga memiliki potensi wisata religious, di mana di sana terdapat sebuah Masjid Agung Natuna. Masjid ini dibangun pada 2007, dan membutuhkan waktu pembangunan selama dua tahun, dengan arsitektur yang terinspirasi oleh Taj Mahal. Karena itu, tak salah jika Masjid Agung Natuna dinobatkan sebagai masjid termegah dan terbesar di sana. Masjid Agung Natuna terletak di kompleks Gerbang Utaraku yang menjadi kawasan pusat pemerintahan dan bisnis di ibukota kabupaten, Ranai.

Untuk melengkapi kunjungan ke Natuna, masjid ini sangat layak untuk didatangi. Selain untuk beribadah, masjid Agung Natuna juga bisa digunakan sebagai tempat pembuang penat setelah melakukan perjalanan jauh. Dan, masjid ini berada di tempat ketinggian, dan menghadap ke laut lepas. Sungguh indah dengan pemandangan yang mengasyikkan. □

MBO

Dr. Syarifuddin Hasan, SE., MM., MBA.

Amandemen Dilakukan Secara Berhati-hati



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WACANA perubahan terbatas Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia (NRI) Tahun 1945 terkait menghidupkan kembali haluan negara terus menggelinding. Seolah berkejaran dengan waktu, kesepuluh pimpinan MPR periode 2019-2024 secara masif melakukan safari kebangsaan sebagai upaya serap aspirasi ke berbagai komponen masyarakat. Mulai dari pimpinan ormas, organisasi keagamaan hingga pimpinan media massa.

Kesibukan itulah yang ditunjukkan oleh Dr. Syarifuddin Hasan, SE., M.M., M.B.A., (70), sebagai salah seorang pimpinan MPR periode 2019-2024. Selaku Wakil Ketua MPR dan Koordinator Badan Pengkajian MPR, Syarif Hasan –begitu ia biasa disapa– terus berkeliling ke beberapa universitas di beberapa kota di Indonesia, dan sekaligus bertemu kepala daerah setempat, baik gubernur, bupati, maupun walikota.

Safari kebangsaan dengan agenda bertemu pemerintah daerah dan civitas akademika di sejumlah perguruan tinggi, menurut Syarif Hasan, adalah bagian dari sikap kehati-hatian MPR sebelum melaksanakan amandemen UUD. Dan, sekaligus memantapkan pandangan masyarakat terkait wacana perubahan konstitusi.

“Intinya kita mau memantapkan bahwa perubahan itu memang

perlu dilakukan. Karena itu, kami terus berkomunikasi dengan masyarakat untuk membuka ruang diskusi seluas-luasnya kepada seluruh komponen bangsa. Kami ingin mendapat gambaran bagaimana pandangan mereka terhadap wacana ini,” kata Syarif Hasan kepada Majalah *Majelis* beberapa waktu lalu.

Melalui safari kebangsaan dan serap aspirasi, pimpinan MPR mendengarkan masukan dari kampus dan pemerintah daerah. Universitas dipilih, menurut Syarif Hasan, karena kaum cendekia di perguruan tinggi dianggap lebih fair, tidak memiliki kepentingan politik, dan lebih murni dari kepentingan manapun. Berbeda dengan pengamat, para cendekiawan di kampus dinilai relatif jauh dari nuansa politik. Dengan menampung pendapat dari kampus diharapkan bisa memperoleh masukan yang baik dari sisi akademis.

Sedangkan pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten maupun kota, dipilih karena merekalah yang berhadapan secara langsung dengan rakyat. Mereka tahu apa yang dikehendaki rakyat. Selanjutnya, kata Syarif Hasan, hasil dari serap aspirasi itu dilaporkan kepada Badan Pengkajian MPR untuk dijadikan sebagai preferensi pembahasan.

“Bagi kampus yang sudah menyampaikan naskah akademik,





kedatangan saya akan mengonfirmasi, apakah pandangannya masih sama atau berubah. Semua ini dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian,” ujar Syarif Hasan.

Sejauh ini, menurut Syarif Hasan, banyak masukan yang sudah diterima, namun belum semuanya direkap. Sehingga belum diketahui kecenderungan secara mayoritasnya. Yang pasti usulan yang masuk beragam. Ada kelompok masyarakat menginginkan perubahan terbatas, hanya untuk menghadirkan haluan negara. Lalu, ada pula kelompok masyarakat mengatakan, konstitusi yang ada saat ini sudah cukup baik, sehingga tidak perlu ada perubahan lagi. Namun, ada juga beranggapan sebaiknya dilakukan perubahan total. Sementara kelompok tertentu menginginkan kembali ke UUD yang asli.

“Mudah-mudahan pada waktunya semua akan baik-baik saja. Makanya, sedari awal kita berhati-hati. Menyerap aspirasi dari kampus dan pemerintah daerah itu adalah salah satu bentuk dari sikap kehati-hatian saya selaku koordinator Badan Pengkajian MPR,” kata politisi Partai Demokrat ini.

Asam Garam

Sebagai politisi, Doktor Ilmu Manajemen lulusan Universitas Persada Indonesia ini bukanlah sosok kemarin sore. Ia sudah banyak merasakan asam garam dunia politik Tanah Air. Hal itu bisa dilihat dari rekam jejaknya, baik di lembaga legislatif maupun eksekutif.

Syarief Hasan terpilih menjadi anggota DPR RI pada 2004. Episode pertamanya di ranah legislative dihabiskan untuk mengisi pos di Komisi XI dan Panitia Anggaran DPR. Pada 2006 ia dipercaya jadi Ketua Fraksi Partai Demokrat. Lalu, pada Pemilu 2009, pria kelahiran 7 Juni 1949 di Palopo, Sulawesi Selatan, ini kembali sukses mendapat kepercayaan mengemban amanat rakyat di Senayan.

Namun pada episode ini Syarif Hasan urung menempati kursinya di DPR RI, karena suami dari Ingrid Maria Palupi Kansil ini dipercaya oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengisi pos Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada Kabinet Indonesia Bersatu II periode 2009-2014. Pada saat bersamaan, bapak empat anak ini ditunjuk menjadi Ketua Harian Partai Demokrat. Selain itu, ia juga menjabat sebagai anggota Dewan Pembina Partai Demokrat periode 2010-2015.

Pada pemilu 2014 Syarif Hasan kembali sukses meraup suara

untuk membawanya ke DPR periode ketiga. Keberhasilan tersebut semakin lengkap, karena ia di dapuk oleh pendiri Partai Demokrat untuk menjadi Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat periode 2015-2020. Dan pada pemilu 2019, Syarif Hasan untuk keempat kalinya kembali ke Senayan, sekaligus untuk menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua MPR, periode 2019-2024.

“Saya bersyukur mendapat kepercayaan untuk menempati posisi sekarang ini. Tentu itu semua adalah berkah dari Allah, tapi sebagai manusia saya selalu berusaha, disertai tak pernah berhenti belajar, berdisiplin dan senantiasa mencintai pekerjaan,” kata Syarif Hasan.

Meski kariernya terbilang lancar di dunia politik, Syarif Hasan mengaku tidak pernah merancang dirinya untuk menggeluti dunia tersebut. Bahkan, perhatiannya terhadap politik datang secara tidak sengaja. Saat itu, 2001, dia melihat sosok SBY sebagai calon pemimpin Indonesia di masa depan.

Tidak begitu lama, ada seorang temannya yang menawari untuk bergabung dengan sebuah partai politik. Setelah dijelaskan bahwa SBY adalah tokoh dan pendirinya, Syarif Hasan langsung





FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

mengiyakan. Apalagi setelah ia bertemu dan berdialog langsung dengan SBY. Seketika Syarief yang saat itu memimpin sejumlah perusahaan, langsung banting stir dan ikut Partai Demokrat. Pilihan tersebut ternyata tepat, bersama Partai Demokrat, Syarief Hasan menapaki karier politiknya secara gemilang.

Pergi dari Rumah

Sejak kecil Syarief Hasan di kenal sebagai sosok pemberani. Sulung dari sepuluh bersaudara putra pasangan Muhamad Hasan dan Siti Aisyah Bandi ini sudah hidup bersama sang nenek sejak usia kecil. Sementara sembilan saudaranya tinggal bersama sang ayah yang berprofesi sebagai pegawai KUA.

Syarief pernah pergi dari rumah karena ingin punya uang banyak. Syarief juga nyaris pergi ke Makassar seorang diri, karena dipicu keinginan untuk melihat kemajuan di Makassar. Namun, upayanya itu gagal. Saat sudah berada di atas kapal dan bersembunyi ditumpukan barang, ia ditemukan orang tuanya dan harus kembali ke rumah.

“Nenek saya Hj. Alwi Daimanawara akhirnya berembug dengan orang tua, untuk mengirim saya ke Makassar. Dari pada dipaksa tetap di Palopo, saya pilih nekat pergi sendiri. Dan, sejak itu saya tinggal bersama paman, sampai akhirnya menyelesaikan pendidikan SD sampai dengan SLTA di Makassar,” cerita Syarief Hasan tentang masa kecilnya.

Lulus SLTA, Syarief Hasan meneruskan pendidikannya di Fakultas Ekonomi, Universitas Krisnadwipayana (UNKRIS), Jakarta. Ia juga mengambil program Magister Management dari UNKRIS dan mengambil program Magister Business Administration di California State University, AS, serta program doktor di Universitas Persada Indonesia YAI, Jakarta, pada 2007.

Selesai menempuh Pendidikan, Syarief Hasan terjun ke dunia usaha. Pada 1973 hingga 1979, ia bekerja di PT. United Tractors dan jadi Direktur Utama PT. Barita Multi Recon pada 1979 hingga 1985. Pada 1985 hingga 2004, Syarief Hasan menjabat Komisaris PT. Insan Fajar Cakrawala. Syarief Hasan juga mendirikan dan mengelola perusahaan dengan nama PT. Mesa Cipta Pratama pada 1998 hingga 2004.

Di usianya yang bakal menginjak 71 tahun pada Juni 2020, Syarief Hasan masih terlihat bugar. Ia juga memiliki daya ingat yang sangat bagus. Di beberapa kesempatan, Majalah *Majelis* menyaksikan kemampuannya dalam menghafal nama-nama orang dengan sangat baik. Padahal, orang-orang itu baru saja dikenalnya.

Selain itu, Bapak empat anak ini rajin berolah raga. Setiap hari ia menghabiskan waktu sekitar 1,5 jam untuk berlari atau olahraga fitness. Ia juga selalu bangun di pagi hari, sebelum ayam berkokok (subuh), untuk melaksanakan ibadah. □

MBO

Ajaran Islam dan Pengamalan Pancasila Sebagai Jalan Lurus Kehidupan

LANDASAN kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang terdiri dari landasan ideologi, konstitusi, persatuan dan kesatuan, serta semangat keberagaman merupakan modal sosial untuk membangun kekuatan bangsa Indonesia. Pemahaman tentang pengertian tersebut sangat relevan dengan ajaran Islam yang diyakini sebagai jalan kehidupan yang benar untuk bangsa.

Pancasila adalah manifestasi seluruh rakyat Indonesia dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara yang berketuhanan, menghargai sesama manusia, menjaga silaturahmi, bergotong royong dan bermusyawarah, juga berlaku adil. Hal ini menjadi sangat penting, bahwa menjaga Pancasila dengan baik dengan cara memadukan nilai-nilai luhur Pancasila menjadi karakter dan sifat rakyat Indonesia. Menjadikan Pancasila sebagai panduan dan kata final bagi rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika Pancasila sudah melebur menjadi karakter dan dijalankan dengan baik, maka Indonesia akan semakin nyaman, aman, dan pada akhirnya makin mendekati kepada cita-cita bangsa sesuai harapan para founding fathers.

Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila memiliki fungsi sangat fundamental. Pancasila disebut sebagai sumber dari segala sumber hukum. Sifat Pancasila yuridis formal maka mengharuskan seluruh peraturan perundang-undangan berlandaskan pada Pancasila. Pancasila sebagai dasar filosofis dan sebagai perilaku kehidupan. Artinya, Pancasila merupakan falsafah negara dan

pandangan atau cara hidup bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai cita-cita nasional. Pancasila menjadi karakter masyarakat Indonesia sehingga menjadi identitas atau jati diri bangsa Indonesia. Pancasila merupakan rujukan, acuan sekaligus tujuan dalam pembangunan karakter bangsa.

Dalam proses perumusan dasar negara, Presiden Soekarno menuangkan konsep dasar negara ke dalam pengertian dasar falsafah (*philosofische grondslag*) dan pandangan komprehensif dunia (*weltanschauung*) secara sistematis dan koheren. Pada 1

Juni 1945, Soekarno mengemukakan pemikirannya tentang Pancasila, yaitu nama dari lima dasar negara Indonesia, di depan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Rumusan lima dasar negara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 adalah: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan atau perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Perumusan norma yang tertuang di dalamnya, Pancasila meletakkan nilai-nilai yang esensial di mana hal itu berafiliasi dengan konsep keislaman. Yaitu, Ketuhanan Yang Maha Esa, prinsip permusyawaratan, keadaban, kemanusiaan, dan keadilan. Semua esensi tersebut adalah substansi yang termaktub di dalam ajaran Islam. Justru itulah aktualisasi Islam dan dasar negara Pancasila selalu hidup bersatu.



Oleh:
Sjarifuddin Hasan
Wakil Ketua MPR RI



Mayoritas Islam dan nilai-nilai Pancasila

Di negara Indonesia masyarakatnya mayoritas umat Islam, sebuah negara yang berlandaskan Pancasila dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan, yang paling penting lagi adalah tokoh-tokoh bangsa menyepakati dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Sehingga, selain Islam menekankan pada prinsip-prinsip tersebut, Pancasila juga meletakkan nilai-nilai itu sebagai bentuk tujuan untuk mewujudkan simbol persatuan Indonesia.

Karena itulah, dasar negara Pancasila adalah ideologi yang final sangat tidak patut untuk dipertentangkan di kalangan masyarakat majemuk, sebab Pancasila merupakan ideologi yang bersahabat dengan agama (religiously friendly ideology), termasuk dengan Islam. Dan, inilah, kemudian mengakibatkan Indonesia mampu bertahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Maka jika ada dari umat Islam mempunyai ideologi lain maka akan terjadi perbedaan-perbedaan. Sehingga, Islam sendiri substansi pemahamannya itu tidak monolitik di kalangan umat Islam itu sendiri. Jadi, hubungan Islam dengan Pancasila itu sangatlah erat, bagaikan manusia yang bisa hidup karena bisa bernafas, sama dengan negara mampu bersatu karena adanya dasar Pancasila. Jika itu terjadi secara konsisten dan berkelanjutan maka usianya akan panjang dan damai.

Khusus bagi umat Islam sebagai bagian dari keberagaman bangsa Indonesia, nilai-nilai Pancasila bukanlah sesuatu yang baru. Bahkan ajaran Islam selalu sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Seperti menjaga silaturahmi, menghormati perbedaan, saling tolong-menolong, bergotong-royong dalam kebaikan, dan banyak lagi sikap-sikap warga Negara yang mencerminkan nilai-nilai ajaran Islam.

Melihat pentingnya Pancasila untuk bangsa Indonesia itulah MPR yang mengemban amanah UU MD3 melakukan Sosialisasi Empat Pilar MPR yang di dalamnya ada Pancasila, UUD NRI Tahun 1945,

NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Sosialisasi yang dilakukan dengan berbagai metode ditujukan kepada seluruh elemen masyarakat Indonesia. Hal tersebut bertujuan agar rakyat Indonesia memahami dan bangga dengan nilai-nilai bangsanya sendiri.

Pada prinsipnya, Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara kedudukannya berada di atas tiga pilar yang lain. Empat Pilar tersebut merupakan prasyarat minimal bagi bangsa Indonesia untuk berdiri kukuh dan meraih kemajuan berlandaskan karakter kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Setiap warga negara Indonesia harus memiliki keyakinan bahwa Empat Pilar tersebut adalah prinsip moral ke-Indonesiaan yang memandu tecapainya kehidupan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Dengan hubungan yang relatif erat, masyarakat responsif menganggap penting untuk kembali melakukan penguatan bagi masyarakat terkait pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Karena hidup tanpa pengamalan Pancasila negara bisa menjadi lemah hingga tidak berdaya, dan Indonesia bisa terpecah-belah karena perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Perlu kita yakini bersama, dengan Pancasila kita bisa hidup ramah dan harmonis dengan umat agama lainnya. Paling tidak, dengan ideologi tersebut negara Indonesia tidak lagi dilanda konflik agama maupun konflik sosial.

Intinya, semua rakyat Indonesia harus menyadari betapa kita semua membutuhkan Pancasila, termasuk konstitusi, NKRI, dan Kebhinnekaan bangsa. Bila kita semua menyadari akan hal itu maka mudah-mudahan dalam menempuh perjalanan bangsa ini kita semua tetap bersatu dan tidak terpecah belah, serta Indonesia akan menjadi bangsa yang maju. □

Buku Yang Memberi Gambaran Utuh

MPR menerbitkan buku Publikasi Sidang MPR 2019 di Media. Buku ini diharapkan bisa memberikan gambaran yang lengkap kepada masyarakat tentang sidang-sidang MPR, sehingga dapat membangun narasi yang utuh dari setiap detail yang ada.

SEIRING perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, catatan sejarah perjalanan manusia semakin terdokumentasi dengan baik dan rapi, sehingga kelak pelanjut kehidupan akan mudah menemukan jejak-jejak pendahulunya dengan data dan fakta yang lengkap. Tidak perlu lagi membongkar dokumen-dokumen yang tebal dan berdebu, apalagi harus mengais-ngais jejak di tanah.

Terdokumentasi dengan baik dan lengkap hal demikian ada pada sidang-sidang MPR di tahun 2019. Lewat buku terbitan MPR dengan judul *Publikasi Sidang MPR 2019 di Media*, masyarakat bisa menelusuri peristiwa-peristiwa penting yang digelar MPR di tahun itu. Peristiwa penting? Iya, sebab di 2019 ada sidang-sidang kenegaraan yang diselenggarakan oleh MPR. Sidang-sidang itu adalah Sidang Tahunan MPR Tahun 2019, Sidang Akhir Masa Jabatan MPR Periode 2014-2019, Sidang Awal Masa Jabatan MPR Periode 2019-2024, dan Sidang Paripurna MPR dalam rangka Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Periode 2019-2024.

Buku setebal 160 halaman itu terbagi dalam 45 bab, diawali dengan berita-berita persiapan untuk menyukseskan acara itu. Media sebagai sarana penting untuk mengabarkan akan adanya acara penting di republik ini, maka pers sering diajak *meeting* oleh Biro Humas Setjen MPR. Dalam pertemuan tersebut, dipaparkan bagaimana prosedur mendapat *id card* peliputan dan di bagian-bagian mana awak media akan ditempatkan.

Selanjutnya, dalam bab-bab di buku itu diceritakan mengenai berbagai hal terkait sidang-sidang yang ada. Seperti dalam *Bab 8: Ketua MPR Berpesan Sidang Tahunan MPR 2019 Adalah Merajut Kembali Persatuan*; *Bab 11: Dalam Sidang Tahunan, Presiden Puji Kinerja MPR*; *Bab 21: Pelantikan Anggota MPR 2019-2024 Sukses, Pimpinan Sidang Ucapkan Terima Kasih Kepada Pimpinan MPR 2014-2019 dan Presiden*; *Bab 27: Musyawarah Mufakat, Bambang Soesatyo Terpilih Menjadi Ketua MPR Periode 2019-2024*; *Bab 40: MPR Gelar Paripurna Pelantikan Presiden dan Wapres RI Masa Jabatan 2019-2024*.

Sesjen MPR Ma'ruf Cahyono dalam kata pengantar mengatakan, dalam paradigma sejarah maupun politik hukum ketatanegaraan, MPR memiliki peran penting bagi kemajuan bangsa, mengingat MPR merupakan lembaga tinggi negara yang berkontribusi dalam membentuk undang-undang dasar, sekaligus sebagai lembaga

negara yang merepresentasikan seluruh kehendak rakyat, serta penjaga kepentingan masyarakat.

Sidang-sidang MPR, menurut pria asal Banyumas, Jawa Tengah, merupakan agenda kenegaraan yang penting. Dalam rangka mengoptimalkan sidang-sidang yang ada maka dibutuhkan peran media atau pers nasional untuk mempercepat penyampaian informasi yang berhubungan dengan penyelenggaraan sidang-sidang MPR. "Secara normatif, pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial", ujar Ma'ruf Cahyono.

Dengan sidang-sidang MPR para wartawan diharapkan konsisten dan konsekuen dalam menyajikan informasi secara

komprehensif, menanamkan pendidikan politik bagi masyarakat, memberikan informasi yang berkualitas dan beretika, dan wadah sosial kontrol yang sejalan dengan negara hukum yang demokratis. "Semoga penerbitan buku *Publikasi Sidang MPR 2019 di Media* dapat berguna bagi nusa, bangsa, dan peradaban Indonesia", ujarnya. "Semoga lewat buku ini tujuan penyelenggaraan sidang-sidang MPR dapat dioptimalkan secara maksimal", tambahnya.

Kepala Biro Humas Setjen MPR, Siti Fauziah, dalam kata pengantar menyebutkan, buku *Publikasi Sidang MPR 2019 di Media* diterbitkan dengan tujuan dapat memberikan gambaran yang utuh kepada masyarakat tentang prosesi dari tahapan persiapan, pelaksanaan, serta setelah pelaksanaan dari setiap penyelenggaraan sidang-sidang MPR, sehingga dapat membangun narasi yang utuh

dari setiap detail yang ada. "Harapannya buku ini bermanfaat bagi masyarakat sehingga dapat memberi pemahaman terhadap fungsi, tugas, dan wewenang MPR", paparnya.

Redaktur Pelaksana Majalah *Majelis*, Budi Muliawan, di cover belakang buku, di awal pengantar mengutip pendapat filsuf Socrates yang mengatakan, *Menulishlah maka kamu ada...* Untuk itu lebih lanjut Budi Muliawan menuturkan, sudah tepat kiranya Biro Humas MPR membukukan tulisan-tulisan dalam rangka publikasi kegiatan Sidang Paripurna MPR di tahun 2019. Menurutnya, buku ini dapat memberikan pengetahuan yang baru bagi masyarakat melalui tulisan-tulisan yang menarik, komunikatif, dan inspiratif. "Buku ini sangat layak untuk dibaca oleh berbagai kalangan", ujar alumni Universitas Brawijaya. □

AWG

